

KUNJUNGAN PRESIDEN VIETNAM NGUYEN XUAN PHUC

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI



MAJELIS

MPR RUMAH KEBANGSAAN

EDISI NO.01/TH.XVII/JANUARI 2023



Sosialisasi Empat Pilar MPR di Tahun Politik Merekatkan Semangat Persatuan dan Kesatuan Bangsa

ISSN 0854-6371
9 770854 637158

06 Catatan Awal Tahun
Dinamika Politik
2023

22 Nasional
Bansoet Dukung Jokowi
Hentikan Pemberlakuan PPKM

39 Selingan
Superhero Berkarakter
Nusantara

56 Sosialisasi
Gus Jazil, Saya Santri
Jadi Pimpinan MPR



MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT



Buku Digital MPR RI



MUDAH DI AKSES
EFEKTIF & EFISIEN

**MAJALAH MAJELIS, JURNAL,
PROSIDING DAN HASIL KAJIAN
MPR RI DALAM GADGET ANDA**

**“ Segera
Unduh
Aplikasinya !**

DI PLAY STORE
<http://bit.ly/bukudigitalmprri>

MPR.GO.ID



@MPRGOID



Buku Digital MPR RI
SETJEN MPR RI

Daftar Isi

EDISI NO.01/TH.XVII/JANUARI 2023



08 BERITA UTAMA

Sosialisasikan Empat Pilar di Tahun Politik

Pimpinan MPR berharap situasi menjelang Pemilu 2024 jangan sampai menjadi pintu masuk bagi terpecah-belahnya kehidupan kebangsaan. Karena itu, Pimpinan MPR memandang di tahun politik ini sangat penting memperkuat imunitas bangsa melalui pemberian vaksin ideologi menggunakan vaksin Empat Pilar MPR.



21 Nasional

Perencanaan Salah Berdampak Buruk Buat Perekonomian Daerah



58 Sosialisasi

Kiat Sukses Jadi Santri dan Politisi



39 SELINGAN

Superhero Karakter Nusantara



76 Profil

Hendrik Izaac Lewerissa

Pengantar Redaksi	04
Catatan Awal Tahun	06
Refleksi Akhir Tahun	36
Aspirasi Masyarakat	47
Gema Pancasila	48
Varia MPR	66
Wawancara	68
Figur	72
Ragam	74
Dari Rumah Kebangsaan	80
Rehal	82



COVER

Edisi No.01/TH.XVII/Januari 2023

Kreatif: Jonni Yasrul - Foto: Istimewa

Sosialisasi Empat Pilar MPR di Tahun Politik

HINGAR bingar koalisi partai politik dan munculnya para bakal calon presiden dan calon wakil presiden sudah mewarnai jagad perpolitikan di Tanah Air. Beginilah suasana menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, tepatnya hari “H” pemungutan suara dilakukan pada 14 Februari 2024. Maka pada tahun 2023 hingga pemungutan suara pada tahun 2024 layak disebut sebagai tahun politik. Semua perhatian masyarakat tertuju pada pesta demokrasi yang bukan hanya diramaikan partai politik peserta Pemilu, tetapi juga para calon yang akan bertarung dalam kontestasi nanti.

Tahapan menuju Pemilu 2024 sudah berjalan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan dan mengumumkan partai politik yang menjadi peserta Pemilu 2024. Tahun ini pun KPU akan membuka pendaftaran pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Tentu saja, dua hal ini diprediksi akan memanaskan suhu politik, karena adanya kompetisi untuk mendekati dan mengambil hati masyarakat. Beragam cara pun dilakukan. Tak tertutup kemungkinan pula terjadi kampanye hitam yang berpotensi memicu dan menimbulkan gesekan di masyarakat.

Semua pihak memang harus belajar dari gelaran Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2019, ketika terjadi polarisasi yang sangat tajam di tengah masyarakat. Para pendukung masing-masing pasangan capres dan cawapres saling serang dan menyebarkan kampanye hitam. Belum lagi politik kebencian dan eksploitasi isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dimanfaatkan untuk menjatuhkan lawan. Hal ini tentu saja akan berdampak dan mengganggu suasana harmonis di masyarakat, bangsa, dan negara.

Di sinilah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai representasi rakyat yang mendapat kepercayaan tinggi dari masyarakat bisa mengambil peran. Seperti sering dikemukakan Ketua MPR Bambang Soesatyo, tugas

MPR RI adalah sebagai pengatur cuaca (suhu politik nasional) agar selalu sejuk, tidak panas menyengat tapi tidak juga dingin menggigil. MPR harus terus menggelorakan semangat kebangsaan, dan menjadikan tahun politik menjelang Pemilu 2024 ini dalam suasana yang sejuk dan suka cita, serta memunculkan optimisme bukan pesimisme yang menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan, bahkan petaka.

Caranya adalah dengan memasifkan vaksinasi ideologi menggunakan vaksin Sosialisasi Empat Pilar MPR untuk menjaga imunitas bangsa dari pengaruh ideologi asing dengan paham radikalisme dan intoleransi yang dapat memecah belah bangsa. Karena itulah, Rapat Pimpinan (Rapim) MPR yang digelar pada Senin, 28 November 2024, memutuskan pada tahun 2023 MPR akan meningkatkan Sosialisasi Empat Pilar MPR untuk memaksimalkan pemberian vaksinasi ideologi.

Vaksinasi ideologi itu terdiri dari empat substansi, yaitu Pancasila sebagai dasar dan falsafah serta landasan ideologi, etika moral serta alat pemersatu bangsa; UUD NRI Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional; NKRI sebagai konsensus bentuk negara yang harus dijunjung tinggi; serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara yang menjadi semangat pemersatu bangsa. Vaksinasi ideologi ini sangat penting menghadapi tahun politik 2023-2024. Jangan sampai tahun politik ini menjadi pintu masuk bagi terpecah-belahnya kehidupan kebangsaan.

Memang, penguatan nilai kebangsaan, salah satunya melalui vaksinasi ideologi menggunakan vaksin Empat Pilar MPR RI harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan, sehingga bisa meningkatkan ketangguhan dan imunitas bangsa sekaligus merekatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan cara inilah kita bisa mencegah maraknya radikalisme dan terorisme, hingga disintegrasi dan perpecahan bangsa. □

PENASEHAT

Pimpinan MPR-RI

PENANGGUNG JAWAB

Ma'ruf Cahyono

PEMIMPIN REDAKSI

Siti Fauziah

DEWAN REDAKSI

Yana Indrawan, Dyastasita,

Heri Herawan, Maifrizal

REDAKTUR PELAKSANA

Indro Gutomo

KOORDINATOR REPORTASE

Euis Karmila

REDAKTUR FOTO

Oni Arief Benyamin,

Slamet Eko Suprayitno

REPORTER

Yenita Revi, Try Syilvani,

Ikhwan Bimo F, Amelia Rubinta ,

Alfonso DK Tahapary

FOTOGRAFER

Ahmad Suryana, Frinda,

Restu, Suprianto, Faridz Rizky,

Wira, Subhan

PENANGGUNG JAWAB/

KOORDINATOR DISTRIBUSI

Cucu Riwayati

STAF DISTRIBUSI

Ati Oktafia, Anggun Permana,

Achmad Farobi,

Widya Permataningrum

SEKRETARIS REDAKSI

Djarot Widiarto

TIM AHLI

Syahriil Chili, Jonni Yasrul,

Ardi Winangun, Budi Sucahyo,

Derry Irawan, M. Budiono

ALAMAT REDAKSI

Biro Hubungan Masyarakat dan

Sistem Informasi,

Sekretariat Jenderal MPR-RI

Gedung Nusantara III, Lt. 5

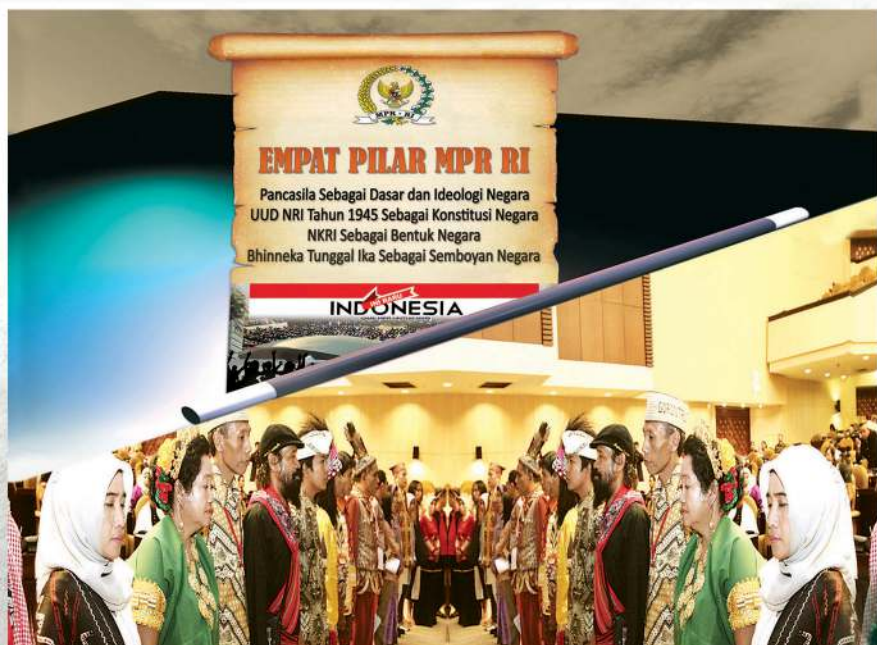
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6,

Senayan, Jakarta 10270.

Telp. (021) 57895237, 57895238,

57895251 Fax.: (021) 57895237

Email: pemberitaan@setjen.mpr.go.id



Dinamika Politik 2023 dan Urgensi Merawat Kondusifitas Negara Bangsa

DINAMIKA politik 2023 yang menjadi langkah pembuka dan persiapan Pemilu 2024 hendaknya menampilkan wajah demokrasi Indonesia yang semakin matang dan indah. Praktik demokrasi yang lebih mengedepankan kesejahteraan dan ketertiban umum akan memperkokoh kondusifitas negara-bangsa. Maka, semua elemen masyarakat pun hendaknya menolak dan mencegah manuver politik yang destruktif agar kinerja perekonomian dan stabilitas nasional tetap terjaga sepanjang tahun ini.

Menjadi konsekuensi logis bahwa politik nasional tahun ini semakin dinamis. Dinamika itu merupakan kelanjutan dari pembahasan rangkaian isu politik sepanjang 2022, yang diwarnai dengan dimunculkannya profil calon presiden baru yang ditawarkan oleh sejumlah elemen masyarakat. Bahkan, muncul pula diskusi tentang mencari penerus Jokowi, bukan sekadar pengganti Jokowi. Selain itu, beberapa kalangan juga mengemukakan kekhawatiran akan terjadinya praktik politik identitas.

Karena tahun ini menjadi periode persiapan menuju Pemilu 2024, beberapa isu sebagaimana disebutkan di atas akan tereskalasi, dan serta merta menjadikan politik nasional makin dinamis. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan 18 partai politik (Parpol) sebagai peserta Pemilu 2024. Maka, sepanjang tahun ini, bisa dipastikan bahwa ruang publik akan dibanjiri dengan pernyataan politik hingga debat atau adu argumentasi antar-politisi dari semua Parpol.

Tentu saja dinamika politik seperti itu tidak perlu dipersoalkan selama tidak merusak atau mengganggu ketertiban umum. Publik tentu berharap para politisi lebih mengutamakan pemaparan program pembangunan serta menawarkan jalan keluar untuk mengatasi ragam kesulitan yang dihadapi negara maupun masyarakat. Ruang untuk kritik terhadap pemerintah yang tetap dibuka sudah barang tentu

akan menyulut debat atau adu argumentasi.

Kritik yang proporsional dan debat yang beretika akan menghadirkan wajah demokrasi Indonesia yang semakin matang dan indah. Kematangan demokrasi yang tercermin dari dinamika politik yang tereskalasi itu justru akan memperkokoh kondusifitas negara-bangsa. Kondusifitas yang kokoh memungkinkan mesin perekonomian negara tetap bekerja. Dan, semua elemen masyarakat pun tak ragu untuk menjalankan ragam kegiatan produktif masing-masing.

Berpijak pada harapan ideal seperti itu, semua peserta Pemilu 2024 diajak untuk lebih mengedepankan politik yang berlandaskan nilai-nilai kemaslahatan, yakni tetap dan selalu menjadikan kepentingan rakyat sebagai yang utama atau prioritas. Konsekuensinya adalah menghadirkan perilaku politik yang selaras dengan kemajuan peradaban.

Maka, semua kontestan Pemilu hendaknya lebih mengedepankan kesantunan dalam berpolitik. Simpati dari konstituen atau calon pemilih harus diraih dengan cara maupun pendekatan yang bermartabat dan elegan. Fakta keberagaman masyarakat Indonesia hendaknya tidak dijadikan celah untuk melakukan pengkotak-kotakan.

Dikotomi politik cenderung membelah persatuan dan menyulut disharmoni. Maka, pada setiap insan politisi, hendaknya ditumbuhkan kemauan baik untuk membuang jauh-jauh dikotomi politik yang menyebabkan polarisasi masyarakat pada kutub-kutub yang berseberangan. Bahkan sebaliknya, sebagai proses pembelajaran yang tak berkesudahan, semua elemen masyarakat hendaknya diajak untuk menjadikan rangkaian persiapan Pemilu sebagai bagian dari proses pendewasaan berpolitik dan proses pematangan berdemokrasi.

Jadi, apa pun agenda negara-bangsa, termasuk agenda Pemilu

H. Bambang Soesatyo, SE., MBA.

Ketua MPR RI



memilih presiden dan anggota parlemen sekali pun, kebaikan bersama hendaknya selalu menjadi fokus dan orientasi semua pihak. Maka, manuver politik yang destruktif tidak boleh ditolerir. Kondusifitas negara-bangsa harus tetap terjaga, at all cost. Sebab, kondusifitas negara-bangsa adalah modal utama bagi semua elemen masyarakat melaksanakan kegiatan-kegiatan produktif untuk mewujudkan kesejahteraan.

Karena terkait langsung dengan persiapan Pemilu 2024, suhu politik di dalam negeri sepanjang tahun ini mungkin akan lebih panas. Di tengah meningkatnya suhu politik itu, kewaspadaan bersama harus diperkuat. Sebab, boleh jadi, situasi seperti itu akan dimanfaatkan oleh oknum dan spekulasi politik 'mengail di air keruh' untuk merusak soliditas bangsa.

Suka tidak suka, semua elemen masyarakat masih harus menghadapi dan menyikapi adanya friksi dalam kehidupan kebangsaan. Friksi itu jelas, ditandai oleh aksi radikalisme dan terorisme, maupun aksi separatisme dan disintegrasi bangsa. Sepanjang Desember 2022 misalnya, Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri telah menangkap belasan terduga teroris di Sukoharjo dan Sumatera. Juga di bulan yang sama, terjadi serangan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung.

Saat masyarakat Indonesia memasuki tahun 2023 untuk mempersiapkan Pemilu 2024, kondisi perekonomian dan kehidupan sosial-politik

sesungguhnya relatif stabil. Bahkan, sepanjang tahun 2022 yang baru saja berlalu, sektor ekonomi berhasil mencatatkan pertumbuhan yang impresif. Sebuah pencapaian yang mengundang decak kagum komunitas global.

Tentu menjadi tantangan bagi semua elemen masyarakat, termasuk para politisi, untuk merawat pencapaian yang baik itu. Memang, pencapaian itu belum dapat memuaskan semua pihak. Tetapi sebagian besar masyarakat merasakan dan menikmati nilai tambah dari pencapaian 2022 itu.

Fakta tentang pencapaian 2022 itu pun menjadi bukti bahwa masyarakat Indonesia mampu menghadapi dan mengelola masa-masa sulit sepanjang dua tahun lebih periode pandemi Covid-19. Memang, ada kerusakan di sana-sini sepanjang periode pandemi Covid-19. Tetapi, masa-masa sulit itu tidak meruntuhkan semangat masyarakat untuk melaksanakan ragam kegiatan produktif.

Oleh karena eskalasi dinamika politik Indonesia tahun 2023 disebabkan faktor internal, tidak semestinya dinamika itu menimbulkan kerusakan atau mereduksi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, karena mampu menampilkan wajah demokrasi yang indah, Indonesia tahun ini mestinya bisa lebih produktif dibanding tahun lalu. Artinya, masyarakat Indonesia ditantang untuk mampu menjadikan dinamika politik yang tereskalasi itu sebagai faktor yang ikut mendongkrak pertumbuhan ekonomi. □

Sosialisasi Empat Pilar MPR di Tahun Politik

Merekatkan Semangat Persatuan dan Kesatuan Bangsa



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Pimpinan MPR berharap, situasi menjelang Pemilu 2024 jangan sampai menjadi pintu masuk bagi terpecah-belahnya kehidupan kebangsaan. Karena itu, Pimpinan MPR memandang di tahun politik ini sangat penting memperkuat imunitas bangsa melalui pemberian vaksin ideologi menggunakan vaksin Empat Pilar MPR.

MENJELANG tutup tahun, Pimpinan MPR RI menggelar rapat pimpinan terakhir. Agenda rapat Pimpinan MPR adalah evaluasi program kerja pada tahun 2022 dan fokus program kerja pada tahun 2023. Pada Senin, 28 November 2022, Pimpinan MPR menggelar rapat pimpinan di ruang rapat pimpinan Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen, Jakarta. Rapat dipimpin langsung Ketua MPR, Bambang Soesatyo, dan dihadiri para Wakil Ketua MPR: Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Hidayat Nur Wahid, dan Fadel Muhammad. Sedangkan Wakil Ketua MPR Sjarifuddin Hasan dan Arsul Sani mengikuti rapat secara virtual.

Pada akhir tahun 2021, Pimpinan MPR juga menggelar rapat pimpinan yang membahas soal evaluasi program kerja tahun 2021 dan perencanaan tahun 2022. Kala itu, Rapim yang dipimpin Ketua MPR, Bambang Soesatyo, menghasilkan beberapa keputusan terkait program MPR selama tahun 2022. Fokus kerja MPR pada tahun 2022 adalah mengkaji lebih mendalam Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dan penyerapan aspirasi masyarakat, daerah, dan lembaga terkait pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945.

Program kerja terkait pengkajian PPHN telah dilaksanakan dengan baik. Pada tahun ini Badan Pengkajian MPR telah menuntaskan pekerjaan melakukan kajian mendalam soal PPHN, terutama materi atau substansi PPHN dan bentuk hukum. Hasil kajian itu pun sudah diserahkan kepada Pimpinan MPR dan Pimpinan Fraksi untuk

ditindaklanjuti. MPR akhirnya membentuk Panitia Ad Hoc untuk membahas lebih jauh tentang payung hukum PPHN.

Fokus program untuk tahun 2023, Rapim MPR memutuskan Pimpinan dan anggota MPR akan memaksimalkan kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR pada tahun politik ini. Usai Rapim, Bambang Soesatyo menyebutkan, pimpinan dan anggota MPR akan terus meningkatkan jumlah kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR dari empat kali menjadi enam kali setahun. Peningkatan jumlah kegiatan Sosialisasi Empat Pilar ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pemberian vaksin ideologi di tahun politik. Vaksinasi ideologi ini meliputi Pancasila sebagai dasar negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara.

Menurut Bamsuet, sapaan Bambang Soesatyo, vaksin ideologi sangat penting dalam menghadapi tahun politik 2023-2024. "Jangan sampai situasi menjelang Pemilu 2024 menjadi pintu masuk bagi terpecah belahnya kehidupan kebangsaan. Karena itu, sangat penting memperkuat imunitas bangsa melalui pemberian vaksin ideologi menggunakan vaksin Empat Pilar MPR," ujar Bamsuet usai memimpin Rapim.

Bamsuet berpendapat, dampak kerusakan yang ditimbulkan karena terpecah-belahnya kehidupan kebangsaan bisa jauh lebih dahsyat dibandingkan dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19.



“Urgensi lain untuk membangun karakter dan wawasan kebangsaan melalui vaksinasi ideologi menggunakan vaksin Empat Pilar MPR, yakni agar kita bisa menyiapkan generasi muda bangsa menjadi sumber daya manusia unggul, sumber daya manusia yang berhati Indonesia dan berjiwa Pancasila,” tuturnya.

Mengutip hasil survei Komunitas Pancasila Muda pada akhir Mei 2020, Bamsuet menyebutkan, sebanyak 61% dari survei itu merasa yakin dan setuju bahwa nilai-nilai Pancasila sangat penting dan relevan dengan kehidupan mereka. Sementara 19,5% menganggap Pancasila hanya sekadar istilah yang tidak benar-benar dipahami maknanya. Artinya, masih ada kalangan anak muda yang belum benar-benar memahami tentang Pancasila.

Hasil survei itu sejalan dengan survei SMRC pada Juni 2022. Dalam survei ini, SMRC menemukan bahwa pengetahuan dasar masyarakat tentang Pancasila masih belum optimal dengan skor 64,6 atau dalam kategori sedang. Survei SMRC juga mengungkapkan bahwa komitmen publik



Yandri Susanto

terhadap nilai-nilai Pancasila dan bagaimana nilai-nilai Pancasila itu direalisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara masih berada dalam level moderat atau sedang-sedang saja.

Berbagai survei itu, lanjut Bamsuet, menunjukkan bahwa penguatan nilai kebangsaan, salah satunya melalui vaksinasi ideologi menggunakan vaksin Empat Pilar

MPR RI harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan sehingga bisa meningkatkan ketangguhan dan imunitas bangsa sekaligus merekatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. “Kalau tidak (melakukan vaksinasi ideologi) maka ‘ongkos’ yang harus ditanggung sangat besar, antara lain dalam bentuk maraknya radikalisme dan terorisme, hingga disintegrasi dan perpecahan bangsa,” katanya.

Setali tiga uang, Wakil Ketua MPR Yandri Susanto, S.Pt., juga mengungkapkan MPR RI masih harus menjalankan tugas menyosialisasikan Empat Pilar MPR. Pasalnya, masih banyak warga negara Indonesia, termasuk kalangan mahasiswa, yang belum memahami soal-soal kebangsaan. Menurut Yandri, akan sangat berbahaya bila mahasiswa sebagai calon pemimpin tidak memahami Empat Pilar yang menjadi pegangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Saya kerap bertemu dengan mahasiswa dan pelajar. Tetapi dalam pertemuan itu, selalu saja ada pertanyaan saya tentang

kebangsaan yang mereka tidak bisa jawab. Apalagi kalau pertanyaan diajukan kepada masyarakat awam. Itu menandakan bahwa Sosialisasi Empat Pilar MPR masih haus dilanjutkan agar mereka memahami masalah bangsanya sebelum mereka menjadi pemimpin,” kata Yandri Susanto saat menerima Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, di Gedung Nusantara V Kompleks MPR/DPR/DPD, Selasa, 15 November 2022.

Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Sjarifuddin Hasan, SE., MM., MBA., juga sepakat tentang pentingnya Sosialisasi Empat Pilar MPR di tahun politik ini (2023-2024). Sosialisasi Empat Pilar MPR ini sangatlah penting untuk menumbuhkan kembali semangat kebangsaan dan mengedukasi setiap warga negara, terutama generasi muda tentang nilai-nilai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. “Saya dan Pimpinan MPR lainnya sepakat bahwa Sosialisasi Empat Pilar MPR menjadi bagian penting untuk kami dan rakyat Indonesia. Saya rasa penambahan jumlah kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR memang sangat dibutuhkan dan diperlukan,” katanya kepada *Majelis*.

Menurut Syarif Hasan, sapaan Sjarifuddin Hasan, Sosialisasi Empat Pilar MPR sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Sosialisasi Empat Pilar MPR sebagai vaksinasi ideologi sangat penting untuk membangun karakter kebangsaan dan ke-Indonesiaan setiap warga negara. “Dengan Sosialisasi Empat Pilar MPR setiap warga negara bisa memahami hak, kewajiban, dan komitmen kepada bangsa dan negara,” ujarnya.

Syarief Hasan menambahkan, Sosialisasi Empat Pilar MPR menjadi urgen ketika bangsa Indonesia akan menjalani pesta demokrasi Pemilu 2024. Pasalnya, dengan Sosialisasi Empat Pilar MPR bisa menjaga jati diri bangsa, persatuan, serta kesatuan bangsa, menghadapi tahun politik 2023-2024. “Persaingan dan kompetisi tidak hanya pada peserta Pemilu, tetapi juga pendukung partai politik masing-masing. Bila persatuan dan kesatuan serta persaudaraan tidak terjaga dengan baik niscaya bisa menjadi potensi terjadinya perpecahan di masyarakat, karena pilihan yang berbeda,” jelas



anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini.

Anggota MPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Prof. Hendrawan Supratikno, juga sependapat bahwa Sosialisasi Empat Pilar MPR selama ini sangat penting dan bermanfaat. Dia menyebutkan, beberapa manfaat dari Sosialisasi Empat Pilar MPR ini, yaitu; pertama, dengan pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR maka anggota MPR semakin dekat dengan konstituen atau masyarakat yang diwakilinya. “Sosialisasi Empat Pilar semakin menambah kedekatan anggota MPR dengan konstituen atau masyarakat yang diwakilinya,” katanya kepada *Majelis*.

Kedua, dengan Sosialisasi Empat Pilar MPR maka akan menyegarkan kembali memori masyarakat terhadap konsensus

atau pilar-pilar kebangsaan. Ketiga, Sosialisasi Empat Pilar MPR selama ini juga telah membangun ketahanan ideologis masyarakat terhadap masuknya atau maraknya paham-paham lain yang tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat Indonesia sebagai sebuah negara bangsa. Paham-paham lain itu tidak sesuai dan bertentangan dengan ideologi Pancasila.

Agak berbeda, anggota MPR dari Fraksi Partai Golkar Mujib Rohmat mengungkapkan, Sosialisasi Empat Pilar MPR di daerah pemilihan (Dapil) saat ini sebenarnya sudah sebanyak lima kali. Namun, dua tahun lalu sebelum pandemi Covid-19, jumlah kegiatan Sosialisasi Empat Pilar di MPR sudah sebanyak enam kali. “Jadi sebenarnya dengan jumlah kegiatan Sosialisasi Empat



Hendrawan Supratikno

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Pilar MPR di daerah ini sudah minimalis. Kalau enam kali setahun, berarti anggota MPR menyampaikan Sosialisasi Empat Pilar MPR hanya satu kali setiap dua bulan. Sebagai vaksinasi ideologi, jumlah itu sebenarnya masih sangat minim sekali,” katanya kepada *Majelis*.

Mujib mengakui, kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR sangat terkait erat dengan anggaran. Namun, cakupan wilayah di daerah pemilihan juga cukup luas. Mujib mencontohkan, daerah pemilihan Kabupaten Kendal ada sebanyak 286 kelurahan. “Dapil saya ada 60 kecamatan, kelurahannya sekitar 600 kelurahan/desa. Kita ingin Sosialisasi Empat Pilar MPR ini bisa menyentuh masyarakat di desa atau kelurahan. Kita berharap, Sosialisasi Empat Pilar MPR bisa dilakukan sebanyak delapan kali setahun. Ini bisa menjadi perhatian bagi MPR dan juga eksekutif,” ujarnya.

Menghadapi tahun politik ini, Mujib mengatakan, sudah sesuai dengan tema besar Sosialisasi Empat Pilar MPR, yaitu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR dijelaskan tentang UUD NRI Tahun 1945, di dalamnya disebutkan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi sehingga Pemilu merupakan prasyarat pergantian kepemimpinan nasional. “Pergantian kepemimpinan adalah sesuatu yang normal, sehingga tidak perlu menimbulkan permusuhan. Sosialisasi seperti ini perlu terus digulirkan ke tengah masyarakat di bawah sehingga masyarakat bisa memahami Pemilu sebagai sebuah instrument,” katanya.

Evaluasi

Sebenarnya Sosialisasi Empat Pilar MPR sudah berjalan lebih dari satu dekade. Pada periode 2004-2009, masih bernama Sosialisasi Putusan MPR RI. Sosialisasi ini terkait dengan pemasyarakatan hasil amandemen UUD 1945 dalam empat tahap perubahan pada rentang 1999-2002. Dengan sosialisasi, UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen itu diseminasi ke berbagai kalangan. Nama ini berubah pada masa kepemimpinan Ketua MPR Taufiq Kiemas periode 2009-2014. Pada saat itu almarhum Taufiq Kiemas menggagas Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan ke seluruh wilayah Indonesia.

Sepanjang pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR yang sudah berjalan selama lebih satu dekade ini, Syarif Hasan menilai, MPR telah memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Sekalipun demikian, pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR masih perlu ditingkatkan. “Secara garis besar, Sosialisasi Empat Pilar MPR yang sudah dijalankan MPR cukup baik. Namun, memang ke depan perlu peningkatan dari sisi kualitas, metode, materi, dan target sasaran,” tuturnya.

Bagi Syarif Hasan, target sasaran Sosialisasi Empat Pilar MPR saat ini perlu memfokuskan pada kalangan milenial, mulai dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga perguruan tinggi. “Kenapa saya mementingkan kalangan milenial? Sebab mereka adalah generasi penerus. Selain



Mujib Rohmat

dibekali pengetahuan dan teknologi, mereka juga harus dibekali dengan pemahaman nilai-nilai luhur bangsa untuk mempertebal karakter menghadapi derasnya arus globalisasi,” paparnya.

Untuk itu, lanjut Syarif, perlu perbaikan dalam penyampaian dan metode Sosialisasi Empat Pilar MPR, terutama untuk generasi milenial. Salah satu caranya adalah melalui permainan yang menarik kepada siswa-siswi di tingkat PAUD dan TK. Misalnya, permainan tradisional sehingga kalangan milenial ini lebih mencintai budaya daerah. Selanjutnya, mereka juga diperkenalkan dengan seni budaya daerah, seperti lagu, tarian, pakaian adat, serta bahasa daerah.

Hendrawan Supratikno juga sependapat.

Sosialisasi Empat Pilar MPR harus disampaikan dengan metode yang menarik, khususnya bagi generasi milenial. Metode Sosialisasi Empat Pilar MPR sebaiknya dikemas secara kreatif. Hendrawan meyakini banyak anggota MPR yang menciptakan kreativitas dalam menyampaikan Sosialisasi Empat Pilar MPR. Misalnya, penyampaian Sosialisasi Empat Pilar MPR secara pointers dan visual.

“Agar Sosialisasi Empat Pilar MPR lebih menarik, khususnya bagi generasi milenial, maka harus dikemas secara kreatif. Banyak anggota MPR yang sebenarnya punya kreativitas, apakah melalui simulasi, peragaan atau sarasehan kultural, forum kuis atau cerdas cermat, dan lain-lain. Memang ada baiknya materi yang berat dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR dapat disampaikan secara ringkas dalam bentuk pointers atau dicetak sebagai leaflet sehingga lebih komunikatif,” paparnya.

Sementara itu, dari pengalaman melaksanakan Sosialisasi Empat Pilar MPR, Mujib Rohmat mendapat kesan bahwa masyarakat cukup antusias. “Dalam sosialisasi Empat Pilar MPR di kampus-kampus, mereka adalah orang-orang pintar dan berkumpul. Mereka kalangan terdidik dan memiliki leadership, serta menjadi aktivis. Mereka bisa menjadi influencer Empat Pilar MPR,” kata anggota Komisi X DPR ini.

Agar lebih menarik, menurut Mujib, Sosialisasi bisa dilakukan melalui visualisasi. Misalnya, proses persidangan di BPUPKI dan PPKI yang memvisualkan orang-orang dan situasi persidangan, saat sidang berbicara tentang Pancasila. Kemudian, juga proses perubahan UUD digambarkan secara visual, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika juga bisa divisualisasikan. “Visualisasi ini agar tidak hanya narasi, tetapi narasi yang disampaikan secara visual,” katanya.

Agar lebih memasifkan Sosialisasi Empat Pilar MPR, Mujib Rohmat mengusulkan agar anggota DPRD di daerah bersama Kesbangpol setempat juga mendapatkan kesempatan untuk menyosialisasikan Empat Pilar MPR di daerah masing-masing. Sebab, anggota DPRD ini bisa langsung terjun ke bawah dan ke komunitas-komunitas terkecil di daerah, seperti lingkup RT/RW, komunitas petani, nelayan, masyarakat perbatasan. □

DER/BSC

Kajian Tentang Efektivitas Sosialisasi Empat Pilar MPR

Program Sosialisasi Empat Pilar MPR perlu terus didorong dan dilakukan dengan metode yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Di samping itu, tentu perlu evaluasi secara menyeluruh untuk mengukur sejauhmana efektivitas dari program ini.

PASAL 5 UU No. 17 Tahun 2014 jo UU No. 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, mengamanatkan MPR untuk memasyarakatkan Ketetapan MPR, memasyarakatkan Empat Pilar MPR meliputi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945. Dari amanat UU itu, MPR telah berikhtiar melakukan sosialisasi (pemasyarakatan) Empat Pilar MPR RI (yang sebelumnya disebut Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara) dalam rangka penanaman nilai-nilai luhur bangsa.

Sebelum berubah nama menjadi Empat Pilar MPR, sebenarnya sejak 2004, MPR telah menyosialisasikan Putusan MPR, yaitu UUD (konstitusi hasil amandemen UUD 1945 sejak 1999-2002). Pada masa kepemimpinan Ketua MPR H.M. Taufiq Kiemas periode 2009-2014, sosialisasi Putusan MPR itu diperluas menjadi Sosialisasi Empat Pilar MPR. MPR pun mulai merancang dan melaksanakan agenda pemantapan nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara melalui Sosialisasi Empat Pilar.

MPR kemudian menyusun materi sosialisasi yang menjadi *guidance* bagi anggota MPR kemudian diturunkan dalam metode yang diserahkan kepada Badan Sosialisasi yang bertugas melakukan sosialisasi sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Metode sosialisasi pun bervariasi, mulai dari seminar, focus group discussion (FGD), Training of Trainers (ToT), lomba karya tulis, lomba cerdas cermat, Debat Konstitusi, pertunjukkan seni dan budaya, hingga sosialisasi yang langsung dilaksanakan oleh Pimpinan MPR, Pimpinan



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Alat Kelengkapan MPR, serta Anggota MPR.

Sampai saat ini MPR RI terus-menerus secara substantif dan proaktif melakukan Sosialisasi Empat Pilar MPR dan Ketetapan MPR. Program ini telah menjangkau seluruh kelompok masyarakat, mulai dari pelajar, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga masyarakat umum. Dari berbagai kajian yang telah dilakukan sebelumnya dan sejumlah kajian dari sumber lainnya, bisa dikatakan bahwa Empat Pilar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara telah memainkan peranan penting sebagai fondasi bangunan bagi bangsa Indonesia seiring dengan perkembangan dan perjalanan negara Indonesia yang dimulai dari Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 hingga saat ini.

Karena itu, menjadi penting untuk melihat

sejauhmana upaya yang telah lama dikerjakan oleh MPR ini menyentuh level keberhasilan, dalam arti telah mampu menyentuh masyarakat secara lebih luas lagi. Bahkan, lebih dari itu, apakah upaya-upaya tersebut telah mampu memberikan perubahan ataukah justru tidak berpengaruh sama sekali.

Untuk itu, MPR pernah mengadakan survei nasional untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR. Badan Pengkajian MPR RI bekerjasama dengan Pusat Kajian Agama dan Budaya Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, mengkaji "Efektivitas Pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar dan Ketetapan MPR RI" pada tahun 2018.

Proses survei berlangsung selama kurang lebih empat bulan, meliputi rangkaian

penelitian kuantitatif dan kualitatif yang terdiri dari pengumpulan data, survei opini publik, pengambilan kuesioner, dokumentasi sumber-sumber referensi yang berkaitan dengan pelaksanaan sosialisasi Empat Pilar dan Ketetapan MPR, wawancara mendalam dengan narasumber pakar, pendalaman melalui focus group discussion, seminar serta analisis. Jumlah sampel atau responden dalam survei ini adalah 1.500 orang yang tersebar di 150 desa/kelurahan di 34 provinsi di Indonesia.

Berdasarkan hasil survei tersebut, pengetahuan masyarakat terhadap program Sosialisasi Empat Pilar MPR menunjukkan tren yang meningkat dari tahun ke tahun. Ini bisa dilihat dari tingkat awareness masyarakat secara umum tentang keberadaan Empat Pilar MPR. Center for the Studi of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, pada tahun 2011 mencatat tingkat pengetahuan atau pengenalan masyarakat terhadap Empat Pilar MPR saat itu masih sekitar 23%. Tingkat awareness masyarakat meningkat secara signifikan pada tahun 2018 menjadi 32,8%.

Bila angka 32,8% dikonversi dengan jumlah penduduk Indonesia sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2018 yang mencapai 265 juta, maka jumlah masyarakat Indonesia yang mengetahui (terpapar) program Sosialisasi Empat Pilar

MPR mencapai 87 juta jiwa.

Kemudian, ada selisih 9,8% dari semula 23% pada tahun 2011 naik sampai pada angka 32,8% pada tahun 2018. Bila dikonversi dengan jumlah penduduk Indonesia yang menyentuh 265 juta, maka ada peningkatan rata-rata jumlah masyarakat yang terpapar sosialisasi hampir menyentuh angka 26 juta orang dalam rentang waktu 7 tahun. Dengan kata lain, setiap tahun sedikitnya 3,7 juta orang terpapar Sosialisasi Empat Pilar MPR.

Data dari MPR pada tahun 2016 sebanyak 672.246 orang telah mengikuti Sosialisasi Empat Pilar MPR. Namun, jumlah orang yang mengetahui adanya program Sosialisasi Empat Pilar MPR ini jauh lebih besar meskipun tidak terlibat dalam kegiatan sosialisasi. Artinya, program ini mampu menyusup dan menjalar kepada mereka yang tidak atau belum pernah mengikuti sosialisasi. Bahkan jumlah mereka lebih besar dibanding mereka yang telah mengikuti sosialisasi.

Hasil survei ini juga menemukan bahwa model sosialisasi yang dianggap tepat dan efektif adalah kegiatan langsung oleh MPR RI, baik oleh pimpinan MPR (71%), anggota MPR (69,8%), dan pimpinan badan (66,7%). Dengan angka tersebut dapat dikatakan bahwa model ini memiliki tingkat ketepatan dan efektivitas yang tinggi, setelah sosialisasi di televisi (74,2%), dan seminar

(71,7%). Bahkan, menurut responden, tingkat kecocokan terhadap model kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Pimpinan MPR RI menjadi paling tinggi dibandingkan dengan model sosialisasi lainnya.

Selain survei di atas, program Sosialisasi Empat Pilar MPR juga menarik kalangan akademisi (dosen atau mahasiswa) sebagai obyek penelitian atau kajian. Mahasiswa mengangkat tema Sosialisasi Empat Pilar MPR sebagai topik penelitian skripsi meraih gelar sarjana atau pascasarjana. Sebut saja, misalnya, skripsi sarjana mahasiswa Universitas Mercu Buana Jakarta (2019), Belia Febrianti, dengan judul "Pengaruh Pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan oleh Anggota MPR RI Terhadap Tingkat Pemahaman Remaja (Survei Siswa/Siswi SMK Mulya Hati Insani Rangkasbitung, Banten)". Kemudian, tesis mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Metro, Lampung (2019), Apri Atika Sari, dengan judul "Implementasi Pilar Kebangsaan dalam Pembentukan Karakter Santri di Pondok Pesantren Darul 'Ulum Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur."

Program Sosialisasi Empat Pilar MPR juga menjadi tema atau topik tesis doctoral. Salah satunya, disertasi dengan judul "Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Ditinjau dari Perspektif Filsafat Bahasa dan Implikasi Teoritis Terhadap Pemahaman Pancasila," dari mahasiswa doctoral Fakultas Filsafat UGM Hastangka, S.Fil, M.Phil.

Wakil Ketua MPR periode 2014-2019 Mahyudin juga mengangkat Sosialisasi Empat Pilar sebagai tema untuk disertasi meraih gelar doktor Ilmu Pemerintahan dari Universitas Satyagama. Disertasi Mahyudin, yang saat ini adalah Wakil Ketua DPD, berjudul "Peran MPR RI Dalam Memasyarakatkan Empat Pilar MPR RI Sebagai Upaya Mewujudkan Sikap Persatuan dan Kesatuan Bangsa". Dalam disertasi itu, Mahyudin menjelaskan perihal efektivitas Sosialisasi Empat Pilar MPR, mulai dari latar belakang, implementasi kebijakan, kepemimpinan, sumber daya manusia, anggaran, efektivitas, serta pemasyarakatkan Empat Pilar MPR. □

BSC





FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Prof. Dr. Sjarifuddin Hasan, SE, MM, MBA Wakil Ketua MPR RI

Penambahan Kuantitas Sosialisasi Empat Pilar MPR Harus Diimbangi Peningkatan Kualitas

MENJELANG akhir tahun 2022, Pimpinan MPR menggelar Rapat Pimpinan pada 28 November 2022. Rapat Pimpinan MPR yang digelar di Ruang Rapat Pimpinan, Kompleks Parlemen Jakarta, dipimpin Ketua MPR Bambang Soesatyo dan diikuti para Wakil Ketua MPR, antara lain Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Hidayat Nur Wahid, dan Fadel Muhammad. Sedangkan Wakil Ketua MPR Sjarifuddin Hasan dan Arsul Sani mengikuti rapat secara virtual.

Usai Rapim, Bambang Soesatyo menyebutkan, pada tahun 2023 ini Pimpinan dan anggota MPR akan terus meningkatkan Sosialisasi Empat Pilar MPR. Pada masa pandemi Covid-19, kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR yang dilakukan anggota MPR berkurang dan hanya berlangsung empat kali di daerah pemilihan (Dapil). Pada tahun 2023 ini jumlah kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR diusulkan akan ditambah menjadi enam kali setahun, atau kembali seperti sebelum pandemi.

Rapim MPR memandang kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR (meliputi pemasyarakatan Pancasila sebagai dasar negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara) atau sering juga disebut dengan vaksinasi ideologi penting dimaksimalkan selama tahun politik ini. Pertimbangannya, dengan Sosialisasi Empat Pilar MPR pada tahun politik menjelang Pemilu pada 14 Februari 2024, agar jangan sampai menjadi pintu masuk bagi terpecah belahnya masyarakat. Karena itu, imunitas bangsa perlu diperkuat dengan memberi vaksin ideologi menggunakan vaksin Empat Pilar MPR.

Untuk mengetahui lebih jauh terkait kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR di tahun politik ini, Majelis mewawancarai Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Sjarifuddin Hasan, SE., MM., MBA., yang tak turut hadir dalam Rapat Pimpinan MPR. Berikut wawancara dengan Sjarief Hasan, sapaan Sjarifuddin Hasan, dalam satu kesempatan

di Bandung, Jawa Barat. Petikannya.

Pada tahun 2022 fokus program MPR adalah pengkajian dan serap aspirasi masyarakat terkait Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Badan Pengkajian MPR pun telah menyelesaikan tugas melakukan pengkajian tentang PPHN. Namun, PPHN belum bisa berlanjut di tahun politik, tahun 2023. Karena itu, di tahun politik ini, fokus program kerja MPR adalah meningkatkan atau memaksimalkan kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR. Rapat Pimpinan MPR mengusulkan penambahan jumlah kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR yang dilakukan anggota MPR di daerah pemilihan (Dapil) dari semula empat kali menjadi enam kali setahun. Bisa dijelaskan hasil Rapat Pimpinan MPR tersebut?

Sosialisasi Empat Pilar MPR adalah kegiatan yang diamanahkan UU untuk dilaksanakan MPR ke berbagai elemen masyarakat di seluruh Indonesia. Tugas

yang diemban MPR ini, menurut saya, sangatlah penting, untuk menumbuhkan kembali atau menambah wawasan dan edukasi kepada setiap warga Indonesia, terutama generasi muda kekinian tentang nilai-nilai bangsanya, seperti Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pimpinan MPR, dan saya berada di dalamnya memang sepakat bahwa sosialisasi ini menjadi bagian penting untuk kami dan rakyat Indonesia, bahkan pemerintah pun mendukung sehingga penambahan kuantitas kegiatan sosialisasi, saya rasa memang sangat dibutuhkan dan diperlukan.

Namun, harus diingat bahwa penambahan kuantitas kegiatan sosialisasi harus diimbangi dengan penambahan kualitas juga. Kualitas dalam hal ini adalah metode, materi, dan target sosialisasi.

Salah satu pertimbangan di balik usulan penambahan jumlah kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR adalah untuk mencegah masyarakat terpecah-belah menjelang Pemilu 2024. Vaksinasi ideologi melalui Sosialisasi Empat Pilar MPR diharapkan dapat merekatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Bagaimana pendapat Bapak?

Titik tekan dan tujuan dari Sosialisasi Empat Pilar MPR adalah untuk menjaga jati diri bangsa dalam tataran edukasi dan implementasi. Yang paling utama adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Apalagi sekarang kita akan menghadapi pesta demokrasi Pemilu 2024.

Persaingan dan kompetisi tidak hanya dialami para kontestan pemilu, juga dialami para pendukung masing-masing kontestan, sehingga jika rasa persatuan dan kesatuan juga persaudaraan tidak terjaga dengan baik dan konsisten, maka potensi perpecahan antar-rakyat akan terjadi karena berbeda pilihan.

Sosialisasi Empat Pilar MPR sudah berlangsung sejak lama, sebelumnya pada periode 2004-2009 bernama Sosialisasi Putusan MPR, kemudian berkembang pada saat Ketua MPR Taufiq Kiemas periode 2009-2014 menjadi Sosialisasi Empat Pilar. Hampir satu dekade lebih, apakah kegiatan

Sosialisasi Empat Pilar MPR ini sudah menjadi sebuah kebutuhan? Seberapa penting Sosialisasi Empat Pilar MPR ini?

Ya, tentu saja Sosialisasi Empat Pilar MPR sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Sosialisasi Empat Pilar sebagai vaksinasi ideologi atau bisa juga disebut vaksinasi moral sekali lagi sangat penting, untuk membangun dan meningkatkan character building setiap warga negara dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan sosialisasi ini diharapkan setiap warga negara jadi memahami setiap hak, kewajiban,



dan komitmennya sebagai warga negara.

Bagaimana evaluasi Bapak terhadap pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR atau vaksinasi ideologi selama ini? Apakah kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR sudah mencapai sasaran sesuai dengan tujuan pelaksanaan vaksinasi ideologi ini?

Upaya yang dilakukan MPR RI untuk melakukan Sosialisasi Empat Pilar MPR kepada masyarakat sudah yang terbaik, namun memang masih perlu peningkatan-peningkatan. Sosialisasi Empat Pilar MPR

adalah tanggung semua, bukan hanya MPR semata. Semua elemen bangsa harus ikut ambil bagian dalam hal ini, seperti BPPI, para guru dan dosen sebagai pendidik.

Menurut Bapak, apa yang perlu disempurnakan (perbaikan-perbaikan) dalam pelaksanaan vaksinasi ideologi ini (apakah materinya atau metode sosialisasinya yang perlu disesuaikan dengan kekinian)?

Secara garis besar, Sosialisasi Empat Pilar MPR yang sudah dijalankan MPR tahun lalu sudah sangat baik. Namun, memang ke depan perlu peningkatan-peningkatan dari sisi kualitas metode, materi dan target sasaran.

Menurut saya, untuk tahun ini target sasaran yang perlu ditingkatkan adalah dari kalangan generasi muda milenial, seperti para siswa TK, PAUD, SD, SMP, SMA hingga Perguruan Tinggi. Misalnya, Sosialisasi Empat Pilar MPR untuk siswa siswi TK dan PAUD, materi sosialisasi mesti disesuaikan dengan usia mereka, antara lain melalui berbagai permainan yang menarik. Kita bisa mengambil contoh permainan daerah-daerah di Indonesia, sehingga mereka bisa mengetahui dan mencintai budaya daerah. Selanjutnya, bisa diperkenalkan seni budaya daerah seperti lagu, tarian, pakaian adat, serta bahasa daerah.

Kenapa ini saya pentingkan, sebab generasi muda adalah generasi penerus kepemimpinan bangsa. Mereka selain dibekali dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, juga harus dibekali dengan pemahaman akan nilai-nilai luhur bangsanya, sehingga perpaduan antara tingginya intelektualitas dan tebalnya karakter bangsa akan muncul generasi masa depan kuat menghadapi tantangan global.

Terakhir, apa harapan Bapak dengan penambahan kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR di tahun politik ini?

Ya saya berharap dengan semakin banyaknya kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR kepada seluruh masyarakat Indonesia maka setiap anak bangsa Indonesia akan semakin mempertebal kecintaan kepada tanah air, mempertebal jati diri, dan karakter keindonesiaan, sehingga bangsa ini akan mampu menghadapi berbagai masalah dan tantangan internal dan global yang semakin kompleks. □

Kunjungan Presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc

Bamsoet **Dukung** Kesepahaman Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia - Vietnam



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Kita patut dukung dan apresiasi kerja keras pemerintah Indonesia dan Vietnam yang telah menyelesaikan perundingan garis batas zona ekonomi eksklusif (ZEE) kedua negara.

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menegaskan MPR RI mendukung berbagai kesepakatan yang dihasilkan dalam pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc, baik dalam hal penguatan kerjasama antarkedua negara secara bilateral, dalam konteks ASEAN, maupun di berbagai forum internasional. Sebagaimana disampaikan Pimpinan MPR RI Arsul Sani dan Yandri Susanto usai menerima Presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Kamis sore (22/12/22).

“Salah satu kesepakatan besar yang patut didukung dan diapresiasi, yakni kerja keras pemerintah Indonesia dan Vietnam yang telah menyelesaikan perundingan garis batas zona ekonomi eksklusif (ZEE) kedua negara. Sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo usai bertemu Presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc di Istana Kepresidenan, Bogor, Kamis siang (22/12/22), sengketa garis batas ZEE antara Indonesia dan Vietnam sudah dibahas sejak 21 Mei 2010. Setelah melakukan perundingan intensif selama 12 tahun, Indonesia dan Vietnam akhirnya dapat menyelesaikan perundingan mengenai garis batas zona ekonomi eksklusif (ZEE) kedua negara berdasarkan UNCLOS 1982,” ujar Bamsoet dari Melbourne, Jumat (23/12/22).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, dari pembicaraan Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani dan Yandri Susanto dengan Presiden Viet-

nam Nguyen Xuan Phuc, penyelesaian perundingan garis batas zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia dengan Vietnam berdasarkan UNCLOS 1982 merupakan pencapaian yang luar biasa. Kedua negara akhirnya bisa saling menghormati kedaulatan satu sama lain, sehingga ke depannya diharapkan tidak ada lagi kapal penangkap ikan berbendera Vietnam yang beroperasi di kawasan ZEE Indonesia, begitupun sebaliknya.

“Selain mendukung kesepakatan ZEE tersebut, MPR RI juga mendukung komitmen kerjasama perekonomian Indonesia - Vietnam, khususnya dalam hal pemulihan ekonomi pasca pandemi. Pemerintah Indonesia dan Vietnam telah memiliki target baru perdagangan bilateral sebesar USD 15 miliar pada 2028. Mengingat target perdagangan USD 10 miliar pada 2023 sudah tercapai dan bahkan dilampaui pada tahun 2021 lalu dengan nilai perdagangan mencapai USD11,06 miliar,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, tidak hanya meningkatkan hubungan dari sisi pemerintahan, MPR RI juga mengajak Vietnam untuk mengintensifkan kunjungan antarpemerintahan dan saling dukung dalam berbagai forum parlemen regional dan internasional. Sekaligus mendorong agar kedua negara tetap melanjutkan kerjasama sister cities antara Hanoi dan Ho Chi Minh dengan Bali dan Semarang.

“Selain di bidang sosial, ekonomi, dan politik, kerjasama di sektor



olahraga juga bisa dibangun antara Indonesia dan Vietnam. Salah satunya dari sisi olahraga sepakbola. Tidak dapat dipungkiri, kualitas sepakbola Vietnam berada jauh diatas Indonesia. Terbukti dari peringkat FIFA, Vietnam menduduki peringkat ke-96, sementara Indonesia berada di peringkat ke-151. Tidak ada salahnya jika kita mengambil banyak pelajaran dari Vietnam, tentang bagaimana memajukan sepakbola sebagai sebuah industri, olahraga, dan juga gaya hidup,” pungkas Bamsoet. □

Yandri Susanto: Kerjasama Indonesia-Vietnam Perlu Ditingkatkan Banyak Hal Kita perlu belajar kepada Vietnam, kenapa negara yang wilayahnya tak seluas Indonesia itu namun produksi beras mereka tinggi.

Selepas bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Bogor, Jawa Barat, selanjutnya Presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc melakukan lawatan ke pimpinan DPR di Gedung Nusantara, Kompleks MPR/DPR Senayan, Jakarta. Dari Gedung Nusantara Nguyen selanjutnya melakukan kunjungan



ke pimpinan MPR.

Kedatangan Nguyen di Lt. 9, Gedung Nusantara III, Kompleks MPR/DPR, 22 Desember 2022, langsung disambut oleh Wakil Ketua MPR H. Yandri Susanto, S.Pt., dan Arsul Sani, SH., MH. “Selamat datang di Jakarta, Indonesia,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu kepada tamunya ini. Kehadiran orang nomer satu di Vietnam itu mempunyai peran penting untuk menata dan melanjutkan hubungan kedua negara yang sudah terjalin sejak lama.

Pria asal Bengkulu itu mengakui, Vietnam

saat ini mengalami perkembangan sangat pesat. Pertumbuhan ekonomi dan pesatnya pembangunan di sana telah mengangkat derajat bangsa Vietnam sejajar dengan Malaysia, Thailand, Singapura, dan Indonesia. “Peran Vietnam di Asia Tenggara saat ini dibutuhkan dan semakin terasa,” ujarnya. Untuk itu, Yandri mengajak Vietnam bersama Indonesia untuk berkontribusi positif dan aktif dalam organisasi ASEAN. “Indonesia dan Vietnam perlu memaksimalkan ASEAN untuk perdamaian di kawasan dan dunia,” tuturnya.

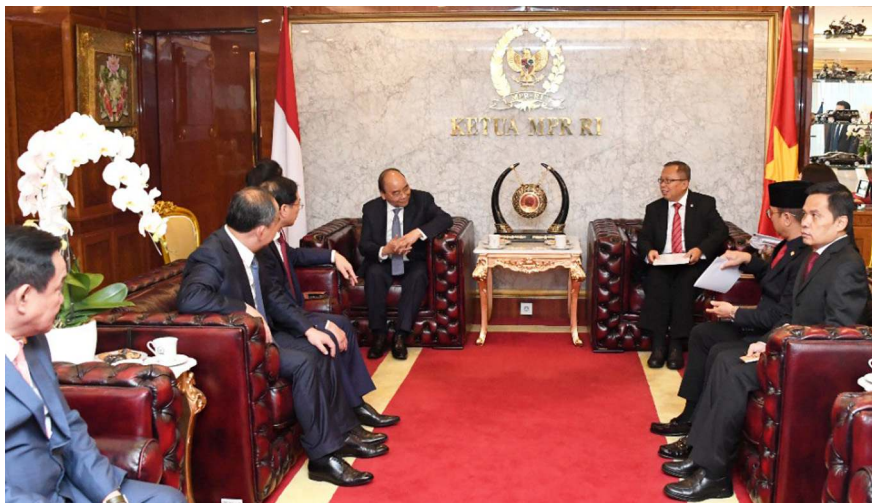


FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Sebagai bangsa yang terus tumbuh dalam berbagai bidang, banyak hal yang bisa dikerjakasikan antara Indonesia dan Vietnam. Kedua negara sama-sama negara agraris. Mayoritas penduduk Vietnam sama dengan penduduk Indonesia, yakni sebagai petani. Geliat sektor pertanian di negara yang berbatasan dengan Cina itu patut dipuji, sebab mereka kerap mengekspor beras ke berbagai negara. “Nah kita perlu belajar kepada mereka mengapa negara yang wilayah tak seluas Indonesia, namun produksi beras mereka tinggi,” kata Yandri. Jadi, “Kita pelajari sisi-sisi yang unggul dari Vietnam,” tambahnya.

Yandri menyebut, tak hanya kerjasama di sektor pertanian yang perlu dijalin. Dalam dunia sepakbola, bangsa ini juga harus mengakui kehebatan tim nasional Vietnam. Ranking sepakbola negara itu paling bagus

di antara bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Di FIFA, Vietnam berada di ranking 92. “Apa kelebihan pembinaan sepakbola di sana, itu yang perlu kita cari dan pelajari,” paparnya. “Untuk itu perlu dilakukan kerjasama dalam urusan sepakbola,” tambahnya. Untuk itu, Indonesia tidak perlu malu belajar sepakbola kepada Vietnam. Dalam urusan sepakbola, dibanding Vietnam sebenarnya Indonesia lebih dulu berkembang, namun entah kenapa tiba-tiba Vietnam mendahului Indonesia.

Kepada Vietnam, Yandri berharap, hubungan yang dijalin tidak hanya antarpemerintah, namun kerjasama antarparlemen juga perlu dilakukan. “Mari kita belajar demokrasi sama-sama,” ujarnya. Banyak tantangan demokrasi di Asia Tenggara. Untuk itu kedua negara perlu kerap berdiskusi dan berdialog tentang demokrasi. “Demokrasi yang membawa kesejahteraan pada rakyat

dan kemajuan pada bangsa,” harapnya. Agar keinginan itu tercapai, didorong agar parlemen kedua negara saling berkunjung dan melakukann kerjasama yang konkret. □

Arsul Sani: Hubungan Antarparlemen Indonesia-Vietnam Perlu Ditingkatkan Kerjasama Indonesia-Vietnam yang perlu ditingkatkan, selain sektor pertanian, juga dalam hal prestasi sepakbola

Kedatangan Presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc ke MPR disambut dengan hangat oleh Wakil Ketua MPR Arsul Sani SH., MH., dan H. Yandri Susanto, SPt.. Kedatangan Nguyen di Lt. 9, Gedung Nusantara III, Kompleks MPR/DPR Senayan, Jakarta, 22 Desember 2022, itu merupakan salah satu rangkaian kunjungan kenegaraan di Indonesia. Sebelum bertemu dengan pimpinan MPR, Presiden Vietnam ini melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo dan pimpinan DPR.

Arsul Sani mengatakan, banyak hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Sebagai wakil parlemen, pimpinan MPR menyoroti sejumlah hal kerja sama kedua negara agar perlu ditingkatkan. Dia menyebutkan, kerjasama yang perlu ditingkatkan seperti sektor pertanian. Dalam hal olahraga, Indonesia diharap perlu menjalin kerja sama dalam peningkatan prestasi sepakbola. Diakui saat ini sepakbola Vietnam lebih maju dibanding Indonesia, meski Indonesia lebih dahulu dalam perkembangan sepakbola.

Sebagai anggota parlemen, pimpinan MPR mendukung apa-apa yang sudah disepakati dan dikerjakasikan antara Joko Widodo dan Nguyen. “Sebagai partai koalisi pendukung pemerintahan, pasti kita akan mendukung kesepakatan kedua negara”, ujarnya. Politisi PPP itu berharap, hubungan yang dijalin tidak hanya antarpemerintah namun juga antarparlemen. Hal demikian disebut penting, sebab sebagai wakil rakyat nanti bisa bercerita banyak tentang apa dan bagaimana negara Vietnam. Begitu juga sebaliknya anggota Parlemen Vietnam juga bisa bercerita banyak tentang apa dan bagaimana Indonesia kepada rakyat Vietnam.

Ketika ditanya soal batas laut Indonesia - Vietnam yang belum tuntas, Arsul Sani mengatakan, “masalah itu tengah dibahas oleh pemerintah”. □



Belanda Kembali Minta Maaf

HNW Dorong Pemerintah Indonesia Tuntut Pengakuan de Jure

Pemerintah Indonesia perlu secara serius menuntut agar Kerajaan Belanda tidak hanya mengakui secara de facto Kemerdekaan RI, tetapi juga mengakui secara de jure bahwa kemerdekaan Indonesia terjadi pada 17 Agustus 1945, bukan 27 Desember 1949.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, MA., mengapresiasi sikap Perdana Menteri Belanda Mark Rutte yang menyampaikan pengakuan dan permintaan maaf negaranya atas telah terjadinya perbudakan di wilayah-wilayah atau negara koloni Belanda di masa lalu. Sebagai tindak lanjut dari pengakuan dan permintaan maaf itu, HNW – sapaan Hidayat Nur Wahid— mendorong Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk membicarakannya spesifik perbudakan dan pelanggaran HAM yang dulu dilakukan Belanda terhadap warga Indonesia.

Selain itu, menurut HNW, Pemerintah secara serius juga menuntut agar Kerajaan Belanda tidak hanya meminta maaf dan mengakui de facto Kemerdekaan RI, tetapi juga segera mengakui secara resmi dan de jure bahwa kemerdekaan Bangsa dan Negara Indonesia dari penjajahan Belanda terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945, bukan

tanggal 27 Desember 1949.

“Permohonan maaf seperti itu tentu diapresiasi, walaupun sudah pernah disampaikan, dan walaupun kini disampaikan secara umum untuk negara-negara koloni Belanda di masa lalu. Namun, Pemerintah Indonesia melalui Kemlu perlu menindaklanjuti bagaimana sikap Belanda terkait spesifik Indonesia di masa lalu, baik terkait masalah perbudakan, pelanggaran HAM, lalu tindak lanjut permohonan maaf tersebut, serta pengakuan dejure atas kemerdekaan Bangsa dan Negara Indonesia pada 17 Agustus 1945,” ujar HNW di Jakarta, Rabu (21/12/2022).

HNW mengatakan, permohonan maaf ini memang ditujukan secara umum terhadap negara-negara koloni Belanda di masa lalu. Oleh karenanya, perlu dibahas secara spesifik mengenai Indonesia. “Bagaimana sikap Belanda terkait Indonesia di masa penjajahan Belanda? Ada banyak yang perlu diklarifikasi dan kepentingan Indonesia perlu diperjuangkan,” tukasnya.

Lebih lanjut, HNW mengatakan bahwa sikap permohonan Belanda ini bukan kali yang pertama. Raja Belanda pada 10 Maret 2020 dan PM Rutte pada 17 Februari 2022 juga telah meminta maaf atas kekerasan ekstrem yang dilakukan militer Belanda pada periode 1945 sampai dengan 1949. “Lalu, bagaimana dengan kekerasan dan pelanggaran HAM pada periode sebelum 1945, yakni periode penjajahan, di mana banyak rakyat Indonesia (Nusantara) yang tewas akibat tindak kolonialisme kerajaan Belanda, seperti melalui tanam paksa, kerja rodi, dll?” tukasnya.

Anggota DPR RI Dapil Jakarta II meliputi luar negeri ini menjelaskan, beberapa hal tersebut perlu dibicarakan serius oleh Kemlu RI dengan pemerintah Belanda agar persoalan ini dilihat secara tulus dan komprehensif, bukan secara parsial terhadap periode-periode tertentu, seperti hanya periode 1945-1949.

“Sekalipun kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 telah diakui oleh PBB dan masyarakat dunia, tetapi permintaan maaf Pemerintah Belanda terakhir ini juga momentum yang perlu dipergunakan oleh Pemerintah Indonesia untuk mendapatkan pengakuan de jure, bahwa kemerdekaan Indonesia adalah pada 17 Agustus 1945,” ujarnya.

HNW menambahkan, sebelumnya memang ada pengakuan secara de facto kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 oleh Menteri Luar Negeri Belanda, Bernard Rudolf Bot, pada 2005. Namun, pengakuan tersebut hanya bersifat de facto, bukan de jure berdasarkan ketentuan hukum yang sah. “Momentum ini perlu digunakan Kemlu untuk menuntut pengakuan secara de jure tersebut. Agar tidak hanya berkali-kali Belanda meminta maaf, tetapi tidak meminta maaf kepada Indonesia karena baru mengakui kemerdekaan Indonesia pada 17

Agustus 1945 secara de facto saja, belum mengakuinya secara de jure,” ujarnya.

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menuturkan bahwa Kemlu perlu menyisir ulang terkait peristiwa pelanggaran HAM atau kejahatan kemanusiaan lainnya oleh Belanda pada periode kolonialisasi di Indonesia, dan mendiskusikan penyelesaiannya atau reparasi dengan pihak Belanda. Ia mencontohkan kasus pembantaian Rawagede oleh militer Belanda, di mana

Pengadilan Belanda memutus bermasalah militer Belanda untuk membayar ganti rugi kepada korban 20 ribu euro (Rp 240 juta) untuk janda korban pembantaian Rawagede.

Kasus Rawagede ini, lanjut HNW, tentunya hanya salah satu kasus kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi oleh Belanda terhadap Indonesia. Ada banyak kasus sejenis lainnya, seperti pembantaian oleh Westerling di Sulawesi Selatan dengan jumlah korban yang sangat besar. “Lalu, bagaimana permintaan maafnya atau

bagaimana hak atas pemulihan dan reparasi langsung (direct reparations) bagi korban atau keluarganya yang masih hidup terhadap pelanggaran HAM tersebut. Bentuknya tentu tidak melulu berkaitan dengan uang, tetapi harus ada tindak lanjut lebih konkret agar permohonan maafnya betul-betul tulus dan serius yang akan bisa membuka lembar sejarah positif yang baru dalam hubungan yang bermartabat antara Belanda dan kawasan-kawasan bekas jajahannya, termasuk Indonesia,” pungkasnya. □

Fadel Muhammad Kunjungi BPS Gorontalo

Perencanaan Salah Berdampak Buruk Buat Perekonomian Daerah

Pemimpin daerah ketika terpilih menjadi pemimpin, rencanakan dan laksanakan semua pembangunan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR RI, Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad, mengungkapkan bahwa kesejahteraan rakyat suatu daerah tergantung dari peningkatan laju pertumbuhan per-ekonomiannya. Peningkatan pertumbuhan ekonomi bisa dicapai jika perencanaan pembangunannya berkualitas dan terarah. Sebaliknya, jika perencanaan salah maka akan berdampak buruk buat perekonomian daerah.

Mantan Gubernur Gorontalo dua periode itu menyampaikan hal itu dalam kunjungan kerjanya ke Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo, Rabu (21/12/2022). Hadir dalam pertemuan itu, Ketua BPS Provinsi Gorontalo, Mukhamad Mukhanif, beserta jajarannya; perwakilan Dinas Pertanian, Kominfo, dan Bapeda Provinsi Gorontalo.

“Pemimpin daerah di seluruh Indonesia harus memerhatikan hal itu dengan baik. Ketika terpilih menjadi pemimpin, rencanakan

dan laksanakan semua pembangunan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat,” jelas Pimpinan MPR RI dari unsur DPD RI itu.

Menurut Fadel Muhammad, memang tidak mudah bagi seorang pemimpin daerah berupaya keras menghilangkan kemiskinan dan menyejahterakan rakyatnya. Seperti Gorontalo, sebuah daerah yang potensi ekonominya sangat besar, tapi memang kemiskinan masih saja ada dengan berbagai sebab. Salah satunya pandemi Covid -19 yang meluluh lantakkan perekonomian Indonesia.

Fadel Muhammad menyatakan, dia bertemu dengan banyak orang, dan mereka mengeluh situasi ekonomi Gorontalo. Mereka menyatakan, daya beli masyarakat menurun. “Setelah lihat datanya di BPS, ternyata memang benar apa yang dikeluhkan rakyat kepada saya. Namun, saya yakin dengan niat tulus mengabdikan kepada rakyatnya, semua kesulitan akan dimudahkan,” ujar Fadel Muhammad.

Fadel Muhammad kemudian berbagi kisah. Ketika ia menjabat Gubernur Gorontalo, yang paling diperhatikan adalah data-data statistik soal rakyat, terutama data rakyat miskin dan bagaimana cara untuk menyejahterakan mereka. Fadel lalu membuat semacam



perencanaan program untuk rakyat, yakni peningkatan sumber daya manusia (SDM), Pertanian, lalu Perikanan, dan Kelautan.

“Ketika program sudah direncanakan dengan baik maka langkah selanjutnya adalah seluruh anggaran difokuskan ke sana. Alhamdulillah, walaupun sangat sulit, kami berhasil menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan. Dan, bersyukur atas usaha itu, saya dianugerah penghargaan tingkat nasional dan global, berupa penghargaan dari UNDP karena berhasil menurunkan kemiskinan dua sampai tiga digit,” katanya.

Untuk itu, Fadel berharap, Gorontalo ke depan bisa meminimalisir kemiskinan secara drastis. “Kita berharap kepada Gubernur Gorontalo hasil pemilu nanti bisa mewujudkannya,” pungkasnya. □

Sambangi KPU Provinsi Gorontalo

Fadel Muhammad Harap Tidak Ada Penundaan Pemilu 2024

Wakil Ketua MPR RI, Fadel Muhammad, berharap, tidak ada penundaan pelaksanaan Pemilu 2024. “Penundaan akan mencederai demokrasi yang kita bangun bersama-sama,” tegasnya.

MASIH dalam rangkaian kunjungannya di Gorontalo, Wakil Ketua MPR RI, Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad, Selasa (20/12/2022), menyempatkan diri bertemu dengan Ketua KPU Provinsi Gorontalo, Fadliyanto Koem, di Gedung KPU Prov. Gorontalo.

Selain Ketua KPU Provinsi Gorontalo, dalam acara perbincangan itu, hadir pula para anggota KPU Provinsi Gorontalo, antara lain: Ramli Ondang Djau, Hendrik Imran, Selvie Katili, dan Sekretaris KPU Prov. Gorontalo Mukti Abdullatif Mile.

Dalam perbincangan itu, Fadel Muhammad mengungkapkan, Pemilu 2024 yang akan digelar Februari 2024 adalah pesta demokrasi yang akan menentukan masa depan bangsa dan nasib rakyat. Untuk itu, Fadel Muhammad berharap, tidak ada penundaan pelaksanaan Pemilu 2024.

“Penundaan akan mencederai demokrasi yang kita bangun bersama-sama,” tegas Fadel.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Fadel mengakui memang ada pihak yang menginginkan penundaan pemilu karena berbagai alasan. Tapi, “Saya selaku Wakil Ketua MPR menghendaki pemilu tetap pada

jadwal yang telah ditentukan. Jika ada pimpinan lembaga negara yang menyatakan keinginan terkait pemilu diundur itu merupakan pendapat pribadi, bukan

pendapat lembaga. Ya, silahkan saja, itu bagian daripada demokrasi,” kata Fadel Muhammad.

Lebih jauh Fadel menjelaskan bahwa tetap dilaksanakannya Pemilu 2024 sesuai jadwal merupakan implementasi konstitusi yang sudah disepakati bersama seluruh elemen masyarakat. “Harapan saya semoga Pemilu 2024 berjalan lancar, khidmat, dan tidak ada kendala apapun sehingga hasilnya akan baik untuk bangsa dan negara Indonesia,” tegasnya.

Kepada Ketua KPU Provinsi Gorontalo, Fadel Muhammad menyampaikan bahwa dia akan tetap maju menjadi anggota DPD RI dari Provinsi Gorontalo di Pemilu 2024. “Saya sampaikan hal ini karena saya masih ingin berbakti kepada rakyat Gorontalo. Walaupun tidak muda lagi, tapi semangat saya masih



tetap ada. Mudah-mudahan mendapat dukungan rakyat sehingga kita bisa

membangun daerah dan bangsa bersama-sama,” tandasnya. □

Pencabutan PPKM

Bamsoet Dukung Presiden Jokowi Hentikan Pemberlakuan PPKM

Pemerintah terbukti mampu memberikan perlindungan terhadap seluruh warga negara Indonesia, sebagai bagian dari pemenuhan hak-hak konstitusional seluruh warga negara Indonesia.

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mendukung langkah Presiden Joko Widodo yang menghentikan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mulai tanggal 30 Desember 2022. Pencabutan PPKM yang tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 50 dan 51 Tahun 2022 dilakukan setelah pemerintah melakukan kajian selama 10 bulan.

“Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah atas kerja keras, langkah, dan kebijakan yang cepat dan tepat dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 yang berlangsung selama dua tahun lebih. Pemerintah terbukti mampu memberikan perlindungan terhadap seluruh warga negara Indonesia, sebagai bagian dari pemenuhan hak-hak konstitusional seluruh warga negara Indonesia,” ujar Bamsoet di Jakarta, Ahad (1/1/23).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan, ini menjelaskan, pemerintah mencabut PPKM karena pandemi Covid-19 di Indonesia makin terkendali. Data kasus

Covid-19 tanggal 27 Desember 2022 menunjukkan kasus harian hanya 1,7 per 1 juta penduduk perhariannya. Sementara, angka positivity rate 3,35%, tingkat perawatan

rumah sakit atau BOR berada di 4,79%, dan angka kematian di angka 2,39%.

Alasan pencabutan PPKM juga didasari dengan tingginya cakupan imunitas penduduk. Presiden Jokowi menyebut kekebalan imunitas penduduk RI di angka 98,5%. Dari angka tersebut, kekebalan imunitas penduduk secara komunitas sudah sangat tinggi. Termasuk jumlah vaksinasi yang telah mencapai angka 44.525.478 dosis.

“Secara khusus kita perlu menyampaikan apresiasi kepada Satuan Tugas Penanganan Covid-19, para tenaga kesehatan dan relawan, jajaran Tentara

Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta pihak lainnya yang telah berkontribusi dalam upaya pengendalian dan penanganan Covid-19 di Tanah Air,” kata Bamsuet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan KADIN Indonesia ini menambahkan, apresiasi juga patut diberikan kepada seluruh entitas masyarakat Indonesia yang telah bergotong-royong membantu penanganan pandemi Covid-19 melalui gerakan solidaritas, kepedulian sosial, baik secara individu maupun kelompok. Sudah sepatutnya seluruh elemen

bangsa bangga memiliki ke-Indonesiaan, memiliki pondasi nilai-nilai moral dan jati diri bangsa yang kokoh, sehingga berbagai permasalahan bangsa dapat dihadapi dengan penuh optimisme dan kekuatan kebersamaan.

“Saat perusahaan-perusahaan, kampus-kampus, organisasi massa dan profesi, komunitas-komunitas masyarakat hingga relawan-relawan individu bersinergi dan berkolaborasi mendukung upaya pemerintah dalam memerangi Covid-19, kita semua merasakan betapa kuatnya jati diri bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lainnya,” pungkas Bamsuet. □

Pencabutan PPKM

Lestari Moerdijat: Ujian Kemandirian Masyarakat Menuju Endemi Covid-19

Saat ini merupakan pembuktian apakah masyarakat mampu mengamalkan nilai-nilai persatuan dan gotong-royong, yang merupakan bagian dari nilai-nilai kebangsaan, dalam menghadapi tantangan bangsa dalam mengendalikan penyebaran Covid-19.

PENCABUTAN Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) merupakan ujian kemandirian masyarakat dalam proses transisi menuju endemi Covid-19. Kesadaran yang tinggi dari masyarakat sangat dibutuhkan untuk memastikan proses tersebut berhasil.

“Fase ini merupakan tahapan yang sangat menentukan dalam proses menuju endemi Covid-19. Sangat diperlukan kesadaran dan kedewasaan masyarakat dalam menyikapi masa transisi ini,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (31/12).

Menurut Lestari, meski kebijakan PPKM dicabut, pemerintah berharap, masyarakat melakukan pencegahan dan deteksi dini secara mandiri bila menghadapi dugaan paparan Covid-19.

Selain itu, ujar Rerie—sapaan akrab Lestari— kedewasaan masyarakat dalam menyikapi pencabutan kebijakan PPKM sangat dibutuhkan dengan tetap mematuhi sejumlah saran pencegahan yang dianjurkan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

pemerintah.

Rerie yang juga anggota Komisi X DPR dari Dapil II Jawa Tengah itu mengakui, saat ini merupakan pembuktian apakah masyarakat mampu mengamalkan nilai-nilai persatuan dan gotong-royong, yang merupakan bagian dari nilai-nilai kebangsaan, dalam menghadapi

tantangan bangsa dalam mengendalikan penyebaran Covid-19.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berpendapat, penggunaan masker di tempat umum bila kondisi tidak fit yang disarankan pemerintah, harus menjadi norma keseharian masyarakat.

Demikian pula kelengkapan vaksinasi Covid-19 hingga dosis ke-3 atau booster, tambah dia, harus menjadi kesadaran masyarakat dalam upaya meningkatkan imunitas diri dari paparan Covid-19.

Karena itu, Rerie mengajak segenap anak bangsa untuk bersatu mengedepankan semangat pencegahan penyebaran Covid-19 dalam keseharian, agar bangsa Indonesia mampu melewati masa transisi menuju

endemi Covid-19 dan melaksanakan proses pembangunan dengan baik untuk mewujudkan bangsa yang bermartabat serta negara yang adil, makmur berdasarkan Pancasila. □

Pencabutan PPKM

Yandri Susanto: Semangat Baru bagi Masyarakat untuk Bekerja dan Produktif

Pencabutan PPKM merupakan langkah yang tepat bagi bangsa dan negara, apalagi memasuki tahun 2023. “Di tahun baru kita memulai kehidupan baru dengan situasi baru tanpa Covid,” ujar Wakil Ketua MPR RI, H. Yandri Susanto.

WAKIL Ketua MPR, H. Yandri Susanto, S.Pt., mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang telah mencabut PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)). “Hari ini kita bersyukur karena pemerintah telah secara resmi mencabut PPKM,” ujar Yandri Susanto di sela kunjungan kerjanya di Kota Serang, Banten, Sabtu (31/12/2022). Dengan dicabutnya PPKM, lanjut Yandri Susanto, hidup dan kehidupan masyarakat kembali normal.

“Dengan dicabutnya aturan itu maka hidup dan kehidupan masyarakat tidak akan lagi dibebani dengan berbagai aturan yang sifatnya membatasi. Masyarakat mempunyai harapan baru,” ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Dengan demikian masyarakat mempunyai semangat bekerja dan melakukan hal-hal yang produktif seperti tahun-tahun sebelum ada wabah Covid-19. “Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah bangsa, terutama masalah perekonomian,” tambahnya.

Sebenarnya, pria asal Bengkulu itu berharap, pencabutan PPKM ini dilakukan 6 bulan yang lalu. Sebab, katanya lebih lanjut, kalau bicara masalah virus, virus merupakan hal yang tidak pernah hilang. “Tinggal bagaimana ketersebarannya bisa dikendalikan,” paparnya.

Dengan dicabutnya PPKM, menurut anggota DPR dari Dapil II Banten itu, membuat kita tak boleh menjadikan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Covid sebagai alasan untuk tidak bekerja dan berkegiatan. “Tak ada lagi alasan karena Covid, lalu kita tidak bekerja,” tegasnya.

Langkah pemerintah yang telah mencabut PPKM, menurut Yandri, merupakan langkah yang tepat bagi bangsa dan negara, apalagi memasuki tahun 2023. “Di tahun baru kita memulai kehidupan baru dengan situasi baru tanpa Covid,” ujarnya.

Meski demikian, Yandri mengingatkan, agar kita semua tetap waspada. Ke-

waspadaan merupakan kunci kehidupan. “Kita tidak boleh lengah, takabur, dan menganggap remeh,” paparnya.

Dia berharap, pengalaman masa pandemi Covid-19 dijadikan sebagai pengalaman untuk lebih berhati-hati. Tidak ada kata pasti dalam hidup, tetapi dengan kehati-hatian, kecermatan, dan melakukan sesuatu yang terukur menjadikan langkah-langkah itu sebagai modal untuk mengantisipasi dan menghadapi bila mana musibah itu datang kembali. □

Kesenian Islami

Gus Jazil Ajak Kemenag-LASQI Kembangkan Kesenian Islami

BUDAYA kesenian Islami belakangan kurang mendapatkan tempat di hati masyarakat. Berbagai kesenian islami seperti qasidah yang pernah berjaya pada era 80-an kini semakin redup dan tergusur oleh kesenian-kesenian modern, termasuk kesenian dari luar seperti K-Pop dan lainnya.

Wakil Ketua MPR RI yang juga ketua umum Lembaga Seni Qasidah Indonesia (LASQI), Jazilul Fawaid, mengajak seluruh pihak, khususnya Kementerian Agama (Kemenag), untuk memberikan dukungan terhadap pengembangan kesenian islami, seperti qasidah, gambus, rebana dan lainnya.

“DPP LASQI terus bekerja keras untuk membangun kebersamaan itu sekaligus mencari cara-cara baru supaya seni qasidah mendapatkan tempat lebih luas di masyarakat. Event-event di berbagai kota, kami berharap Kementerian Agama juga melibatkan LASQI sehingga budaya qasidah makin lama juga mendapatkan tempat,” ujar Gus Jazil—sapaan akrab Jazilul Fawaid—saat membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) LASQI Jawa Barat di Kota Bandung, Kamis (29/12/2022).

Gus Jazil menceritakan, dulu qasidah menjadi bagian dari gelaran Musyabaqah Tilawatil Quran (MTQ) yang benar-benar mendapatkan dukungan oleh pemerintah di era Orde Baru. “Kalau dulu MTQ itu benar-benar kelihatan pemenangnya. Mereka diberikan tempat khusus pada malam Nuzulul Quran, mendapatkan dukungan negara,” urainya.

Dengan cara itu, kegiatan kesenian Islami seperti qasidah atau MTQ menempel di tengah masyarakat. “Kultural ini kalau tidak kita jaga bersama, lambat laun hilang. Anak-anak kita nyanyinya Korea. Harus ada artis-artis atau bintang qasidah baru dengan variasi baru, biar nggak cuma kenal lagu Perdamaian atau Kota Santri,” urainya.

Karena itu, Gus Jazil menekankan kepada seluruh jajaran LASQI di semua tingkatan,



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

baik di DPP, DPW, maupun DPD kabupaten/kota untuk terus meningkatkan kreativitas sehingga bisa menyesuaikan atau mengharmonikan qasidah dengan perkembangan kesenian dan kehidupan masyarakat modern.

“Mungkin dari pakaiannya, alat musiknya, cara tampilnya diperbaharui sekreatif mungkin sehingga menyesuaikan dengan kondisi kekinian. Dengan begitu qasidah

mendapat tempat di tangan masyarakat,” katanya.

Gus Jazil meminta para pengurus LASQI di semua tingkatan untuk terus melakukan pembinaan bibit-bibit muda potensial untuk mendalami kesenian Islami, seperti qasidah. “Caranya ya dilombakan karena ini ujungnya adalah festival duta-duta qasidah sehingga muncul bintang-bintang baru binaan LASQI,” tuturnya. □



Tahun 2023 Pintu Masuk Tahun Politik

Bamsoet Ingatkan Parpol Peserta Pemilu Jaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Semua partai politik boleh saling bersaing untuk mendapat dukungan masyarakat, tetapi tidak dengan membawa isu agama, suku, ras yang mencederai demokrasi Indonesia.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mengingatkan, tahun 2023 merupakan pintu masuk tahun politik untuk bersiap menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024. Sudah menjadi pengalaman bersama bahwa kontestasi politik selalu berpotensi memicu eskalasi ketegangan politik dan rentan menyulut konflik horisontal.

“Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menetapkan 17 partai politik sebagai peserta Pemilu. Dalam kaitan ini, semua kontestan Pemilu hendaknya mengedepankan kesantunan dalam berpolitik, membuang jauh-jauh dikotomi politik yang menyebabkan perpecahan pada kutub-kutub yang berseberangan. Semua elemen masyarakat harus menjadikan Pemilu sebagai bagian

penting dari proses pendewasaan politik dan proses pematangan demokrasi,” ujar Bamsoet di Jakarta, Rabu (28/12/22).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini, menegaskan, tidak boleh ada lagi politik identitas yang membentuk polarisasi di tengah masyarakat. Semua partai politik boleh saling bersaing untuk mendapat dukungan masyarakat, tetapi tidak dengan membawa isu agama, suku, ras yang mencederai demokrasi Indonesia.

“Sudah bukan masanya lagi membawa-bawa isu agama, suku ataupun ras hanya untuk meraih suara terbanyak, tetapi menimbulkan dampak besar berupa perpecahan di kalangan masyarakat. Kebersamaan, persatuan, dan kesatuan bangsa harus menjadi prioritas utama,” kata

Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini berharap, setiap elemen bangsa membangun situasi dan mendorong koalisi partai politik secara aman dan damai di Pemilu 2024. Seluruh partai politik dan masyarakat harus menjadikan Pemilu dan Pilkada serentak sebagai sebuah pesta demokrasi yang suka ria dan tidak memecah belah persatuan.

“Di akhir tahun 2022 ini perbincangan tentang suksesi kepemimpinan nasional menjadi topik di mana-mana. Harapan saya kepada seluruh elemen bangsa untuk membangun situasi dan mendorong koalisi partai politik secara aman dan damai,” pungkas Bamsoet. □

Evaluasi Perencanaan Pendidikan Islam

Yandri Susanto: Dunia Pendidikan Islam Tak Kalah dengan Pendidikan Umum

Wakil Ketua MPR RI, Yandri Susanto, berharap, dari dunia pendidikan Islam akan lahir orang-orang hebat di dunia, sekaligus hebat di akhirat.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

MESKI saya sebagai Wakil Ketua MPR, namun saya tetap berada di Komisi VIII DPR. Komisi ini merupakan mitra kerja dari Kementerian Agama,” ujar Wakil Ketua MPR H. Yandri Susanto SPt., saat menghadiri acara Evaluasi Perencanaan Pendidikan Islam Pusat dan Daerah Tahun 2022, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu di Kota Bengkulu, 26/12/2022).

Politisi nasional yang berasal dari Bengkulu ini menilai, acara yang dihadapinya itu sangat penting. Di hadapan para pejabat Kementerian Agama, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) menjelaskan, sejatinya dunia pendidikan Islam mewarnai Indonesia, meski jumlah lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama kalah dibanding pendidikan umum.

Di Bengkulu dan daerah lainnya, jumlah lembaga pendidikan Islam negeri masih sedikit. Meski jumlahnya sedikit, menurut Yandri Susanto, tidak membuat Kementerian Agama keteteran dalam segi kualitas.

“Kondisi demikian harus kita jadikan pemantik untuk melakukan perbaikan,” tegasnya.

Menurut Yandri, dari segi kualitas dunia pendidikan Islam sebenarnya tidak kalah dengan pendidikan umum. “Buktinya, MAN Insan Cendekia, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, nomer dua terbaik seluruh Indonesia,” ungkapnya. “Anak saya pun sekolahkan di MAN 2 Kota Malang,” tambahnya.

Tapi, Yandri mengakui, dulu pendidikan Islam memang tertinggal atau dinomorduakan. Dahulu bila tidak lolos di SMA Negeri favorit, orangtua baru menyekolahkan anaknya ke MAN. Pun demikian, bila tidak lolos di SMP Negeri, baru mendaftar di MTs. Negeri. “Saat ini hal demikian tidak terjadi lagi. Sekarang orangtua pada antri menyekolahkan anaknya ke lembaga pendidikan Islam,” paparnya. “Hal demikian sebagai bukti keberhasilan Kementerian Agama,” tambahnya.

Dia berharap kepada para pejabat dan pegawai Kementerian Agama agar

menyekolahkan anak-anaknya ke lembaga pendidikan Islam. Itu ditekankan untuk mengangkat derajat pendidikan Islam itu sendiri. “Ini merupakan komitmen bersama dalam rangka mempercepat laju persaingan dunia pendidikan Islam dan umum,” papar Yandri Susanto.

Pria asli Bengkulu Selatan itu melihat, roadmap atau rancang bangun pendidikan Islam sudah sangat bagus. Di Komisi VIII, anggaran pendidikan Islam besar hampir 72%. Oleh karena itu, dia berharap, output seiring sejalan dengan anggaran itu. Dia mendorong agar kementerian itu terus menanta dan memaksimalkan anggaran yang ada dengan perencanaan terbaik.

“Mudah-mudahan evaluasi perencanaan ini akan lebih membuat semangat,” harapnya. Sebagai wakil rakyat yang duduk di Komisi VIII dia siap mengawal Kementerian Agama. “Semoga dari dunia pendidikan Islam akan lahir orang-orang hebat di dunia, sekaligus hebat di akhirat,” harap wakil rakyat dari Dapil II Banten itu. □

Tantangan di tahun 2023

Bangun Semangat Bersama untuk Wujudkan Kemandirian Bangsa

Perlu semangat bersama untuk mewujudkan kebijakan yang mampu mengakselerasi proses membangun kemandirian dan daya tahan bangsa untuk menghadapi berbagai tantangan di tahun 2023.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

PEKERJAAN rumah di tahun 2022 harus segera dituntaskan agar pada tahun 2023 ini kita mampu mengakselerasi pembangunan nasional demi mewujudkan kemandirian dan daya tahan bangsa,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Senin (2/1/2023).

Lestari menilai, pada tahun lalu proses sejumlah kebijakan kerap menghadapi berbagai kendala yang berpotensi menghambat proses percepatan pembangunan nasional di beberapa sektor.

Di sektor pendidikan misalnya, ujar Rerie —sapaan akrab Lestari— sejumlah kebijakan seperti peningkatan kualitas guru, baik lewat upaya peningkatan kompetensi guru dan pengangkatan guru honorer, masih menghadapi beberapa kendala.

Demikian pula, ujar Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, dengan proses revisi Undang-

Undang Sistem Pendidikan Nasional yang berupaya mengintegrasikan peran tiga Undang-Undang terkait pendidikan, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Proses revisi tersebut, menurut Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, memerlukan partisipasi semua pihak, para pemangku kepentingan dan masyarakat, agar memiliki semangat yang sama dalam mewujudkan sistem pendidikan nasional yang lebih baik.

Partisipasi publik dan para pemangku kepentingan di sektor terkait dalam proses pembuatan kebijakan, jelasnya, harus terus ditingkatkan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan negara.

Apalagi, ujar Rerie, keberhasilan

pembangunan sektor pendidikan sangat bergantung pada keberhasilan sektor lain, seperti sektor kesehatan. Karena tanpa peserta didik yang sehat, sulit untuk menjalani sistem pendidikan nasional yang baik.

Semangat yang sama dari para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, tambah Rerie, juga harus dikedepankan dalam proses penempatan guru di sejumlah daerah.

Karena, tegasnya, ketersediaan guru yang berkualitas, merupakan bagian dari upaya mengakselerasi pembangunan sektor sumber daya manusia nasional yang tangguh untuk meningkatkan kemandirian bangsa.

Optimisme dalam membangun semangat yang sama dari setiap anak bangsa untuk mewujudkan bangsa yang tangguh, tambah Rerie, harus terus diupayakan oleh para pemangku kepentingan dan masyarakat agar bangsa ini mampu menghadapi berbagai tantangan.

“Apalagi, kita sebagai bangsa dengan semangat yang sama dari setiap anak bangsa terbukti di masa pandemi dinilai mampu mengendalikan Covid-19 di tanah air,” ujarnya.

Menurut Rerie, mendorong terciptanya semangat yang sama setiap anak bangsa lewat pengamalan nilai-nilai kebangsaan yang kita miliki dalam melahirkan sejumlah kebijakan di sektor politik, ekonomi, sosial dan budaya, merupakan langkah strategis untuk membangun karakter dan kemandirian bangsa dalam upaya melaksanakan amanah konstitusi UUD 1945 mewujudkan negara yang adil, makmur berdasarkan Pancasila. □

Mitigasi Penanggulangan Bencana

Bamsoet Dorong Masuk Kurikulum Pendidikan

Setiap anak bangsa bisa siap dan siaga menghadapi berbagai potensi bencana yang akan datang. Sebagaimana dilakukan oleh Jepang dan berbagai negara besar lainnya.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan waspada serta mengikuti berbagai arahan BMKG dalam menyikapi potensi cuaca ekstrem yang terjadi pada akhir Desember 2022 hingga awal Januari 2023. Seperti hujan lebat, gelombang air laut tinggi, hingga angin kencang yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia.

“Kondisi geografis Indonesia yang rawan terhadap berbagai bencana alam, seperti keberadaan tiga lempeng aktif, yakni eurasia, indopasifik, dan indoaustralia, seharusnya juga menyadarkan kita untuk memprioritaskan pendidikan kebencanaan dan mitigasi penanggulangan bencana masuk dalam kurikulum pendidikan. Sehingga setiap anak bangsa bisa siap dan siaga menghadapi berbagai potensi bencana yang akan datang. Sebagaimana dilakukan oleh Jepang dan berbagai negara besar lainnya

yang juga memiliki posisi geografis rawan bencana seperti Indonesia,” ujar Bamsoet di Jakarta, Jumat (30/12/22).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, dalam laporan BMKG, cuaca ekstrem selama akhir Desember 2022 hingga awal Januari 2023 tersebut setidaknya disebabkan empat fenomena anomali dinamika atmosfer. Pertama, peningkatan aktivitas Monsun Asia yang dapat meningkatkan pertumbuhan awan hujan secara signifikan di wilayah Indonesia bagian barat, tengah, dan selatan. Kedua, intensifikasi seruk dingin yang dapat meningkatkan kecepatan angin permukaan, terutama di wilayah Indonesia bagian Barat dan Selatan.

“Ketiga, pembentukan pusat tekanan rendah yang dapat memicu peningkatan pertumbuhan awan konvektif yang berpotensi menyebabkan hujan lebat hingga ekstrim dan peningkatan angin permukaan.

Serta keempat, fenomena Madden Julian Oscillation berupa awan-awan hujan bergerak dari Samudera Hindia sebelah timur Afrika menuju Samudera Pasifik melalui wilayah Indonesia,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini, menerangkan, menyikapi prakiraan cuaca tersebut, berbagai hal perlu dipersiapkan oleh masyarakat bersama pemerintah pusat dan daerah. Seperti bergotong-royong membersihkan saluran air agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir, merapikan pohon-pohon hingga memastikan tegaknya tiang-tiang reklame, serta baliho dan tiang-tiang lainnya agar tidak tumbang terkena angin besar.

“Selain itu, sangat penting bagi kita untuk senantiasa menjaga kesehatan, agar tidak terkena penyakit akibat perubahan cuaca ekstrim,” pungkas Bamsoet. □

Pembangunan Pesantren di Kedurang

Dapat Dukungan dari Pemprov. Bengkulu

Wakil Ketua MPR, H. Yandri Susanto, S.Pt., merasa gembira karena Pemerintah Provinsi Bengkulu memberi dukungan terhadap pembangunan pesantren di desa kelahirannya, Desa Palak Siring, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KEINGINAN Wakil Ketua MPR, H. Yandri Susanto, S.Pt., untuk membangun pesantren di Desa Palak Siring, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Bengkulu. Dukungan tersebut dibuktikan dengan kunjungan Wakil Gubernur Bengkulu, Dr. H. Rosjonsyah Syahili Sibarani S.IP., MSi., ke lokasi pembangunan pesantren tersebut pada 25 Desember 2022.

Dalam kunjungan itu, Rosjonsyah menyatakan dukungannya dengan apa yang telah dilakukan oleh keluarga besar Yandri Susanto yang peduli pada pendidikan di Bengkulu Selatan. "Ini merupakan pesantren pertama di Kedurang," ujar Rosjonsyah. Dan, dia berharap, agar pesantren itu nantinya dapat berkembang.

Sebagai pihak dari pemerintah, Rosjonsyah siap membantu pembangunan pesantren. "Dalam hal administrasi dan anggaran kami siap membantu," tegasnya. Terwujudnya pendidikan pesantren, menurut Rosjonsyah, merupakan tanggung jawab bersama terhadap pendidikan anak-anak di

Bengkulu Selatan ke depan, terutama pendidikan di lembaga pendidikan yang mengajarkan perpaduan ilmu agama dan ilmu umum.

"Di pesantren, selain siswa diberi ilmu agama juga diberi ilmu umum sehingga akan menjadi generasi yang beriman, bertaqwa, dan siap menjawab tantangan zaman," tutur Rosjonsyah.

Yandri menyatakan gembira mendapat kunjungan dari Rosjonsyah. "Saya tidak menyangka Wakil Gubernur datang melihat pembangunan pesantren di sini," ujar Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu. Kunjungan tersebut tentu akan menambah semangat Keluarga Yandri Susanto untuk semakin berkomitmen mencerdaskan kehidupan masyarakat Bengkulu. "Ini pemicu dan pemacu bagi kami untuk terus berbuat baik pada masyarakat," paparnya.

Terhadap dukungan itu, Yandri Susanto yang juga merupakan orang asli Kedurang, menyebut sosok Wakil Gubernur Bengkulu merupakan orang baik dan punya komitmen kepada umat. "Terima kasih kepada Wakil Gubernur yang siap membantu," tuturnya. Orang yang punya komitmen keumatan

seperti wakil gubernur, menurut Yandri Susanto, perlu diperbanyak agar provinsi ini bisa mengejar ketertinggalan dengan provinsi lain.

Sebagai orang asli Bengkulu Selatan, Yandri Susanto akan terus berkomitmen pada pembangunan di provinsi ini meski dirinya bukan wakil rakyat dari dapil Bengkulu. "Walau tidak pernah nyaleg dari Bengkulu, namun saya tetap peduli pada provinsi ini," ucapnya. "Saya tetap punya komitmen membangun Bengkulu," tambahnya.

Silaturahmi dan komunikasi dengan pemerintah diakui akan mempercepat laju pembangunan. Diceritakan saat bertemu dengan Menteri PUPR, dirinya mengusulkan adanya jalan dan jembatan di Kedurang. "Dan, Menteri PUPR merespon langsung keinginan tersebut," ungkapnya. Menurut Yandri Susanto, kalau ada relasi itu perlu dimanfaatkan dengan baik. "Komunikasi yang baik membuat apa yang kita harapkan bisa kita dilakukan," ujarnya.

Cara-cara demikian, menurut Yandri, merupakan upaya untuk mengejar keteringgalan Bengkulu dengan daerah lain. □

Reuni Akbar SMAN 1 Manna

Yandri Susanto: Kita Persembahkan Karya Buat Bengkulu dan Indonesia

Wakil Ketua MPR RI, H. Yandri Susanto, Sabtu (24/12/2022), menghadiri reuni akbar SMA Negeri 1 Manna, Provinsi Bengkulu. Yandri adalah alumni angkatan ke-93 SMA tersebut.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

RATUSAN orang pada Sabtu (24/12/2022), memenuhi ruang pertemuan Hotel Grage Horizon, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Mereka adalah para alumni SMA Negeri 1 Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. Mereka yang datang dari berbagai kota dan daerah dari seluruh Indonesia sedang mengikuti Reuni Akbar SMA Negeri 1 Manna Bengkulu Selatan.

Acara yang dimulai sejak pukul 09.00 WIB itu terasa istimewa, karena dihadiri oleh Wakil Ketua MPR, H. Yandri Susanto, S.Pt.; Gubernur Bengkulu, Dr. drh. H. Rohidin Mersyah, MMA; para guru SMA Negeri 1 Manna, bahkan Pengurus OSIS SMA Negeri 1 Manna.

Kehadiran Yandri Susanto dan Rohidin Mersyah di reuni SMA Negeri 1 Manna itu menunjukkan bahwa sekolah itu dan alumninya mempunyai peran penting dan berkontribusi nyata bagi Bengkulu dan Indonesia.

Yandri Susanto, alumni angkatan 93 SMA Negeri 1 Manna, menuturkan bahwa reuni akbar yang digelar ini sangat penting. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengucapkan terima kasih kepada pihak panitia yang memiliki ide brilian untuk menghimpun kembali para alumni dari berbagai angkatan. Tercata alumni yang hadir mulai dari angkatan 73 hingga 93. "Saya sendiri termasuk alumni yang junior," ujarnya dengan tersenyum.

Pria asal Kedurang, Bengkulu Selatan, itu berharap, dari reuni yang digelar ini bisa melahirkan atau menghasilkan sesuatu yang berarti bagi Bengkulu dan Indonesia. "Kita berharap, pertemuan ini memberi dampak positif," harapnya. Dia berharap, dari pertemuan ini terjalin silaturahmi, komunikasi. Juga, jaringan antaralumni semakin lancar dan kuat sehingga melahirkan semangat kebersamaan yang berkesinambungan, serta karya-karya produktif dan positif terus-menerus.

Sehingga, menurut Yandri, acara reuni perlu terus dilakukan. "Jangan selepas kegiatan, lalu bubar," paparnya. Menurut Yandri Susanto, apa yang bisa kita lakukan hari ini ya harus kita lakukan. "Jangan menunda-nunda pekerjaan," tegasnya. Dari apa yang diinginkan tersebut maka alumni yang ada mampu menjaga nama baik almamater.

Anggota DPR dari Dapil II Banten itu mengungkapkan perasaan senang dan gembira bisa bertemu dengan senior dan teman-teman seangkatannya. Dengan terselenggaranya acara yang luar biasa, dia bisa bersilaturahmi dengan para senior dan teman seangkatan. "Nah, dengan acara ini kita jadi tahu ternyata kekuatan SMA Negeri 1 Manna sangat besar dan tersebar di berbagai daerah dan berbagai lini sektor, seperti ada yang jadi politisi, pejabat di pemerintahan, anggota TNI, serta jabatan serta posisi yang lainnya," ungkapnya.

Sukses SMA Negeri 1 Manna dalam mencetak alumni yang menduduki berbagai jabatan, menurut Yandri Susanto, membuktikan di Bengkulu Selatan sekolah itu merupakan sekolah pilihan. Mereka yang masuk ke SMA Negeri itu merupakan kumpulan dari siswa-siswa SMP di Bengkulu Selatan yang terpilih atau tersaring.

Tak hanya itu, pendidik atau guru yang ada juga merupakan orang-orang pilihan, "Gurunya top-top," ujarnya. Pembelajaran yang ada juga sangat mendukung dan bagus sehingga dari semua itu melahirkan alumni yang berkualitas. Yandri Susanto menyakini, banyaknya alumni yang berhasil karena kesungguhan siswa dan guru. "Saya mengucapkan terima kasih pada guru," tuturnya. □



H. Bambang Soesatyo, SE., MBA.

Ketua MPR RI

Pertumbuhan Impresif 2022 untuk Merespons Tantangan Riiil 2023

INDONESIA 2022 ibarat cahaya penebar harapan di tengah wajah dunia yang suram karena terus berselimut ketidakpastian. Cahaya itu muncul sebagai buah dari semangat segenap elemen masyarakat yang hampir selama tiga tahun berjibaku merespon ragam eksen pandemi Covid-19.

Dengan mengedepankan ungkapan ini, sama sekali tidak bermaksud menunjukkan atau mencerminkan perilaku pemimpin dan rakyat Indonesia yang narsis. Ungkapan ini sekadar mengutip pandangan dan penilaian komunitas global yang disuarakan oleh dua lembaga multilateral, Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia. Kedua lembaga itu menilai Indonesia 2022 sebagai the bright spot in dark.

Penilaian kedua lembaga ini pun sudah disampaikan pemerintah dalam forum seminar nasional Badan Keahlian DPR RI, pada pekan ketiga Oktober 2022. Bahkan, kemudian disampaikan langsung oleh Wakil IMF untuk Indonesia, James P. Walsh, pada pekan ketiga November 2022. “Yang ingin saya katakan adalah Indonesia telah menjadi bright spot global,” kata James.

Maka, menuju akhir tahun 2022, ungkapan tadi perlu digarisbawahi lagi. Semua elemen masyarakat diingatkan bahwa negara-bangsa memiliki modal dasar yang cukup kuat untuk merespons tantangan di tahun 2023; tahun yang masih berselimut ketidakpastian akibat faktor geopolitik, sektor keuangan global yang masih sarat masalah hingga potensi ancaman dari tingginya inflasi di sejumlah negara. Faktor lain yang juga patut diwaspadai adalah potensi kenaikan harga pangan dan energi. Maka, hiruk pikuk politik tahun 2023 terkait isu Pemilu dan Pilpres 2024 hendaknya tidak mengganggu fokus negara-bangsa menyikapi ragam tantangan itu.

Tahun 2022 yang dinamis dan sarat ujian akan

segera berakhir.. Dalam hitung hari, dunia akan menyongsong tahun 2023 yang masih menghadirkan ragam tantangan riil. Namun, optimisme harus tetap bertumbuh, karena pengalaman mengajarkan bahwa akan selalu ada peluang dan harapan pada situasi paling sulit sekalipun. Masyarakat Indonesia setidaknya sudah menghadirkan bukti, yakni saat mengelola kehidupan bersama sepanjang durasi pandemi Covid-19 dengan penuh kebijaksanaan, dan membuahkan kinerja perekonomian negara yang impresif.

Selama hampir tiga tahun semua elemen bangsa berjibaku merespons dampak pandemi Covid-19, yang telah merusak nyaris semua aspek kehidupan. Lebih dari 6,7 juta warga terinfeksi Covid-19. Lebih dari 160 ribu orang merengang nyawa, termasuk lebih dari dua ribu tenaga medis yang berjuang di garda terdepan telah gugur sebagai pahlawan kemanusiaan.

Namun, berkat optimisme yang selalu terjaga, Indonesia bisa mereduksi eksen pandemi berkat kepatuhan publik pada protokol kesehatan, dan kemudian memasuki zona pemulihan ekonomi berkat rangkaian kebijakan populis yang dirancang pemerintah. Kebijakan fiskal yang prudent dan produktif berdampak positif pada peningkatan permintaan domestik dan laju inflasi yang moderat. Menguatnya konsumsi dalam negeri itulah yang menjadi motor pertumbuhan dan pemulihan.

Selain itu, ada faktor surplus transaksi berjalan dan faktor neraca perdagangan yang per Oktober 2022 mencatat surplus 5,67 miliar dolar AS. Pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2022 memang tampak impresif; mencapai 5,01 persen per kuartal I, naik menjadi 5,44 persen per kuartal II, dan kembali meningkat 5,72 persen per kuartal III. Kendati kuartal IV diproyeksikan mengalami “moderasi” atau perlambatan, namun secara keseluruhan, pertumbuhan

ekonomi tahun 2022 amat prospektif dan mengisyaratkan optimisme.

Saat masyarakat Indonesia menikmati pertumbuhan, sejumlah negara justru terperangkap pada zona resesi. Akibat tekanan inflasi yang tinggi, sejumlah negara di kawasan Eropa sudah dibayangkan resesi. Dari Inggris, tersaji ragam kisah pilu akibat melemahnya kinerja perekonomian negeri itu. Selepas pekan kedua November lalu, Menteri Keuangan Inggris, Jeremy Hunt, mengumumkan bahwa negaranya mengalami resesi.

Perbedaan kinerja perekonomian inilah yang mendorong IMF dan Bank Dunia melihat Indonesia sebagai titik terang di tengah wajah dunia yang suram. Pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2023 diproyeksikan maksimal 2,7 persen, lebih rendah dari tahun 2022 yang 3,2 persen. Tentu saja pencapaian Indonesia sepanjang 2022 patut disyukuri oleh semua elemen masyarakat. Sikap bersyukur itu setidaknya sudah tercermin pada tingginya tingkat kepuasan masyarakat atas kerja pemerintah.

Persepsi komunitas global tentang Indonesia pun terus membaik berkat keberhasilan mengemban tugas dan fungsi Presidensi Indonesia pada G20 tahun 2022. Kepemimpinan Indonesia berhasil membangun komitmen global terhadap sejumlah isu strategis. Paling utama adalah mencari rumusan penyelesaian ketegangan geo-politik dan konflik global dengan mengedepankan dialog, diplomasi, dan cara-cara damai.

G20 juga sepakat menanggulangi krisis pangan, serta membantu negara-negara miskin yang rentan menghadapi krisis. Kesepakatan itu diwujudkan melalui program resilience and sustainability trust bernilai 81,6 miliar dolar AS yang dikoordinasikan oleh IMF.

Masih dari forum G20 di Bali, lahir pula kesepakatan berupa upaya pemulihan kesehatan global melalui pengumpulan dana 1,5 miliar dolar AS untuk penanganan pandemi. Kesepakatan lain yang juga sangat penting dan strategis adalah langkah bersama menanggulangi aneka persoalan akibat perubahan iklim dan masalah lingkungan hidup. Pada aspek mekanisme transisi energi, Indonesia memperoleh komitmen senilai 20 miliar dolar AS.

Dari perspektif ekonomi domestik, gelaran G20 juga memberi kontribusi signifikan terhadap PDB yang nilainya Rp 7,4 triliun. Fo-

rum ini juga mendorong konsumsi domestik sampai Rp 1,7 triliun, dan menyerap puluhan ribu tenaga kerja karena terbukanya ratusan lapangan pekerjaan baru, serta mendorong investasi untuk UMKM.

Agar pertumbuhan ekonomi yang impresif itu tetap terjaga, segenap elemen masyarakat diajak menjaga kondusifitas dalam kehidupan berbangsa-bernegara. Dinamika politik nasional sepanjang tahun 2022 sudah relatif baik. Persepsi ini sejalan dengan hasil survei Lembaga Survei Indonesia pada Agustus 2022. Sebagian besar responden (74 persen), menurut survei itu, menyatakan kondisi ekonomi dan politik baik atau sedang-sedang saja. Sekitar 17,7 persen responden yang menilai atau berpersepsi negatif. Memang terkesan kecil, namun patut dimaknai sebagai indikasi masih adanya potensi persoalan, sekaligus menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Harus ada upaya terstruktur dan sistematis agar angka ini tidak semakin membesar.

Kondisi perekonomian dan kehidupan sosial-politik yang relatif stabil pada tahun 2022 menjadi modal penting untuk menyongsong tahun 2023 yang sarat tantangan itu. Untuk alasan itulah semua pihak perlu memberi perhatian ekstra pada beberapa masalah.

Paling utama adalah fakta bahwa tahun 2023 menjadi pintu masuk tahun politik untuk bersiap menyelenggarakan Pemilu serentak dan Pilkada serentak tahun 2024. Sudah menjadi pengalaman bersama bahwa kontestasi politik selalu berpotensi memicu eskalasi ketegangan politik dan rentan menyulut konflik horisontal.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menetapkan 17 partai politik sebagai peserta Pemilu. Dalam kaitan ini, semua kotestan Pemilu hendaknya mengedepankan kesantunan dalam berpolitik, membuang jauh-jauh dikotomi politik yang menyebabkan polarisasi rakyat pada kutub-kutub yang berseberangan. Semua elemen masyarakat harus menjadikan Pemilu sebagai bagian penting dari proses pendewasaan politik dan proses pematangan demokrasi.

Dan, demi kemaslahatan bersama, hiruk pikuk politik tahun 2023 terkait isu Pemilu dan Pilpres 2024 hendaknya tidak mengganggu fokus negara-bangsa menyikapi ragam tantangan riil sepanjang tahun 2023. □

Selamat Natal dan Tahun Baru 2023

Mendadak TNI. Siap Tidak!

Pria yang pernah menjadi mentalis (salah satu seni sulap), pembawa acara, dan sekarang terkenal sebagai youtuber, Deddy Corbuzier, mendapat pangkat Letnan Kolonel Tituler TNI AD oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pangkat tersebut juga disahkan oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, dan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman. Muncul berbagai pendapat soal pemberian pangkat tituler tersebut. Secara aturan ada dan diperbolehkan, namun sang penerima harus siap menerima konsekuensi yang tidak mudah. Berikut pendapat wakil rakyat yang membidangi masalah Pertahanan dan TNI.

H. Sukamta, Anggota MPR Fraksi PKS

Pangkat Tituler Bisa Dicabut

PADA intinya pangkat tituler itu bisa diberikan kepada WNI siapa saja. Kementerian Pertahanan (saat tulisan dikirim ke redaksi pada 15 Desember 2022) belum ada pembicaraan dengan Komisi I DPR soal pemberian pangkat tituler kepada Deddy Corbuzier. Termasuk soal kriteria, kenapa Deddy Corbuzier yang dipilih.

Ketika ditanya, apakah pangkat tersebut mendesak diberikan, sekarang zaman digital? Spektrum ancaman terhadap negara pun berkembang tidak hanya ancaman militer secara fisik tetapi juga ancaman nonmiliter dan ancaman gabungan (hibrida). Jangan anggap negara tidak terancam bahaya hanya karena tidak terlihat adanya ancaman militer, padahal ancaman nonmiliter dan hibrida nyata kita rasakan. Banyaknya utang luar negeri kita juga berpotensi menjadi ancaman bagi bangsa pada masa yang akan datang.

Paradigma pertahanan yang dibutuhkan sekarang tidak hanya tentara yang ahli di medan pertempuran. Tapi bisa meluas ke WNI yang bukan tentara. Mungkin saja dipilihnya Deddy Corbuzier terkait dengan kepiawaiannya dalam mengelola podcast yang menjadi sarana penyebaran opini kepada masyarakat luas.

Konteksnya bukan melihat internal TNI



kekurangan sumber daya atau tidak, tetapi bisa jadi memberdayakan pihak luar yang memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh TNI. Menjadi TNI itu kan tidak mudah karena berlaku hukum militer terhadapnya, untuk bisnis juga tidak diperbolehkan. Wajar jika seorang anggota TNI tidak memiliki kapasitas di luar tugasnya.

Kita akan memasuki tahun politik. Biasanya ada kebijakan-kebijakan yang tidak biasa,

termasuk di antaranya merekrut public figure. Mereka harus tunduk dengan hukum disiplin militer. Di antaranya tidak boleh berbisnis. Tidak boleh berpolitik praktis, bahkan tidak memiliki hak politik untuk dipilih maupun memilih, selama pangkat dan tugas masih melekat. Kalau tidak mampu tunduk dengan hukum disiplin militer, pangkat tituler bisa dicabut. □

AWG

Hillary Brigitta Lasut, Anggota MPR Fraksi Nasdem

Banyak Konsekuensi Harus Ditanggung

ATURAN pemberian pangkat tituler dibenarkan. Pangkat yang demikian merupakan pangkat kehormatan kepada masyarakat sipil yang dianggap mampu memberikan sumbangsih pada bangsa dan negara. Meski demikian, ada konsekuensinya bila seseorang mendapat pangkat tituler. Dalam *detik.com*, 12 Desember 2022, Hillary mengatakan, pangkat yang diberikan akan membawa nama institusi TNI sehingga penerima pangkat tituler perlu mengetahui 8 wajib TNI, salah satunya terkait menjaga sikap dan menjadi contoh serta mengatasi kesulitan rakyat.

Penerima pangkat senantiasa menjadi contoh menjaga sikap dan kesederhanaan, menjadi contoh dan memelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat, menjaga kehormatan di muka umum. Hillary bertanya, apakah bisa melakukan demikian sebab yang bersangkutan adalah tokoh entertainment yang tentunya akan sangat sulit untuk bisa seperti ini.

Dalam *web* tersebut, dia juga bertanya, apakah istrinya harus ikut Persit dan apakah istrinya sudah siap mengikuti kegiatan TNI atau harus berpakaian tertutup, untuk istri dan keluarga juga menjadi pertanyaan. Menurutny, selama penerima pangkat tituler



siap, ya tidak masalah namun jangan sampai malah penerima pangkatnya bingung karena ada begitu banyak tanggung jawab sebagai penyandang pangkat TNI.

Ditambahkan, penyandang pangkat tersebut tidak diperkenankan berpolitik atau memihak salah satu pihak. Di sini dirinya kembali mempertanyakan kesiapan penerima pangkat terhadap konsekuensi yang akan terjadi. Lebih lanjut dalam *media online* itu, ketika sudah berseragam TNI, apakah ia sudah siap semua konten dan upload-annya, termasuk produk entertainment

disorot dan diawasi oleh Mabes TNI atau Mabes AD. Hal demikian harus dipahami dulu sebelum menerima pangkat.

Sebagai anggota TNI, penerima pangkat akan menerima hak sebagai anggota. Ia akan menerima gaji dan berbagai macam fasilitas dari pemerintah. Pertanyaannya, apakah penerima pangkat membutuhkan atau tidak, apakah malah akan membebani negara, dan sementara ia malah waswas, takut-takut, dalam memproduksi konten dan memproduksi produk entertainmenya. □

AWG



Dr. Ahmad Basarah

Wakil Ketua MPR RI

Dari Pentingnya Hadirkan PPHN Sampai Antisipasi Resesi Dunia

MENGEVALUASI tahun 2022 dan mengantisipasi tahun 2023, Fraksi PDI Perjuangan MPR RI menggelar seminar bertajuk "Refleksi Akhir Tahun: Evaluasi Perkembangan Ketatanegaraan 2022 dan Proyeksi Tahun 2023-2024" di Jakarta, Selasa (27/12/22). Seminar menghadirkan akademisi hukum dari Universitas Indonesia, Satya Arinanto, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono, dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, Oce Madril. Rangkuman hasil seminar tersebut kemudian diramu dengan berbagai dimensi pemikiran menjadi pokok-pokok pikiran yang disampaikan sebagai refleksi akhir tahun 2022 dan proyeksi tahun 2023.

Secara umum, situasi sosial politik Indonesia sepanjang tahun 2022 diwarnai oleh turbulensi sosial akibat pandemi covid 19 yang berdampak sistemik di berbagai bidang kehidupan. Pemerintah berhasil menangani pandemi ini melalui serangkaian regulasi dan kebijakan. Keberhasilan ini tidak terlepas dari semangat gotong-royong semua komponen bangsa, termasuk partai politik.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri bahkan telah memberikan arahan resmi melalui surat instruksi partai pada 20 Maret 2020 agar seluruh kadernya menaruh perhatian serius terkait masalah covid. Saat varian Omicron merebak, PDI Perjuangan mengeluarkan instruksi No. 3548 pada 29 November 2021, intinya menyerukan pentingnya persatuan bangsa dan gotong-royong menangani Covid-19.

Tentu bangsa Indonesia harus bersyukur pemerintah dapat mengatasi pandemi Covid-19. Secara ekonomi, pandemi ini telah berkontribusi terhadap kemiskinan global. Upaya dunia menghapus kemiskinan ekstrem dalam empat tahun ini seolah lenyap. Ketidaksetaraan global meningkat bahkan mundur hingga setara dengan kondisi awal abad ke-20. World Bank memperkirakan di akhir 2022 ini 685 juta penduduk global masih berada

dalam kemiskinan ekstrem.

Namun demikian, saat Covid-19 dapat diatasi, kontestasi kekuasaan mendominasi wacana publik sejak awal 2022. Berbagai manuver politik mempertontonkan libido kekuasaan, mulai dari agenda pembahasan Pemilu Serentak 2024, bursa capres dan cawapres, wacana masa jabatan presiden tiga periode, hingga isu menunda pemilu. Semua wacana itu pada akhirnya menggeser agenda strategis bangsa untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), padahal semua fraksi di MPR telah memiliki persamaan pandangan tentang perlunya negara ini memiliki PPHN.

Sebagai sebuah refleksi yang harus diingat untuk tahun-tahun mendatang, penting dicatat bahwa munculnya wacana PPHN lebih karena pembangunan nasional jadi terputus pasca wewenang MPR RI menetapkan haluan negara dihapus. Sejak Garis-Garis Besar Haluan Negara (GHBN) dihilangkan, pembangunan nasional dan daerah dijalankan sesuai visi dan misi presiden dan kepala daerah terpilih.

Intinya, Pilpres dan Pilkada memberikan keleluasaan bagi calon presiden dan calon kepala daerah untuk menyampaikan visi, misi, dan program pembangunan saat berkampanye. Inilah yang berpotensi melahirkan keterputusan program pembangunan dari satu masa jabatan ke masa jabatan berikutnya. Desentralisasi dan penguatan otonomi daerah menambah keruwetan akibat perencanaan pembangunan daerah tidak bersinergi antara satu daerah dengan daerah lainnya, serta antara pembangunan daerah dengan pembangunan nasional.

Di tahun-tahun mendatang, negara ini memerlukan GHBN atau apa pun namanya, agar pembangunan nasional jadi berkesinambungan. Tanpa GBHN yang jelas, setiap presiden bisa menjalankan kebijakan pribadinya sendiri-sendiri tanpa merasa terikat secara hukum oleh grand design besar yang dirumuskan para wakil rakyat. Model pembangunan nasional saat ini mirip tari poco-poco, maju selangkah, mundur selangkah dan begitu seterusnya.

Setelah GHBN dihilangkan dari politik dan ketatanegaraan, lahir UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan UU No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Kedua regulasi inilah yang menjadi pedoman pembangunan nasional.

Wacana perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode secara tidak langsung membuat agenda menghadirkan PPHN melalui amandemen terbatas menjadi tertunda. PDI Perjuangan sebagai lokomotif hadirnya PPHN mengambil sikap menunda rencana amandemen terbatas itu. Partai ini khawatir wacana ini menjadi “bola liar” yang potensial dimanfaatkan para “penumpang gelap” yang haus kekuasaan secara oligarkis.

Fraksi PDI Perjuangan berpendapat, seharusnya setiap anak bangsa di negara besar ini punya sensitivitas nasionalisme dan patriotisme yang tinggi ketimbang larut dalam kebisingan politik jelang Pemilu 2024 nanti. Jangan sampai libido kekuasaan itu membuat mereka lupa dengan berbagai ancaman global yang menghadang, mulai dari resesi ekonomi yang diprediksi terjadi pada 2023, krisis pangan, krisis energi, terorisme global, persaingan dagang AS dengan Cina, perang Rusia vs Ukraina, dan ancaman varian baru Covid-19. Agenda politik 2024 seharusnya diisi dengan diskursus bagaimana menjawab semua ancaman global itu.

Toh, kebisingan politik yang kental diwarnai oleh libido kekuasaan itu pun tidak membuat kualitas demokrasi di Indonesia dinilai baik. Survei Litbang Kompas menunjukkan, mayoritas responden menilai kualitas demokrasi di Indonesia pada 2022 lebih buruk ketimbang pada 2021. Kompas mewawancarai 504 responden di 34 provinsi pada 6 - 9 September 2022. Hasilnya, 37,7% responden menjawab kualitas demokrasi di Indonesia pada 2022 lebih buruk dibanding pada tahun sebelumnya, 23,2% menjawab sama baik; 20,3% menjawab semakin baik; 13,9% menjawab sama buruk; dan sisanya 4,9% menjawab tidak tahu. Meski demikian, 57,7% responden yakin kualitas demokrasi Indonesia akan lebih baik pada 2023.

Karena itu, demi kualitas demokrasi yang lebih baik, dirasa perlu dilakukan upaya memantapkan ideologi Pancasila di tengah masyarakat. Pemantapan ini pada 2022 ditandai dengan penghidupan kembali pendidikan Pancasila di ruang-ruang pendidikan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2022, yang merupakan Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Fraksi PDI Perjuangan menyayangkan dalam PP No. 57/2021,

Pancasila tidak dijadikan mata pelajaran dan mata kuliah wajib. Peraturan ini lalu direvisi oleh PP No. 4/2022 yang menjadikan Pancasila sebagai mata pelajaran dan mata kuliah wajib sejak di tingkat pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi. PP No. 4/2022 diharapkan menjadi katalisator bagi revisi UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). UU ini tidak menjadikan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dan karena itu wajib direvisi.

Bukan hanya di dunia pendidikan, dalam ranah perundang-undangan juga perlu dilakukan revitalisasi dan reaktualisasi Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Masih banyak produk undang-undang saat ini belum sepenuhnya menggunakan Pancasila sebagai sumber hukum materiil maupun UUD 1945 sebagai sumber hukum formil dan materiil. Jika pembentukan undang-undang di tahun-tahun mendatang masih belum sepenuhnya merujuk kepada Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara, ini akan menjadi tragedi besar bangsa.

Dalam penegakan hukum, Fraksi PDI Perjuangan melihat 2022 sebagai tahun terberat untuk kepolisian. Di tengah membaiknya kepercayaan publik terhadap Polri, kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat di rumah dinas bekas Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Irjen Ferdy Sambo, meruntuhkan semua reputasi yang dibangun. Menurut Lingkar Survei Indonesia (LSI) Denny JA, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri turun 13% dari semula 72,1% sebelum kasus menjadi 59,1%. Tragedi Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, juga berkontribusi pada menurunnya citra positif Polri.

Di tengah situasi menurunnya citra Polri, aksi bom bunuh diri di Polsek Astanaanyar, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (7/12) pagi menambah daftar insiden terorisme di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Menurut data dari Global Terrorism Database (GTD), terdapat 638 insiden terorisme di Indonesia sejak 2000 hingga 2020. Insiden terorisme paling banyak terjadi pada 2001 dengan total 106 insiden. Setelah kasus Polsek Astanaanyar, Polri menangkap 24 tersangka terorisme.

Fraksi PDI Perjuangan berpendapat, menghukum narapidana teroris bersifat harus. Tapi hukuman fisik tidak sepenuhnya membuat napi teroris insyaf. Butuh program deradikalisasi secara konsiten dari petugas dan tokoh agama. Jika tidak, merujuk data Kreasi Prasasti Perdamaian Noor Huda Ismail, minimal 10% eks napi teroris sudah dibebaskan lalu kembali mendukung atau melakukan aksi kekerasan!

Di tahun-tahun mendatang, Fraksi PDI Perjuangan mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja lebih giat lagi. Data Transparency International menyebutkan, peringkat Indonesia tergolong rendah dalam Indeks Persepsi Korupsi 2021. Peringkat Indonesia ada di nomor 96 dari 180 negara, antara lain Ethiopia (87), Tanzania (87), Ghana (73). Indonesia lebih korup dibanding Malaysia (62), Timor Leste (82), Vietnam (87), dan Singapura (4). Meski demikian, Indonesia lebih baik ketimbang Filipina, Thailand, Laos, dan Myanmar yang sudah tembus peringkat 100.

Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti perlunya reformasi hukum peradilan. Kasus tertangkapnya hakim agung dan dua hakim MA lainnya akibat dugaan tindak pidana suap pengelolaan perkara sungguh memprihatinkan bangsa. Kasus ini merupakan gambaran serius “puncak gunung es” kondisi penegakan hukum di Indonesia. Lembaga peradilan yang tugasnya memberikan keadilan kepada rakyat justru melahirkan mafia hukum yang menjadikan dunia peradilan kita menjadi rumit, berbiaya mahal, dan penuh ketidakpastian hukum. Hal ini mengakibatkan kemunduran peradaban bangsa yang luar biasa. Masalah ini juga sangat mendesak untuk dicarikan formula solusinya di tahun-tahun mendatang.

Pengesahan rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) oleh DPR RI jadi Undang-undang (UU) menjadi perhatian tersendiri Fraksi PDI Perjuangan berikut kontroversi yang ditimbulkannya. Menurut PBB, KUHP yang baru mengandung aturan yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia (HAM). Ada masalah kesetaraan dan privasi yang menjadi catatan keprihatinan PBB, juga soal kebebasan beragama, jurnalisme, dan minoritas seksual/gender.

Menanggapi semua kontroversi yang mencuat, Fraksi PDI Perjuangan sependapat dengan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, bahwa tidak mudah memodifikasi hukum pidana warisan Belanda di tengah kondisi masyarakat Indonesia yang heterogen. Tapi, memang sudah saatnya Indonesia memiliki KUHP karya anak bangsa setelah 104 tahun menggunakan KUHP warisan Belanda. KUHP yang disahkan pada 6 Desember 2022 adalah landmark hukum nasional.

Dari luar negeri, gempuran Rusia terhadap Ukraina sedikit banyak berimplikasi juga kepada Indonesia. Setelah itu potensi krisis baru hampir meletus tatkala Nancy Pelosi, Ketua DPR AS, memaksakan kunjungan ke Taiwan meski telah diultimatum Tiongkok. Beruntung tidak terjadi perang terbuka antara AS dan Tiongkok. Namun hal ini menyisakan residu yang setiap saat dapat menciptakan konflik di Asia Timur. Jika konflik terbuka terjadi dan pecah perang, dampaknya

akan cepat dapat menjalar ke ASEAN dan Laut Tiongkok Selatan akan menjadi arena unjuk kekuatan bagi AS dan Tiongkok.

Meski dunia terlihat suram, 2022 bagi Indonesia merupakan tahun yang menggembirakan karena negara ini sukses memegang Keketuaan G20 yang diakui dunia. Di tahun 2022 pula Indonesia memegang Keketuaan ASEAN. Kunjungan Perdamaian Presiden Jokowi ke Ukraina dan Rusia mendapat apresiasi positif. Meski resesi global menggelayuti dunia, yang oleh Bank Dunia & International Monetary Fund (IMF) diperkirakan perekonomian di 60 negara berpotensi mengalami resesi global, Indonesia merupakan salah satu negara yang diperkirakan akan aman dari resesi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 5%. Pada Triwulan III 2022, ekonomi Indonesia tumbuh 5.72.

Namun demikian, Indonesia tidak boleh lengah sama sekali. Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, sejak pandemi Covid-19 merebak telah menegaskan bahwa krisis akibat pandemi tidak akan bisa diatasi dalam jangka pendek. Untuk itulah partai mengeluarkan instruksi menanam 10 pohon yang menjadi pendamping beras sebagai langkah konkret tiga pilar partai.

Demi menyelamatkan perekonomian rakyat dengan instrumen gotongroyong, Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, juga merekomendasikan kepada presiden untuk menyempurnakan social safety net system atau sistem jejaring pengaman sosial, mendorong seluruh menteri yang bertugas menangani kemiskinan saling berkoordinasi. Misalnya, dengan memberi memberi cash transfer, insentif bagi pelaku UMKM yang berhasil dan inovatif, atau insentif bagi sektor-sektor pertanian agar lonjakan kenaikan harga bisa dikendalikan dan tidak memicu inflasi yang membahayakan perekonomian.

Demikian penyampaian pokok-pokok pikiran Fraksi PDI Perjuangan MPR RI sebagai bentuk tanggung jawab moral politik kami kepada bangsa dan negara Indonesia tercinta. □

Jakarta 29 Desember 2022

Pimpinan Fraksi PDI Perjuangan MPR RI

Dr. Ahmad Basarah
Ketua

Dr. Tb Hasanudin
Sekretaris



Superhero Berkarakter Nusantara

Masuknya komik superhero ke Indonesia pada tahun 1930-an menambah semarak perkomikan di tanah air. Superhero dari luar menjadi inspirasi bagi komikus Indonesia untuk mengembangkan karyanya. Memadukan dengan budaya lokal membuat superhero Indonesia memiliki karakter tersendiri, yakni berkarakter lokal, nusantara. Ada bahasa Jawa dalam tutur kisah. Karya yang diterbitkan sukses di pasar. Diangkat di layar lebar juga mendapat respon yang baik dari masyarakat.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

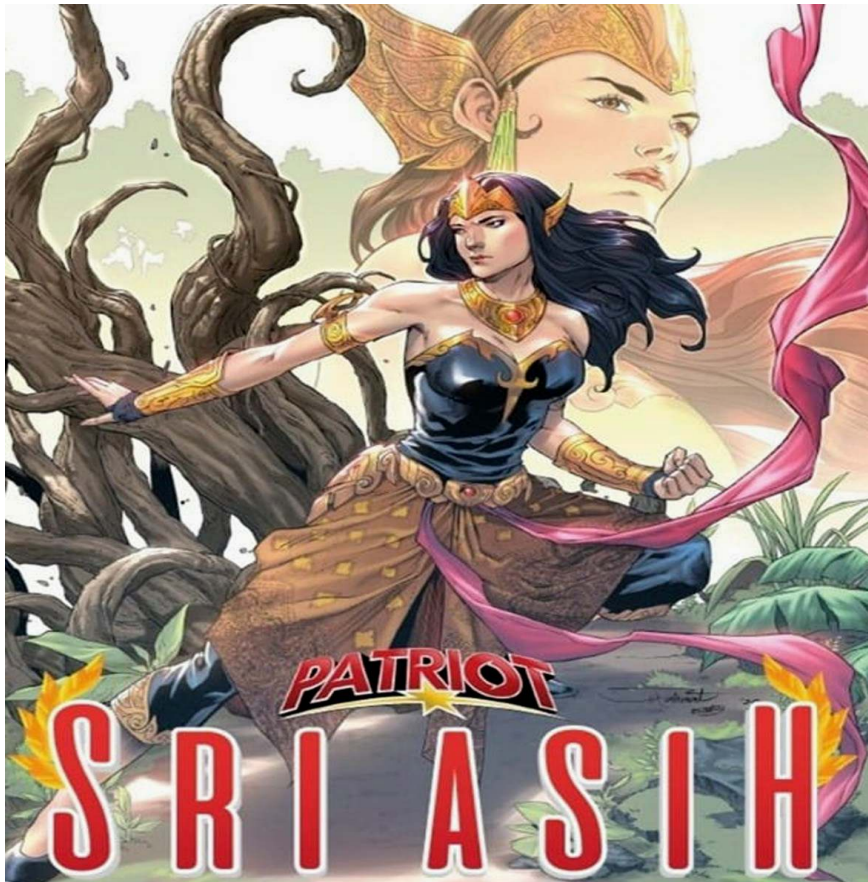


FOTO-FOTO: ISTIMEWA

TERTANGGAL 19 Desember 2022, di CGV, terlihat beberapa film tayang di sana. Film yang tayang di bioskop elit itu, seperti *KKN Di Desa Penari*, *Avatar*, *Like & Share*, *Qorin*, *Decibel*, *Keramat*, dan *Sri Asih*. Di antara film tersebut *Avatar* dan *Like & Share* merupakan film yang masih segar. Sementara yang lain bisa dikatakan sudah tayang lebih dahulu dan bisa bertahan.

Sri Asih yang tayang sejak 17 November 2022 masih bisa bertahan di sana. Film yang dibintangi oleh artis cantik, Pevita Pearce, menurut catatan *Wikipedia*, pada hari pertama tayang, 17 November 2022, mampu meraup penonton sebanyak 82.031 orang. Dan, pada 7 Desember 2022 tercatat ada 570.619 orang menonton film yang berdurasi sepanjang 135 menit itu.

Antusiasme masyarakat untuk menonton film *superhero* dari Indonesia menunjukkan bahwa *Sri Asih* merupakan tontonan yang dinanti-nanti oleh masyarakat. Bila demikian,

sekuel dan film-film sejenis akan terus diproduksi sehingga akan menumbuhkan dampak positif perfilman di tanah air.

Film *Sri Asih* merupakan kisah pembasmian kejahatan. Sebelum bisa ditonton di layar lebar, masyarakat terutama di tahun 1950-an hingga 1980-an, bisa menikmati kisah tersebut di komik-komik yang tersebar di berbagai toko dan persewaan buku di berbagai daerah. Kisah diciptakan oleh Raden Ahmad Kosasih atau lebih dikenal sebagai RA Kosasih. RA Kosasih merupakan pria yang lahir di Bogor, Jawa Barat, pada 4 April 1919. Dia adalah seorang penulis dan penggambar komik terkenal pada masanya, dan namanya abadi hingga saat ini.

Sebagai orang yang menekuni dunia cerita bergambar, banyak serial yang ia ciptakan. Selain *Sri Asih* juga ada, *Siti Gahara*, *Ramayana*, dan *Mahabharata*. Dari sekian komik yang dibuat, *Sri Asih* mendapat catatan tersendiri dari masyarakat perkomikan di Indonesia. Kisah *Sri Asih* disebut sebagai

komik *superhero* pertama di Indonesia.

Seiring majunya teknologi cetak, budaya lisan masyarakat secara perlahan beralih ke media cetak. Lewat media cetak berbagai kabar dan kisah manusia dituangkan dalam bentuk tulisan dan gambar. Agar pembaca tidak bosan dengan berita-berita yang ada, pengelola koran dan majalah yang terbit menyiasati isi media dengan komik, perpaduan tulisan dan gambar yang bertutur kisah. Mingguan *Sin Po* disebut sebagai koran pertama yang menampilkan komik, tahun 1931-an. Komik berjudul *Put On* itu disebut oleh banyak pihak sebagai komik pertama di Indonesia.

Ketika nusantara di bawah kekuasaan Kolonial Belanda, membuat semakin banyak orang Belanda dan Eropa datang ke Indonesia. Mereka datang ke sini, selain untuk mengurus wilayah jajahan juga untuk berbisnis dan menyebarkan paham dan budaya yang mereka anut. Komik yang pada masa itu menjadi gaya hidup masyarakat Belanda, Eropa, dan Dunia, juga mereka angkut ke Indonesia.

Banyak cerita dan kisah dari komik yang mereka bawa lewat kapal laut itu. Di antaranya adalah cerita tentang *superhero*. Menurut catatan yang ada, komik *superhero* masuk ke Indonesia pada tahun 1930-an. Komik-komik *superhero* itu menceritakan sosok-sosok seperti Superman, Phantom, Wonder Woman, dan banyak lainnya.

Kali pertama membaca komik tersebut, masyarakat senang dan gembira. Mereka terhibur dengan kisah dan gambarnya yang menarik. Hadirnya komik tersebut tidak hanya menjadi hiburan baru bagi masyarakat, namun juga menjadi inspirasi bagi komikus di tanah air untuk mengembangkan bakatnya.

Komikus Indonesia berpikir kalau tentang manusia kuat, kebal, perkasa, bahkan bisa terbang, cerita-ceritanya sudah hidup dan ada di tanah air. Sudah ada cerita Gatotkaca yang bisa terbang dan perkasa. Dari inspirasi komik *superhero* seperti *Superman*, *Phantom*, dan *Wonder Woman*, selanjutnya *Batman*, *Thor*, *Aquaman*, kemudian digabungkan dengan budaya-budaya lokal, maka muncullah *superhero-superhero* tanah



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

air, seperti *Gundala*, *Godam*, *Sri Asih*, *Aquanus*, *Kalong*, dan lain sebagainya.

Meski saat itu berkembang komik yang dipengaruhi oleh komik dari luar, namun kisah-kisah komik yang tetap bertahan dengan budaya lokal juga masih bertahan bahkan juga sangat digemari. Lihat saja komik tentang Pandji Tengkorak, Walet Merah, Jaka

Sembung, Bajing Ireng, dan Si Buta dari Goa Hantu, yang sampai saat ini masih banyak diminati.

Dalam *nokenstudio.com*, 24 April 2018, diungkap pembeda antara *superhero* Indonesia dan Amerika adalah pada asal-mula kekuatan yang mereka dapatkan. Studio-studio Marvel dan DC cenderung



menggunakan aspek-aspek sains dan teknologi di dalam cerita-ceritanya sehingga aroma Science Fiction – Sains Fiksi— begitu kuat menghiasi cerita-ceritanya. Aspek ini membuat seolah-olah kemunculan kekuatan pada karakter pahlawan ciptaan mereka tampak begitu logis dan jelas.

Sedang para komikus lokal cenderung menggunakan aspek mistis pada tokoh-tokoh pahlawan super rekaan mereka. Perbedaan tersebut sebenarnya tidak terlepas dari perbedaan keadaan dan latar belakang Indonesia dan Amerika dalam hal kemajuan sains dan teknologi. Indonesia yang belum mencapai titik itu, pada akhirnya membuat para komikus lebih banyak menggunakan pendekatan mistis dibanding ilmiah pada cerita-cerita mereka.

Dalam *web* itu mengakui, para *superhero* Indonesia memang dipengaruhi gaya Amerika, terutama dari studio DC dan Marvel. Iwan Gunawan mengungkapkan bahwa pengaruh kuat Marvel dan DC tampak jelas pada template desain para tokoh *superhero* Indonesia ketika itu, meskipun demikian bukan berarti *superhero* Indonesia tidak memiliki karakter sendiri.

Gundala dan *Godam*, dua *superhero*, dikisahkan dengan latar belakang Kota Yogyakarta. Dialog-dialognya pun merepresentasikan kehidupan sehari-hari di kota itu. Penggunaan latar semacam itu tampaknya membuat komik *Gundala* cukup sukses di pasaran (*nokenstudio.com*).

Dalam *kumparan.com*, 18 Agustus 2020, dikatakan pada tahun 1950-an, komikus lokal mulai mencoba membuat komik *superhero* dengan kearifan lokal. Karya pertamanya adalah *Sri Asih*. *Sri Asih* adalah hasil gabungan konsep lokal dan Amerika. Konsep lokal diwakili lewat penokohan yang menyerupai wayang golek dan konsep Amerika diwakili lewat storytelling-nya.

Sukses *Sri Asih* di pasar membuat komikus Indonesia selanjutnya melakukan hal yang sama. Selanjutnya muncul *Gundala*, *Godam*, *Labah-labah Merah*, *Virgo*, *Rama: Superman Indonesia*, *Darna*, dan banyak yang lainnya. □

AWGI dari berbagai sumber

Para Hero yang Super dari Indonesia

Banyak tokoh *superhero* ciptaan komikus Indonesia yang beredar di pasar sejak tahun 1950-an. Di antara mereka masih akrab dan hidup di tengah masyarakat. Kisah-kisah mereka berulang kali diangkat ke layar lebar. Mereka hadir terinspirasi dari komik produk Marvel Comics dan DC Comics. Berikut beberapa tokoh *superhero* yang lahir di Indonesia. Komikus dari Yogyakarta paling produktif menciptakan *superhero*.

Gundala

Gundala merupakan sosok *superhero* ciptaan Harya Suryaminata atau yang lebih sering disebut Hasmi. Hasmi lahir pada 25 Desember 1946. Gundala kali pertama muncul di tengah masyarakat pada tahun 1969 dengan judul komik, *Gundala Putra Petir*. Disebut dalam salah satu sumber berita, Hasmi membuat sosok itu terinspirasi dari tokoh cerita dari Jawa, yakni Ki Ageng Selo. Ageng Selo merupakan sosok sakti yang bisa menangkap petir dengan tangannya. Petir yang bahasa jawanya *gundolo* inilah yang selanjutnya disematkan pada nama tokoh yang dibuat, Gundala.

Hasmi mampu memadukan antara cerita yang diambil dari lokal dengan bentuk rupa pakaian Gundala yang terinspirasi dari *superhero* luar, yakni Flash.

Dalam *Wikipedia* diungkap siapa sosok Gundala. Diceritakan, Sancaka merupakan ilmuwan yang tengah melakukan penelitian untuk menciptakan serum anti petir. Ia tenggelam dalam ambisi sebagai seorang ilmuwan. Akibat sibuk di laboratorium membuat dirinya lupa hari ulang tahun kekasihnya, Minarti. Kondisi yang demikian membuat hubungan mereka tak harmonis sehingga Minarti meminta menyudahi hubungan itu.

Diputus oleh Minarti membuat Sancaka patah hati sehingga dalam suasana kalut dan emosi, hatinya kacau sehingga ia berlari di jalan yang tengah hujan deras. Saat derasnya hujan yang mengguyur tubuhnya, sekelebat petir menghujam badannya. Petir itu membuat ia tak sadar sehingga kekuatan dari dunia lain menarik dirinya. Rupanya kekuatan dunia lain itu adalah Kaisar Kronz. Ia adalah Raja Kerajaan Petir. Sebagai anak angkat raja



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

petir maka Sancaka, Gundala, diberi kekuatan yang mampu memancarkan petir dari telapak tangannya. Kekuatan lainnya adalah mampu berlari secepat *hypersonic*. Dari kekuatan yang dimiliki, ia membasmi kejahatan di dunia.

Godam

Godam merupakan sosok *superhero* yang modelnya mirip Thor, *superhero* dari Amerika. Godam merupakan ciptaan Widodo Noor Slamet atau yang lebih sering ditulis dengan





Wid NS. Wid NS lahir pada 22 November 1938.

Godam muncul pertama kali pada tahun 1969 dalam kisah *Memburu Doktor Setan*. Seperti *superhero* lainnya, Godam tercipta karena ada unsur dunia lain yang merasuk padanya. Ia merupakan putra bangsawan dari negeri yang disebut Godam. Orangtuanya menjadi musuh dari Ratu Candalani. Candalani merupakan sosok yang kejam dan bengis. Bersama dengan orangtuanya, Godam diburu si ratu. Dalam persembunyian itu, dirinya mendapat benda-benda sakti seperti baju yang bisa membuat ia menjadi manusia super dan kebal. Tak hanya itu, jubah yang dimiliki bisa membuat terbang.

Wid NS menampilkan Roh Doktor Setan sebagai musuh bebuyutan Godam. Kisah pertarungan Godam dengan Roh Doktor Setan bisa diikuti dalam cerita yang berjudul *Mencari Jejak Mayat*, *Sinar Mata-X*, dan *Panik*.

Sri Asih

Sri Asih ciptaan Raden Ahmad Kosasih atau yang lebih sering disebut dengan RA Kosasih. Sri Asih merupakan komik *superhero* generasi pertama di Indonesia. RA Kosasih mengungkapkan, Sri Asih adalah seorang perempuan yang bernama Nani Wijaya. Ia merupakan perempuan terpendang dan bekerja sebagai investigator atau detektif swasta. Sebagai seorang detektif, Nani Wijaya kerap bertugas ke berbagai tempat untuk menghentikan kejahatan. Sebagai titisan Dewi Asih, Dewi Keadilan, Sri Asih terhubung dengan para leluhur. Kekuatan leluhur itu merasuk ke dalam tubuh Sri Asih sehingga dirinya mempunyai kekuatan yang super.

Kisah *superhero* perempuan itu sepek terjangnya bisa dinikmati dalam berbagai kisah seperti dalam *Sri Asih vs Si Mata Seribu*, *Sri Asih vs Komplotan Kawa-Kawa*, *Sri Asih vs Gerombolan*, *Sri Asih vs Serigala Hitam*, dan *Sri Asih dan Bajak Laut*.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Pangeran Mlaar

Hasmi dalam menciptakan sosok *superhero* di dunia perkomikan Indonesia tidak hanya Gundala. Pangeran Mlaar juga ciptakannya. Sosok yang ke-*superhero*-annya terinspirasi dari sosok *superhero Fantastic Four*, komik Amerika, itu kali pertama muncul dalam cerita Gundala dalam judul *Planet Covox*. Judul ini terbit pada tahun 1969. Kehebatan Pangeran Mlaar adalah, tubuhnya elastis seperti karet yang bisa memanjang semau dia. Dalam tubuh yang demikian tersimpan kekuatan yang dahsyat.

Meski kali pertama hadir di tengah cerita Gundala, namun dirinya juga punya serial tersendiri, seperti *Pangeran Mlaar*, *Kubu Antariksa Di Angkasa Luar*, *Penjara Di Langit*, *Rampok*, *Melawan Taring Emas*, *Rodan*, dan *Gladiator Dari Mars (Raf)*.

Aquanus

Wid NS menciptakan komik *superhero* tidak hanya Godam. Dirinya juga membuat Aquanus. Dibaca dari namanya, terlihat bahwa sosok ini merupakan sosok super yang berlatar dengan air. Sosok ini bisa jadi terinspirasi dari sosok komik dari DC Comic yang bernama Aquaman.

Aquanus kali pertama muncul pada tahun 1968 dalam kisah yang berjudul *Planet Vibhy*. Dalam *Wikipedia* diceritakan, asal usul Aquanus. Saat terjadi penyerangan bangsa Burbur ke planet Zyba, putra angkat Raja Sving yang masih bayi dilarikan dengan sebuah roket ke luar angkasa. Raket tersebut jatuh ke lautan. Keluarga pemburu paus menemukan anak itu dan memeliharanya. Ia diberi nama Dhanus. Bangsa Zyba sendiri adalah bangsa yang mampu hidup di darat dan di air sehingga Dhanus dapat dengan mudah bermain-main



ke dasar lautan.

Lebih lanjut dalam *web* itu diceritakan, suatu ketika saat menyelam di dasar laut seseorang yang mengaku berasal dari Zyba menolongnya dari serangan gurita raksasa. Namun, penolong itu mati ditembak oleh gerombolan orang. Sebelum sang penolong menghembuskan nafas terakhir, ia memberikan sabuk sinar pelangi kepada Dhanus. Sabuk itulah yang membuat Dhanus menjadi manusia super.

Kalong

Hasmi merupakan pencipta komik *superhero* yang produktif. Selain Gundala dan Pangeran Mlaar, ia juga membuat Kalong. Kalong muncul pertama kali pada tahun 1972 dalam kisah *Kalong Anak Kelelawar*. Dalam *duniagames.co.id*, ia disebut mirip Batman versi cilik.

Sebagai *superhero*, Kalong memiliki kemampuan dapat terbang, kebal senjata, dan dari tangannya bisa mengeluarkan sinar. Sinar tersebut bila mengenai hewan akan membuat hewan itu mampu mengerti dan berbicara dengan dirinya.

Sumber lain menceritakan, Kalong adalah Agus Supriyadi. Agus ingin sekali ikut ayahnya, Profesor Isman Surasa Darmaputra yang hendak melakukan ekspedisi ke Gunung Dieng. Ayahnya tidak membolehkan, namun dirinya tetap ikut dengan cara bersembunyi di peti yang dibawa rombongan. Ayahnya tahu setelah tiba di lokasi Gunung Dieng.

Saat di sana, ayahnya disekap oleh komplotan yang ikut dalam rombongan itu. Agus pun hendak disekap. Ia menyelamatkan diri berlari menjauh. Dalam pelarian dia terperosok ke jurang yang dalam. Setelah sadar dari pingsan, ia berjalan entah ke mana hingga menemukan gua. Di gua itu berjumpa dengan manusia kelelawar yang masuk dalam Kerajaan Laksa Bantala yang dipimpin oleh Raja Xamfereet. Raja selanjutnya memberinya benda yang bila ditempelkan di kening akan mengubah dirinya menjadi manusia super. Kekuatan itulah yang membebaskan ayahnya dari sekapan para gerombolan yang ingin merampok. □

AWG/dari berbagai sumber



FOTO-FOTO: ISTIMEWA





Genre Superhero Dianggap Kebarat-baratan

BANGSA Indonesia merupakan bangsa yang mudah menyerap berbagai budaya bangsa dunia, termasuk dalam hal komik. Masuknya komik asing yang menyuguhkan superhero menjadi inspirasi bagi komikus dalam negeri untuk menciptakan hal serupa. Banyak kesamaan, namun mereka mampu memodifikasi sang tokoh, dialog, dan cerita, sehingga melahirkan superhero baru. Terkait dengan hal tersebut, Majalah Majelis melakukan wawancara dengan Iwan Gunawan.

Pria kelahiran Jakarta, 5 September 1963, itu menyelesaikan Sarjana Desain Komunikasi Visual Institut Kesenian Jakarta (IKJ) dan Doktor Sejarah Universitas Indonesia. Ia mengajar sejarah seni Populer serta Seni Urban di IKJ. Mengelola dan menjadi peneliti di Pusat Kajian Naratif Visual, Rumah Cerita Gambar, direktur program Sekuen dialog dan Dewan Redaksi Internasional IJOCA (International Journal of Comic Art



Iwan Gunawan

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Sejarah komik superhero di Indonesia kapan dimulai?

Komik *superhero* masuk ke Indonesia melalui media majalah yang diterbitkan Belanda sekitar tahun 1930-an, dengan tokoh Superman, Phantom, Wonder Woman. Karakter *superhero* tersebut menginspirasi penerbit dan komikus Indonesia untuk menciptakan tokoh mereka sendiri. Tercatat R.A. Kosasih dan John Lo menciptakan tokoh *superhero* pertama yang kebetulan wanita. R.A. Kosasih menciptakan Sri Asih, John Lo menciptakan Puteri Bintang. Keduanya diterbitkan penerbit Melodie di Bandung, sekitar tahun 1954. Tahun ini bisa dikatakan sebagai gelombang awal *booming* komik Indonesia yang juga disebut sebagai Cergam. Diawali dengan genre *superhero* dilanjutkan dengan Wayang, cerita rakyat, lalu Roman dan Silat. Tahun 1960-an awal, genre *superhero* dianggap kebarat-baratan

oleh kelompok Lekra dan pemerintah, sehingga penerbit menerbitkan genre yang bernuansa “lokal,” seperti Wayang dan Cerita Rakyat. Kemunculan genre *superhero* berikutnya di masa Orde Baru, sekitar tahun 1968 dipelopori oleh Hasmi dan Wid NS yang menciptakan beberapa tokoh baru dan diikuti oleh komikus lain karena keberhasilan mereka.

Sepertinya komikus Indonesia dalam menciptakan komik superhero ‘meniru’ komikus dari Amerika, Marvel, seperti Gundala mirip Flash, Godam mirip Thor, dan banyak lagi lainnya, apakah benar tuduhan itu?

Jika berbicara tentang *superhero* tidak bisa terlepas dari proses “peniruan”. Dalam konteks “budaya populer” hal tersebut biasa terjadi di musik, di film, termasuk komik. Bukan hanya Indonesia, seluruh dunia pun terpengaruh pada genre *superhero* ini. Kita bisa mendeteksi misalnya, banyak sekali *superhero* bertitel “Captain” seperti Captain

America di berbagai negara dunia. Ada Captain Italy, Captain Mexico, dan Kapten Indonesia. Betapa banyak tokoh bermantel dan atau berpakaian spandex serta bertopeng yang merujuk pada tampilan superman atau batman, dengan super power yang kurang lebih mirip.

Inspirasi utama muncul dari tokoh-tokoh komik *superhero* Amerika yang memulai dengan the Phantom 1936, lalu Superman 1938. Memang ada yang dari segi penampilan maupun kekuatan sangat persis Spiderman misalnya, tapi tidak sedikit juga yang mengadaptasi, membuat “versi”, meniru namun disesuaikan dengan kondisi lokal dan imajinasi baru dari si komikus. Gundala misalnya, kalau diurut penampilan dan kekuatannya, mungkin terinspirasi oleh Flash yang bisa bergerak cepat dan Thor dari segi kekuatan petir dan sayap di kepalanya. Godam dari segi kekuatan mirip Superman, namun baju Zirah yang dipakainya mungkin

terinspirasi oleh Thor.

Cerita asal usul Godam pun ada kemiripan dengan Shazam. Namun Hasmi, pencipta Gundala dan Wid NS, pencipta Godam, cukup baik dalam memodifikasi sehingga peniruan tersebut tidak terlalu terasa. Ditambah lagi dengan dialog dan alur cerita yang terasa sekali ke-Indonesiaan (atau ke-Jawaan) nya.

Apakah komikus di Indonesia mengikuti selera pasar bukan untuk menciptakan budaya baru?

Mengenai “selera pasar” sebagian besar produk kebudayaan populer, termasuk komik pasti akan mempertimbangkan “pasar” agar komiknya bisa diterima masyarakat luas. Hal itu juga yang menyebabkan industri komik lokal turut serta membuat karakter *superhero* (tren yang sudah mendunia), agar bisa ikut disukai dan dibeli oleh banyak orang. Dari segi budaya, dalam banyak komik Indonesia, diciptakan dengan mempertimbangkan kebudayaan yang sudah lama tumbuh di Indonesia, seperti Wayang, Legenda, Sejarah, Silat. Bahkan, budaya urban kontemporer yang lokal pun ada, mengangkat permasalahan khas lokal. Ada yang mencampurkan genre *superhero* dengan fenomena horor lokal misalnya.

Jadi, permasalahan yang penting adalah bagaimana ketika mengikuti selera pasar, kita juga melakukan kreasi yang memiliki karakteristik khusus. Seperti jawaban saya di poin sebelumnya, Gundala dan Godam, walaupun mengikuti tren *Superhero* yang global, namun mereka termasuk yang bisa memunculkan karakter lokal.

Saat diangkat ke layar lebar, kenapa film superhero Indonesia tak seheboh film produk Marvel, seperti Spiderman, padahal lahir pada era yang sama. Begitu juga Sri Asih tak seramai Wonder Woman?

Sangat wajar bila kita tak bisa mengejar kesuksesan film Marvel atau DC yang sudah lebih lama memproduksi film-film *superhero*. Di samping secara umum, film Hollywood memang dari segi teknologi dan kualitas produksi lebih maju dari film Indonesia. Terlebih lagi film bergenre *superhero* yang

ceritanya menuntut special effect, menuntut CGI yang canggih. Dari segi cerita pun komik-komik Amerika sudah memiliki tabungan narasi yang sangat banyak.

Ketika menjadi film, semua narasi tersebut bisa diadaptasi menjadi film. Juga, cerita-cerita tersebut sudah lebih tertanam di penonton penggemar komik Amerika yang sejak tahun 1930-an tidak berhenti diterbitkan. Sri Asih sempat populer sejak 1954 hingga 1960-an saja. Saat ini hanya dikenal oleh para pemerhati khusus (sejarah) komik Indonesia. Produser komik dan film Sri Asih harus bekerja keras untuk sebelumnya mengenalkan Sri Asih pada penonton Indonesia agar film Sri Asih bisa lebih diterima (terlepas dari



permasalahan kualitas film).

Tintin karya Herge merupakan komik yang abadi yang terus dicetak, apakah komik Indonesia ada yang seperti itu?

Komik wayang karya R.A. Kosasih, seperti Mahabharata dan Bharatayudha, merupakan komik Indonesia yang paling banyak dicetak ulang sejak awal diterbitkan, yaitu tahun 1955. Judul tersebut berulang-ulang diterbitkan Melodi hingga awal tahun 1970-an. Ketika Melodi tutup, judul komik tersebut digambar dan ditulis ulang oleh RA Kosasih untuk penerbit Maranatha yang melanjutkan tradisi penerbitan komik Wayang. Hingga kini Mahabharata dan Bharatayudha RA Kosasih masih dicetak

ulang, bisa didapat di marketplace online atau di toko buku Erlina Bandung. Demikian juga versi Melodi yang pada sekitar tahun 2010 dicetak ulang oleh Anjaya Komik dalam format lux, jilid hardcover.

Perkembangan teknologi telah membuat komik mati, benarkah demikian?

Tidak tepat demikian. Dalam pengertian buku komik cetak mungkin benar. Bukan hanya komik, tapi media cetak lain pun terkena dampak perkembangan teknologi media digital. Sudah banyak media cetak yang tutup karena pembaca lebih memilih untuk membaca di layar gadget. Komik sebagai teknik membaca konten masuk ke dalam platform-platform digital tersebut mengikuti pola baca pembaca masa kini.

Sebagian pembaca konvensional masih menginginkan membaca komik dalam bentuk cetakan. Mungkin penerbit yang masih ingin memproduksi lebih memerhatikan kualitas cetakan serta inovasi dari komik cetakan tersebut, seperti memilih kertas yang baik, format yang nyaman dibaca, penjiilidan kuat, atau ada inovasi dalam desain buku itu sendiri sehingga buku tersebut lebih layak untuk dimiliki secara fisik (dikoleksi) bukan sekedar untuk dibaca.

Saat ini di Indonesia sudah tak lahir komikus-komikus seperti pada tahun 1950 hingga 1970-an, mengapa itu bisa terjadi?

Pendapat ini tidak benar, walaupun industri (buku) Komik Indonesia lesu di antara tahun 1980 -1990-an, komikus lokal tetap hadir, mengisi majalah dan koran, penerbitan Indie dan lain-lain. Komikus seperti Teguh Santosa dan Jan Mintaraga masih menciptakan komik bersambung di majalah, seperti Hai atau Anand. Sebagai contoh, dua komikus yang muncul di saat kelesuan komik Indonesia kemudian adalah Benny Rachmadi dan Muhammad “Mice” Misrad, yang rutin mengisi Kompas Minggu dan buku-buku komiknya terjual dalam oplah yang sangat tinggi. Tahun 2000-an dan selanjutnya merupakan era dimulainya komik-komik lokal muncul dan menjadi populer lagi. □

AWGI dari berbagai sumber

Bachtiar M. Yunus

Kades Bongo Gorontalo

Bea Siswa untuk Anak Tak Mampu Harus Ditingkatkan

BANYAK sekali anak-anak desa yang pintar tapi orang tuanya tidak punya kemampuan untuk melanjutkan sekolah anak-anaknya ke jenjang pendidikan tinggi. Ini menurut saya sangat disayangkan.

Memang ada program bantuan pendidikan, tapi tak banyak menyentuh pelosok desa yang terpencil. Uluran tangan sosok-sosok mulia memberikan bantuan beasiswa untuk mahasiswa tidak mampu, seperti Bapak Fadel Muhammad yang memberikan bantuan beasiswa untuk anak-anak Gorontalo, sangat kami dukung.

Beliau turun tangan langsung. Bayangkan jika banyak tokoh seperti beliau maka anak-anak tak mampu akan memiliki kesempatan memperbaiki kondisinya.

Kami berharap, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar program beasiswa diperbanyak dan dipermudah sehingga makin banyak anak-anak miskin yang terbantu menikmati pendidikan yang berkualitas untuk masa depan mereka. □

DER



Aditya Primayudha

Kepala Humas Universitas Pakuan

Apresiasi Kegiatan Kehumasan di Kampus



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

MEWAKILI Rektor Universitas Pakuan Bogor, saya menyampaikan apresiasi yang dalam kepada Humas Setjen MPR yang telah mengadakan acara Kehumasan dengan tagline yang sangat catchy dan sangat bagus ya 'Menyapa Sahabat Kebangsaan'.

Intinya, mahasiswa adalah sahabatnya MPR RI, sebuah lembaga negara yang sangat terhormat. Kegiatan ini sangat diperlukan mahasiswa, sehingga diharapkan mahasiswa akan bertambah wawasan pengetahuannya tentang Setjen MPR dan MPR secara keseluruhan.

Dalam kegiatan ini juga ada sesi pemaparan materi tentang kebangsaan, itu juga sangat penting untuk mahasiswa. Kami berharap, kegiatan penambahan wawasan pengetahuan mahasiswa terhadap nilai-nilai kebangsaan terus diberlangsungkan dan diperkaya lagi.

Saya harap keberlangsungan kegiatan edukasi untuk menambah wawasan pengetahuan mahasiswa tentang lembaga negara perlu dijaga intensitasnya. Bahkan lebih diperluas lagi atau diperbanyak dengan materi-materi atau agenda acara yang akrab dengan anak-anak muda, sehingga materi soal kebangsaan bisa langsung dipahami generasi milenials. □

DER

Yulianti, Relawan Dompot Duafa

Menolonglah, **Maka** Kamu Akan *di Tolong Orang lain*



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

SELAIN memenuhi kebutuhan keluarga, orangtua juga memiliki kewajiban membimbing, membombong, serta membimbing, anak-anaknya. Termasuk memberikan nasihat kehidupan. Agar si anak tidak sekedar menguasai ilmu yang diajarkan di bangku sekolah. Karena bimbingan dan nasihat orangtua kepada anak bisa memiliki makna yang sangat dalam, tidak kalah dari ilmu yang disampaikan di kelas.

Inilah pelajaran yang bisa dipetik dari lika-liku kehidupan seorang Yulianti (26), salah seorang relawan di Lembaga Pengembangan Insani Dompot Duafa. Kiprahnya di Dompot Duafa yang dia lakukan tak lepas dari nasihat serta keyakinan orangtuanya. Suatu hari orangtua Yulianti memberi nasihat agar anaknya itu tak segan menolong orang lain. Karena sesungguhnya, pertolongan yang diberikan itu akan mendatangkan pertolongan dari orang lain kepada dirinya, saat membutuhkan.

“Tanpa diharap-harap pertolongan orang lain itu pasti akan datang, jika kita senang membantu orang lain yang tengah berada dalam musibah,” kata lajang kelahiran Serang, 7 Juli 1996, kepada Majalah *Majelis*, saat ia berada di Kampung Cario, Desa

Mangunkerta, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, di tengah perispanya kembali ke Jakarta setelah memberikan bantuan psikologi pasca gempa dan longsor beberapa waktu lalu.

Pada peristiwa gempa bumi dan tanah longsor di Cianjur yang memakan ratusan korban meninggal, Yulianti terjun bersama 10 temannya. Selama satu minggu, dalam

program Respon Darurat Pendidikan, Yulianti memberikan pendampingan psikologis, baik kepada lembaga pendidikan maupun keluarga para penyintas.

Meski tidak banyak diketahui orang lain, kerja-kerja yang dilakukan Yuli, panggilan sehari-harinya, bersama sejawatnya, ternyata banyak membantu warga penyintas. Karena, bencana alam itu





menyebabkan stress dan tekanan hidup makin besar. Banyak anak-anak yang murung sehari-hari. Juga orang dewasa yang bingung, karena kehilangan rumah dan lapangan kerja sehari-hari.

“Butuh waktu lama dan pertemuan intensif untuk membantu anak-anak korban bencana alam bisa mengeluarkan ekspresinya. Juga para orangtua yang mengalami tekanan batin, mereka butuh perhatian sehingga mau menyampaikan keresahan hatinya,” ungkap Yuli.

Bencana Cianjur adalah kali kedua Yuli ikut terjun langsung membantu menangani dan mendampingi kejiwaan para penyintas bencana. Sebelumnya, pada akhir 2021, anak kedua dari tiga bersaudara pasangan Sayuti dan Mainah (alm) ini sudah pernah turun membantu korban erupsi gunung Gunung Semeru. Seperti halnya pada bencana Cianjur, korban erupsi juga membutuhkan waktu yang lama agar bisa kembali normal seperti sediakala.

Yang mengesankan, Yuli sempat melihat dengan mata kepala sendiri erupsi susulan yang terjadi di Semeru. Ia juga menyaksikan bagaimana reaksi ketakutan warga menghadapi erupsi, mereka berlari tunggang langgang menyelamatkan diri. Sementara Yuli berusaha menenangkan agar warga tidak panik yang hanya akan menimbulkan kerugian tersendiri.

“Saya suka terharu ketika hendak berpisah. Mereka sangat menghargai perlungan yang kami berikan, sehingga sangat berat melepas kepergian kami, dan sebagian anak bahkan ada yang memeluk karena tidak ingin berpisah,” terang Yuli.

Kalau Memang Jodoh

Yuli sendiri bergabung dengan Dompot Duafa di Institute Kemandirian, sebagai Pendamping Pemberdayaan Masyarakat sejak 2019. Saat itu, secara tidak sengaja



ia mendapati rekrutmen di salah satu lembaga filantropi terdepan di Indonesia itu. Setelah menyampaikan lamaran dan ujian, alumni Sarjana Sosial Prodi Kesejahteraan Sosial UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itupun dinyatakan di terima.

Ia sempat mengerjakan proyek pendampingan masyarakat berupa per-bengkelan dan tata boga. Namun, pekerjaan itu kemudian tersendat karena datangnya Covid-19. Karena kontraknya tidak diperpanjang, Yuli memutuskan meneruskan Pendidikan Magister konsentrasi Pekerja Sosial di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Kalau memang jodoh tak ke mana, itulah ungkapan yang pas untuk menggambarkan hubungan Yuli dengan Dompot Duafa. Selama di Yogya, Yuli bertemu dengan pimpinan DD di sana, dan diminta untuk bergabung menjadi volunteer. Tanpa pikir

panjang, Yuli ikut serta dan mendapat tugas mendampingi korban erupsi Semeru.

“Kami di DD bukan hanya bekerja dan mencari uang, tetapi karena yang dilakukan adalah aksi-aksi kebaikan. Jadi, kami bukan saja mendapat pengalaman tapi juga berbuat kebaikan pada orang lain,” tambah Yuli.

Karena itu, Yuli bertekad akan terus membantu, menolong sesama, melalui aksi-aksi DD selama waktu dan tenaganya dibutuhkan. Karena seluruh kegiatan DD memberi makna kebaikan, baik bagi penerima pertolongan maupun relawan DD sendiri.

“Kita tidak tahu kapan membutuhkan uluran tangan orang lain. Tetapi, kalau kita senantiasa menolong, insya Allah pada saat kita menghadapi kesusahan, ada saja pertolongan Allah yang akan datang melalui tangan-tangan orang baik,” pungkasnya. □

MBO

Pengembangan Sektor UMKM

Lewat Penguatan Budaya dan Kearifan Lokal

Dalam upaya pengembangan sektor UMKM di tanah air, penguatan kearifan lokal dan budaya anak bangsa penting untuk terus dikembangkan secara sistematis.

UPAYA mendorong sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan skala usaha dan kualitas produknya harus konsisten agar dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Pemanfaatan kearifan lokal dan budaya diharapkan dapat memperkuat daya saing.

Dalam keterangan tertulisnya, Rabu (4/2023), Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat menyatakan, perkembangan sektor usaha mikro terus menggeliat beberapa tahun terakhir. "Namun upaya untuk meningkatkan skala usaha itu menjadi lebih luas lagi harus konsisten dilakukan agar mengakselerasi pertumbuhan sektor UMKM nasional," katanya.

Catatan Kementerian Koperasi dan UMKM menyebutkan, meski struktur ekonomi Indonesia masih didominasi usaha mikro sekitar 96%, namun UMKM yang telah masuk ke dalam industri baru sebanyak 6-7% dari keseluruhan. Sedangkan, UMKM yang sudah masuk rantai pasok global baru 4,1%.

Catatan tersebut, menurut Lestari, menunjukkan masih banyak upaya yang harus dilakukan agar sektor usaha mikro yang dominan mampu tumbuh dan berkembang menuju skala usaha yang lebih luas.

Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, masih banyak keunikan yang dimiliki Indonesia dari sisi desain dan jenis produk yang bisa menjadi nilai tambah dari usaha mikro di tanah air agar bisa bersaing dengan produk-produk mancanegara.

Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu mendorong agar peningkatan kapasitas usaha dan keterampilan para pengusaha mikro di tanah air harus dilakukan secara berkesinambungan.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menilai, peluang untuk mendorong sektor



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

UMKM berkembang dan berkontribusi lebih signifikan dalam perekonomian nasional masih terbuka lebar. Karena, ujar Rerie, Indonesia memiliki sumber budaya dan kearifan lokal yang sangat kaya dan tersebar di berbagai daerah di nusantara.

Berbagai usaha mikro tersebut, jelas dia, bisa memanfaatkan dan mengembangkan kearifan lokal dan budaya yang berkembang di daerahnya sebagai salah satu daya tarik produk yang akan dipasarkannya.

Dalam upaya pengembangan sektor UMKM di tanah air, tegas Rerie, penguatan kearifan lokal dan budaya anak bangsa penting untuk terus dikembangkan secara sistematis.

Sehingga, tambahnya, peran nilai-nilai budaya dan kearifan lokal di tanah air tidak hanya memperkuat karakter dan nasionalisme anak bangsa, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. □

Turnamen Catur Piala Ketua MPR RI

Secara Konsisten Diselenggarakan Sejak 2020

Rencananya 11 Maret 2023, MPR RI bekerjasama dengan PB Percasi kembali menggelar Turnamen Catur Indonesia Master Piala Ketua MPR RI. Turnamen Catur Indonesia Master III ini diselenggarakan 11 Maret 2023. Ratusan peserta akan ambil bagian dalam turnamen ini.



KETUA MPR RI sekaligus Ketua Dewan Pembina Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia (PB Percasi) Bambang Soesatyo bersama PB Percasi akan kembali menyelenggarakan Turnamen Catur Indonesia Master III Piala Ketua MPR RI. Turnamen akan diselenggarakan pada 11 Maret 2023, di Gedung Nusantara V MPR RI. Target peserta mencapai ratusan, mulai dari level Grandmaster, Master International, Master Fide, Master Nasional Indonesia, Non Master Indonesia, Pecatur Wanita Indonesia (WGM, WIM, WFM, WNM, dan Non Master

Wanita), serta Pecatur Junior Indonesia (Master dan Non Master).

Sejak tahun 2020, MPR RI konsisten menyelenggarakan Turnamen Catur Piala Ketua MPR RI. Berturut-turut, Indonesia Master I pada Juni 2020, Indonesia Master II pada Juni 2022, dan kali ini Indonesia Master III pada Maret 2023.

“Selain untuk mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan prestasi atlet catur, penyelenggaraan Indonesia Master Piala Ketua MPR RI ini juga untuk memasyarakatkan catur ke berbagai lapisan masyarakat,” ujar Bamsoet usai menerima

pengurus PB Percasi sekaligus panitia Turnamen Catur Indonesia Master III Piala Ketua MPR RI, di Jakarta, Senin (9/1/23).

Pengurus PB Percasi yang hadir, antara lain: Sekretaris Jenderal Henry Hendratno, Komisi Catur Sekolah Hendry Jamal, Bidang Pertandingan dan Perwasitan Agus Subandrijo, dan Bidang Umum Fahmi Jauhari.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, di bawah kepemimpinan Ketua Umum Utut Adianto yang sejak tahun 2017 memimpin PB Percasi, serta pada Agustus 2022 terpilih aklamasi sebagai Presiden Federasi Catur Internasional (FIDE) Zona 3.3 Asia, olahraga catur di Indonesia terus berkembang pesat. Buktinya, pada SEA Games 2019, Indonesia meraih 2 medali emas dari cabang catur. Medali emas dipersembahkan Susanto Megaranto di nomor catur kilat (blitz), dan Medina Aulia dari catur kilat putri. Sedangkan medali perak dipersembahkan Chelsea Sihite dari catur kilat putri.

“Sejak berdiri pada tahun 1948, PB Percasi telah melahirkan banyak sekali International Grand Master (GM) Pria. Mereka, antara lain: GM Herman Suradiradja, GM Cerdas Baru, GM Eddy Handoko, GM Ruben Gunawan, GM Utut Adianto, GM Susanto Megaranto, GM Ardiansyah, dan GM Novendra Priasmoro. Serta dua International Grand Master Wanita, yaitu WGM Irene Kharisma Sukandar, dan WGM Medina Warda Aulia. Upaya melahirkan grandmaster baru terus dilakukan dengan melaksanakan sebanyak mungkin turnamen yang bermutu, salah satunya seperti Indonesia Master Piala Ketua MPR RI,” jelas Bamsoet.

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) dan Ketua Umum Pengurus Besar Keluarga Olahraga Tarung Derajat (PB KODRAT) ini menjelaskan, berbagai prestasi lain dari catur Indonesia juga terlihat dari Tim Olimpiade Catur Indonesia, baik tim putera maupun tim puteri, yang berhasil memperbaiki peringkat



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

secara signifikan pada Olimpiade Catur ke-44 di Chennai, India, 28 Juli-9 Agustus 2022. Tim putri mampu menembus 25 besar dunia dengan menempati peringkat ke-24 dari 162 tim. Sedangkan, tim putra Indonesia menempati posisi ke-34 dunia dari 188 tim.

“Dalam Malaysia Terbuka 2022, GM Novendra Priasmoro tampil sebagai juara, sedangkan Pecatur remaja FM Aditya Bagus Arfan menjuarai catur cepat dan catur kilat. Prestasi lainnya dipersembahkan Woman Grandmaster Irene Kharisma Sukandar yang

berhasil mencetak sejarah dengan menjadi pecatur wanita pertama yang memenangkan turnamen UAE 50th National Day Rapid Chess 2021, yang diselenggarakan di Dubai Chess Club, Uni Emirat Arab pada 1-2 Desember 2021,” pungkas Bamsuet. □

Harga Pangan Global Melonjak

Syarief Hasan: Prioritaskan alokasi Fiskal untuk Pertanian

Potensi dan kelimpahan sumber daya yang kita miliki jangan sampai menjadi perangkap keterpurukan.

WAKIL Ketua MPR, Syarief Hasan, meminta pemerintah untuk memitigasi kenaikan harga pangan global yang mencapai rekor tertinggi sepanjang tahun 2022. Organisasi Pangan Dunia (FAO) pada Januari 2023 merilis indeks pangan dunia mencapai titik tertinggi, sebesar 143,7 poin atau 14,3% lebih tinggi dibandingkan tahun 2021. Ini tentu menjadi peringatan bagi Indonesia, mengingat ketahanan pangan masih menjadi polemik yang tidak juga berkesudahan. Selepas bencana kelangkaan dan kenaikan harga pada beberapa komoditas sepanjang tahun 2022, apa yang disampaikan oleh Badan PBB tersebut perlu disikapi dengan serius.

Sepanjang 2022, menurut Syarief Hasan, kita mengalami kerawanan pangan. Kelangkaan dan kenaikan harga beberapa komoditas pokok rakyat, seperti daging, telur, dan juga minyak goreng masih menyisakan berbagai pertanyaan dalam skema mitigasi dan solusinya. Laporan dari FAO ini perlu menjadi atensi publik, khususnya pemerintah agar mengambil tindakan yang cepat, perlu, dan terarah. “Jangan sampai kita terlambat menyiasati dinamika ketersediaan pangan global yang semakin mengkhawatirkan,” ujar Politisi Senior Partai Demokrat ini.

Syarief Hasan mengingatkan, terganggunya rantai pasok komoditas global sebagai dampak langsung dari perang Rusia – Ukraina juga memengaruhi situasi pangan domestik. Apalagi, mengingat Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa produksi beras nasional mengalami tren penurunan dari



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

tahun ke tahun. Pada 2018, beras tersedia sebanyak 33,94 juta ton, terus menurun menjadi 31,31 juta ton (2019), 31,50 juta ton (2020), dan 31,36 juta ton (2021). Ini tentu harus menjadi catatan, kinerja pangan kian memburuk. Jangan sampai kita mengalami ancaman berganda: kinerja domestik dan ketidakpastian global.

Profesor di Bidang Strategi dan Manajemen Koperasi dan UKM ini berpendapat, pemerintah sebaiknya mereformulasi kebijakan alokasi keuangan. Jangan semua kebijakan harus berbasis pembangunan infrastruktur, namun melupakan ketahanan pangan yang justru merupakan kebutuhan mendasar rakyat.

Narasi pembangunan fisik, kata Syarief Hasan, seharusnya determinan terhadap kapasitas fiskal. Jika pemerintah hanya mengukur keberhasilan pembangunan pada

infrastruktur belaka, tentu cara pandang ini harus dievaluasi. Pembangunan mestinya holistik, proporsional terhadap sektor-sektor strategis yang memang kebutuhan pokok rakyat.

“Sebaiknya pemerintah memprioritaskan alokasi fiskal pada ketahanan komoditas pokok. Peningkatan kuantitas dan kualitas pangan, pemberdayaan petani, dan inovasi teknologi masih belum juga menjadi kebijakan arus utama. Potensi dan kelimpahan sumber daya yang kita miliki jangan sampai menjadi perangkap keterpurukan,” ujar Syarief Hasan.

Osampai kita justru menjadi negara yang terjebak pada kerapuhan pangan. “Kecuali kalau pemerintah bertindak cepat dan terarah maka ancaman kerapuhan pangan ini tidak akan menjadi nyata,” tutup Syarief. □

Manfaatkan Peluang di Sektor Pariwisata

Untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Sejumlah capaian prestasi pariwisata Indonesia di level internasional harus mampu menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Berbagai perbaikan masih diperlukan untuk meningkatkan mutu SDM hingga infrastruktur pariwisata nasional.

BANYAK peluang di sektor pariwisata bisa dimanfaatkan untuk ikut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM) hingga infrastruktur pariwisata harus terus dilakukan untuk memperbesar peluang itu," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Ahad (8/1).

Sejumlah penghargaan dari institusi internasional diberikan pada beberapa destinasi wisata di Indonesia, seperti Bali yang oleh majalah Time ditetapkan sebagai "The Greatest Place 2022" dan "The World's Happiest Holiday Destinations 2022" oleh Club Med Prancis, serta penghargaan sebagai "Best Travel Destinations" untuk Raja Ampat dari majalah Lonely Planet.

Menurut Lestari, pengakuan oleh internasional itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan minat kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun ini.

Apalagi, ungkap Rerie, sapaan akrab Lestari, berdasarkan catatan BPS yang terbit pada Oktober 2022, kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia sudah mencapai 3,92 juta. Sedangkan di sisi ekonomi kreatif, nilai ekspornya sudah mencapai US\$ 24,79 miliar atau meningkat 3,8% dengan nilai tambah sebesar Rp 1,236 triliun.

Dengan pencapaian tersebut, tambah Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, target Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif agar sektor pariwisata dan ekonomi kreatif mampu membuka 4,4 juta lapangan kerja baru pada 2024 harus mampu direalisasikan dengan optimisme yang tinggi.

Untuk mendukung semangat tersebut, tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, pekerjaan rumah yang masih dan harus terus dilakukan adalah konsistensi dalam mening-



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

katkan mutu SDM hingga infrastruktur di daerah-daerah kawasan wisata di tanah air.

Kelengkapan infrastruktur bandara, pelabuhan dan jalan menuju kawasan-kawasan wisata di tanah air, tegas Rerie, harus semakin mempermudah wisatawan dalam menikmati layanan dan keindahan alam Indonesia.

Sejumlah peluang untuk mendatangkan wisatawan dari sejumlah negara potensial, seperti wisatawan Timur Tengah misalnya, ujar Rerie, harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya lewat sejumlah kebijakan dan program wisata yang mampu mendorong minat para wisatawan dari

sejumlah negara.

Program wisata religi bagi umat Budha di dunia dengan destinasi kawasan Candi Borobudur, Jawa Tengah, tambah dia, juga bisa dikembangkan untuk membuka peluang tersebut.

Dengan terbukanya sejumlah peluang yang ada dan dampak ekonomi yang mampu dihasilkan, kata Rerie, signifikan mendorong pertumbuhan,. Maka, sudah selayaknya seluruh pemangku kepentingan sektor Parekraf di tingkat pusat dan daerah bahu-membahu, bekerja sama untuk mewujudkan pariwisata nasional yang tangguh dan kreatif dalam menghadapi setiap perubahan. □



H. Bambang Soesatyo, SE., MBA.

Ketua MPR RI

Pemerataan Jaringan internet dan Konektivitas Digital yang Murah

TRANSFORMASI digital masih menjadi persoalan tidak mudah bagi sejumlah elemen masyarakat. Ketika negara menghendaki semua warga negara segera bertransformasi, negara pun harus mempercepat ketersediaan infrastruktur digital yang mumpuni. Tak kalah pentingnya adalah segera memastikan cakupan jaringan internet menjangkau semua wilayah tanah air.

Upaya pemerintah mengatasi keterlambatan membangun infrastruktur digital sejauh ini patut diapresiasi. Sudah dibangun jaringan kabel serat optik sepanjang 342.000 kilometer di darat dan laut. Ada sembilan satelit telekomunikasi, microwave link, dan jaringan fiber-link untuk mendukung kebutuhan telekomunikasi dan digital.

Tidak kurang dari 500.000 Base Transceiver Stations (BTS) telah dibangun agar sinyal 4G bisa menjangkau berbagai daerah, termasuk daerah terpencil. Pemerintah pun telah meluncurkan operasi komersial sinyal 5G di sembilan kota. Sejak 2019 hingga tahun ini, nilai investasi pemerintah untuk mewujudkan infrastruktur digital sudah Rp75 triliun.

Nilai tambah dari investasi sebesar itu sangat nyata. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), dari 250 juta lebih penduduk Indonesia, jumlah warga pengguna internet pada 2022 sudah mencapai 210 juta orang. Jumlah ini menggambarkan peningkatan sangat

signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Karena pemanfaatan internet juga fokus untuk kegiatan bisnis dan perdagangan, maka jadilah Indonesia dengan perekonomian digital yang pertumbuhannya paling impresif di kawasan Asia Tenggara.

Namun, proses transformasi digital masih menyisakan banyak pekerjaan. Utamanya mempercepat ketersediaan infrastruktur digital yang mumpuni, dan memastikan bahwa cakupan jaringan internet menjangkau semua wilayah tanah air. Dan, tentu saja dengan kualitas jaringan yang dapat diandalkan. Semangat dan targetnya adalah tidak boleh ada warga negara yang minim akses untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Maka, tidaklah berlebihan jika jaringan internet di dalam negeri dapat menjangkau 38 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota dan 83.381 desa.

Hingga saat ini, sebagian komunitas masih mengeluhkan kualitas layanan jaringan internet. Jadi, persoalan dan tantangannya bukan lagi sekadar internet yang menjangkau seluruh wilayah tanah air, melainkan juga kualitas atau kecepatan layanan jaringan itu.

Persoalan lainnya juga dapat dibaca dari Data APJII tahun ini. Disebutkan bahwa baru 210 juta warga yang memiliki akses internet. Berarti, lebih dari 40 juta warga belum memiliki akses atau konektivitas untuk ikut bertransformasi digital. Data ini mengonfirmasi bahwa sekitar 20 ribu desa dari 83.381

ribu desa belum memiliki akses internet. Maka, menjadi kewajiban negara pula untuk memastikan tidak ada warga negara yang tertinggal dalam periode transformasi digital sekarang ini. Kesenjangan digital seperti ini hendaknya tidak ditolerir lagi.

Selain itu, perhatian ekstra juga patut diarahkan pada kebutuhan jaringan internet di sekolah dan kampus, tempat anak-anak dan orang muda menimba ilmu dan bertransformasi guna beradaptasi dengan perubahan zaman. Sejak tahun 2020, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) melaporkan, masih ada puluhan ribu sekolah belum terjangkau jaringan internet dan ribuan sekolah lainnya belum mendapat aliran daya listrik.

Bahkan, masih banyak kampus pada kota-kota besar di Jawa pun menghadapi hambatan karena buruknya kualitas jaringan internet. Hambatan ini hendaknya segera diatasi karena sekolah dan kampus sudah memasuki era digitalisasi pendidikan.

Masalah lain yang juga selalu menjadi gunjingan atau keluhan masyarakat kebanyakan adalah beban biaya untuk bertransformasi digital. Sebagian besar masyarakat mengakses internet dengan keharusan belanja paket data menggunakan perangkat seluler. Dari 210 juta orang pengguna internet, menurut APJII, hanya 14,5 persen konsumen yang mengakses internet melalui atau berlangganan fixed broadband (jaringan pita lebar telekomunikasi) di rumah.

Sedangkan 85 persen lebih dari 210 juta pengguna internet itu harus belanja paket data secara reguler. Tentu saja fakta ini menjelaskan bahwa ada tambahan pengeluaran atau belanja rumah tangga untuk paket data internet. Bagi ibu rumah tangga, tambahan pengeluaran ini praktis tak terelakkan, terutama untuk kebutuhan anak usia sekolah hingga mahasiswa. Tidak ada orang tua yang

rela anak-anaknya gagal bertransformasi di era digital.

Masalah beban biaya bagi masyarakat kebanyakan untuk bertransformasi ini hendaknya juga menjadi perhatian pemerintah dan para praktisi bisnis penyedia jaringan internet atau internet service provider (ISP). Karena menjadi faktor utama dalam digitalisasi, paket data atau kuota internet praktis menjadi kebutuhan rutin setiap orang. Karena berstatus kebutuhan rutin, harga atau tarif kuota internet hendaknya tidak terlalu membebani rumah tangga.

Jangan lupa bahwa masih ada warga miskin. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin per Maret 2022 mencapai 26,16 juta orang atau 9,54 persen dari total penduduk. Pendaftaran per kapita memang dilaporkan terus bertumbuh, tetapi faktor ini belum mampu menghilangkan fakta tentang kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Dua faktor ini hendaknya juga dijadikan acuan dalam merumuskan besaran harga atau tarif internet, yang kini sudah menjadi kebutuhan rutin semua elemen masyarakat.

Fakta bahwa belum semua wilayah tanah air bisa dilayani jaringan pita lebar telekomunikasi hendaknya dimaknai sebagai tantangan yang harus segera direspons. Memang, sungguh tidak mudah mewujudkan konektivitas digital untuk wilayah seluas Indonesia dengan rangkaian daratan yang mencakup lebih dari 17.000 pulau.

Namun, karena negara-bangsa sudah berkehendak dan berketetapan mendorong semua warga negara segera bertransformasi digital seturut perubahan zaman, konektivitas digital berskala nasional harus segera diwujudkan, dengan sebisa mungkin tidak memberi beban berlebih kepada semua rumah tangga.

Maka, negara harus mempercepat ketersediaan infrastruktur digital yang mumpuni, dan segera memastikan cakupan jaringan internet menjangkau semua wilayah tanah air. □

Terima Delegasi Santri MTs Ma'arif Assa'adah I Gresik

Gus Jazil Saya Adalah **Santri** Tetapi Bisa Jadi Pimpinan MPR



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR RI, Dr. H. Jazilul Fawaid, SQ., MA., mengajak generasi muda untuk senantiasa bersemangat dan bercita-cita tinggi. Semangat dan cita-cita tinggi dibutuhkan agar mampu merebut masa depan. Termasuk berani memimpin negara, menjadi bupati, walikota, gubernur, presiden, ataupun anggota DPR. Syaratnya, menurut Jazilul, generasi muda harus mempersiapkan diri dengan baik. Menguasai ilmu pengetahuan, aktif di berbagai organisasi, dan selalu menjalin komunikasi dengan berbagai kalangan.

“Jangan minder dan harus berani bercita-cita setinggi langit. Saya dulu juga dari pondok pesantren dan banyak belajar ilmu agama. Tetapi, saya bisa menjadi anggota DPR dan saat ini duduk sebagai pimpinan MPR. Yang penting semangat pantang menyerah, dan raihlah ilmu setinggi mungkin,” ujar Gus Jazil, sapaan Jazilul Fawaid.

Gus Jazil menyampaikan hal itu di hadapan para santri MTs. Ma'arif Assa'adah 1 Gresik, Jawa Timur, yang Rabu (21/12/2022), berkunjung ke MPR RI. Delegasi MTs. Ma'arif Assa'adah dipimpin oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Moh. Asy'ari, S.Pd. diterima di Gedung Nusantara V Kompleks MPR/DPR.

Dalam pertemuan yang dimoderatori oleh Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga Biro Humas MPR RI, Indro Gutomo, SH., MH., itu, Gus Jazil menyampaikan kiat-kiat untuk mencapai sukses, seperti yang dia perolehnya saat ini. Gus Jazil menceritakan, untuk bisa sukses dia harus kerja keras dan penuh semangat. Termasuk aktif di berbagai organisasi, mulai dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), GP Ansor, hingga Nahdlatul Ulama, dan bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). “Semua saya lakukan sembari kuliah di PTIQ Jakarta,” papar Gus Jazil.

Generasi muda yang saat ini duduk di bangku SLTP-SLTA, kata Gus Jazil, akan menghadapi persaingan yang sangat ketat. Duapuluh tahun yang akan datang, ketika mereka tumbuh dewasa, dunia akan mengalami perubahan sangat besar. Ilmu pengetahuan dan teknologi akan mengubah dunia menjadi serba digital.

Karena itu, kata Gus Jazil, seluruh generasi muda harus belajar dengan tekun. Seperti pesan Imam Syafei bahwa belajar itu harus dilaksanakan seperti seorang ibu yang kehilangan anak tunggalnya. Terus dicari dan tak pernah berhenti. Jangan sampai



semangat belajar itu kalah dengan semangat bermain game.

"Dua puluh tahun lagi, Indonesia akan

menghadapi bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif lebih besar daripada yang tidak produktif. Ini akan

menjadi peluang dan tantangan. Jika saat itu semua pemuda memiliki pengetahuan yang cukup dan lapangan kerja tersedia maka Indonesia akan maju sangat pesat, demikian sebaliknya," ungkap Gus Jazil.

Pada kesempatan itu, Gus Jazil juga menyampaikan materi Sosialisasi Empat Pilar MPR kepada para santri. Menurut pria yang lahir di Pulau Bawean Gresik itu, tugas MPR mengawal Negara dilakukan dengan menyampaikan sosialisasi Empat Pilar.

Bagi bangsa Indonesia, Empat Pilar adalah rukun bernegara, sebagaimana rukun iman dan rukun Islam, yang diyakini dan diamalkan oleh umat Islam. "Kalau Pancasila hilang atau diganti berarti sudah bukan Indonesia. Demikian juga dengan UUD NRI Tahun 1945 yang di dalamnya terdapat Pembukaan. Juga NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika," pungkasnya. □

Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA., Wakil Ketua MPR RI

Kiat Sukses Jadi Santri dan Politisi



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

DIHADAPAN para kiai, ustaz dan ratusan santri Pesantren Baitul Quran Cirata Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Wakil Ketua MPR RI Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA., menyampaikan kiat-kiat sukses sebagai santri yang berprestasi dan berkontribusi tinggi membangun peradaban Negeri. Dimulai dengan terus mengasah sikap peduli dan mensyukuri.

Karenanya, HNW mengajak semua santri untuk hadirkan keprihatinan dan duka mendalam atas rentetan bencana alam yang terjadi di negeri kita, Indonesia. Mulai dari gempa bumi dan tanah longsor di Cianjur, gempa bumi Garut dan Jember, banjir, hingga erupsi gunung Semeru. Hidayat mengingatkan bahwa musibah bisa terjadi di mana saja dan menimpa siapa pun. Di masjid, sekolah, rumah sakit, hingga pondok pesantren dapat terkena imbas dari bencana alam.

“Kita harus mengambil pelajaran dari peristiwa bencana alam ini. Peduli terhadap para korban bencana, membantu mereka dengan apa yang kita bisa, dana, tenaga atau doa. Itu hal yang sangat diperlukan,” ungkap Wakil Ketua MPR RI, Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA., saat berkunjung ke Pondok Pesantren Baitul Qur’an Cirata, Kampung Rawatutut, RT 13/RW 07, Desa Karoya,

Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta, Rabu (7/12/2022).

Hadir pada pertemuan tersebut, pendiri Pondok Pesantren Baitul Qur’an Cirata, Dr. KH. Muslikh Abdul Karim, MA.; Dewan Pembina Yayasan Baitul Qur’an, Ustaz Muhamad Muslikh, LC.; Ketua Yayasan Baitul Qur’an, Ustaz Yasin Hasan, LC.; Pimpinan Ponpes Baitul Qur’an Cirata, Ustad Yusuf Hadi, LC.; serta para ustaz-ustazah, dan para santri Baitul Qur’an.

Tapi, lanjut HNW – sapaan Hidayat Nur Wahid – kita juga harus bersyukur bila pesantren dan santri diselamatkan Allah dari bencana. Karena dengan bersyukur jiwa

para santri diisi dengan ideologi yang positif. “Allah akan menambah dan melipat gandakan nikmat dan karunianya dalam segala bidang kehidupan. Agar itu terwujud, bersyukur hendaknya bukan sekedar lip service maupun pembuka pidato, tapi rasa syukur yang menjadi bagian dari ideologi dan akidah Islam,” kata Hidayat Nur Wahid.

Pada kesempatan itu, Hidayat mengingatkan para santri di Pesantren Baitul Quran agar berorientasi sukses meniti karier dan berkontribusi membangun umat dan negara. Orientasi yang sama, sebagaimana arahan Alquran, dimulai dengan komitmen dan keseriusan untuk terus membaca memperluas wacana, tapi tetap dalam koridor kebenaran dan kemanfaatan. Mengokohkan pribadi-pribadi dengan karakter dan akhlak yang terbaik. Terus mendekatkan diri kepada Allah dzat segala kebaikan dan kebajikan, dengan qiyamullail. Serta berorientasi menyebarluaskan nilai dan laku kebaikan, kebenaran, serta peradaban berkeunggulan. Itulah yang diajarkan oleh Alquran pada surah pertama, kedua, ketiga dan keempat yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Agar para santri penghafal Alquran juga bisa berkontribusi menghadirkan, mengamalkan ajaran Alquran dengan hadirkan kembali pribadi dan generasi unggul, yaitu “khaira ummat,” yang risalah kehidupannya untuk berkolaborasi hadirkan Islam yang rahmatan lil alamin, agar negeri yang mereka diami,





FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

yaitu Indonesia, menjadi baldatun thayyibatun wa Rabbun ghafuur.

HNW juga mengajak para santri penghafal Alquran menjadi teladan kesuksesan dengan menjadikan dinamika ajaran-ajaran Alquran di atas tadi sebagai hal yang bukan hanya dihafalkan, tapi dipraktikkan. Agar ujung terakhir dari ajaran Alquran, yaitu hadirnya ridha Allah dan sukses yang hadirkan kemenangan yang penuh berkah, jauh dari ideologi, apalagi tindakan terorisme, radikalisme, ekstremisme.

Karena ujung akhir dari ajaran Alquran, yaitu ayat ke-3 dari surah al Maidah maupun surah anNashr, sebagaimana diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, bukan hal-hal negatif destruktif. Melainkan hadirnya

sukses dan kemenangan peradaban yang diridhai Allah dan bermanfaat untuk kelangsungan dan kemajuan peradaban umat Manusia. Membaca, menurut anggota Komisi VIII DPR RI, ini adalah peradaban yang membawa keunggulan.

“Dan, dalam konteks Indonesia, kalau semua kiat di atas sudah dilakukan, maka dari pesantren kembali dapat memunculkan pahlawan dan tokoh-tokoh bangsa yang sangat terhormat dan berjasa kepada bangsa dan negara, karena perjuangan mereka bersama tokoh bangsa lainnya, hadirkan Indonesia merdeka dan tetap merdeka menggagalkan skenario kembali penjajahan asing maupun pemberontakan PKI,” ungkap HNW.

Apalagi, fakta di Indonesia sekarang ini, menurut HNW, tidak ada lagi bidang kehidupan dan profesi yang tidak bisa dimasuki alumni pesantren. Ada santri yang jadi presiden, menteri, gubernur, bupati. Ada santri yang jadi Ketua/Pimpinan MPR, MK, dan lembaga negara lainnya. Ada santri mendirikan pesantren atau jadi rektor, pebisnis dll-nya. “Semu itu menunjukkan makin terbuka bagi santri penghafal Alquran dengan spirit positif di atas,” pungkas Hidayat.

Sebelumnya, ketika menyambut kedatangan Wakil Ketua MPR, pendiri Pesantren Baitul Qur’an menyampaikan rasa hormat dan bangga atas kehadiran Hidayat Nur Wahid. Bagi Dr. KH. Muslikh Abdul Karim, MA., HNW adalah santri dan politisi yang patut dicontoh. Menguasai ilmu agama dan sukses terjun di kancah politik. Pernah menjadi Ketua MPR, dan saat ini menjabat Wakil Ketua MPR. Hidayat Nur Wahid mendapatkan suara pemilih, melebihi kebutuhannya untuk menjadi anggota legislatif.

“Tirulah Ustaz Hidayat Nur Wahid, santri yang menguasai ilmu agama, sekolah di Madinah, dan sukses jadi politisi. Dengan meniru jejak beliau, semoga ke depan akan ada banyak santri yang menguasai ilmu agama dan berhasil menjadi politisi yang bermanfaat untuk umat dan mengabdikan untuk negeri,” kata Dr. KH. Muslikh Abdul Karim, MA. □



MBO

Diskusi Mahasiswa Gorontalo

Fadel Muhammad Beri Tips dan Motivasi Meraih Sukses

WAKIL Ketua MPR, Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad, mengungkapkan bahwa mahasiswa sebagai generasi muda saat ini berada dalam fase hidup yang sangat penting dan memiliki peran yang sangat luar biasa, yakni sebagai generasi penerus kepemimpinan bangsa di masa depan.

“Saya sendiri pernah mengalami itu. Selepas kuliah di ITB, bersama kawan-kawan pada tahun 1978 saya membangun perusahaan yang kemudian menjadi sangat besar, yakni PT Bukaka Teknik Utama. Kemudian saya berkarir di politik dan menjadi gubernur pada saat usia saya sekitar 48 atau 49 tahun, kemudian berlanjut menjadi Menteri, anggota DPD RI, dan sekarang Pimpinan MPR RI,” ujar alumni Teknik Fisika ITB tahun 1978 sekaligus peraih penghargaan Mahasiswa Teladan ITB tahun 1975.

Fadel Muhammad mengungkapkan hal itu di hadapan sekitar 100 mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Negeri Gorontalo (HMJ Agrotek FP UNG), peserta acara Sosialisasi Empat Pilar MPR, di aula Kantor Desa Poowo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, Selasa (20/12/2022).

Pimpinan MPR dari Kelompok DPD RI ini selanjutnya menyatakan, semua pencapaian yang diraihinya itu karena kegigihan, kerja keras, dan selalu semangat. “Bahkan, diusia saya menginjak 71 tahun saat ini, semangat saya masih berkobar, apalagi berbicara dan berkiprah untuk kemajuan Gorontalo dan negara Indonesia. Kalian masih muda harusnya lebih bersemangat dari saya untuk mencapai kesuksesan di masa depan,” tambahnya.

Kepada mahasiswa, Fadel Muhammad memberikan beberapa pesan penting sebagai motivasi dan tips sukses. Pertama, *success is a journey not a destination*. Jadi, kesuksesan adalah sebuah perjalanan bukan sebuah tujuan akhir. Kedua, lanjut Fadel Muhammad, dalam menjalani hidup jangan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

sekali-kali takabur. “Tempatkan diri pada posisi yang tepat,” katanya.

Selanjutnya, jangan melewati sunnatullah. dan ikuti hati kecil. Jagalah hati kecil supaya selalu bersih “Rasulullah bersabda, di dalam tubuh kita ada segumpal darah. Jika darah itu baik maka baiklah seluruh tubuh. Segumpal darah itu adalah hati,” ujarnya. Ketiga atau terakhir, pintar-pintarlah

mengatur strategi hidup. Hidup terlalu berharga. Untuk itu, jangan dibiarkan berlalu begitu saja.

Satu lagi yang perlu diperhatikan, tambah Fadel Muhammad, generasi muda mahasiswa harus memahami Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika atau Empat Pilar MPR. Pemahaman yang baik tentang Empat Pilar



MPR akan membentuk jati diri dan karakter kebangsaan yang kuat dalam diri setiap generasi muda Indonesia.

“Peran dan keikutsertaan kalian dalam gelar acara Sosialisasi Empat Pilar MPR ini

membuktikan perhatian kalian yang besar kepada nilai luhur bangsa. Generasi penerus seperti kalianlah yang bangsa ini harapkan,” terangnya.

Di sesi akhir, sebagai bentuk kepedulian

kepada aktivitas mahasiswa, Fadel Muhammad secara pribadi memberikan donasi agar lebih semangat lagi membuat berbagai kegiatan dan karya yang bermanfaat untuk kampus dan masyarakat. □

Sosialisasi Empat Pilar MPR di Desa Heledulaa

Fadel Muhammad Ajak Rakyat Terus Menjaga Pancasila

PADA hari yang sama, Selasa (20/12/2022), juga rangkaian dalam kunjungan kerjanya di Provinsi Gorontalo, Wakil Ketua MPR RI, Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad hadir dalam kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR di Desa Heledulaa, Gorontalo. Hadir dalam acara yang berlangsung di salah satu rumah warga itu adalah para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan warga sekitar.

Perbincangan antara Fadel Muhammad dan warga masyarakat berlangsung akrab dan penuh kekeluargaan. Dalam kesempatan itu, Fadel mengajak warga masyarakat untuk tetap berpegang teguh pada Empat Pilar MPR. Hal itu penting, karena menurut mantan Gubernur Gorontalo dua periode ini, di dalam Empat Pilar MPR ada Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara kita. Pancasila berisi lima sila yang menjadi nilai-nilai luhur bangsa.

Berikutnya, di dalam Empat Pilar MPR, juga ada NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). “Bangsa yang sangat beragam ini bersatu dalam NKRI, sehingga menjadi kuat tak tergoyahkan,” jelas Fadel Muhammad. Kemudian, papar Fadel Muhammad, di dalam Empat Pilar MPR ada pula Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan semboyan pemersatu bangsa.

Melihat pentingnya Empat Pilar MPR bagi keberlangsungan NKRI, Pimpinan MPR dari Kelompok DPD asal Provinsi Gorontalo ini mengajak warga untuk terus menjaga Empat Pilar MPR, agar tetap menjadi pegangan dalam membangun bangsa ini ke depan. MPR sendiri, lanjut Fadel, sesuai amanah yang diembankan UU, terus memasyarakatkan Empat Pilar dengan berbagai metode yang bagus.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Dalam kesempatan itu, Fadel Muhammad juga menyinggung soal tahun politik 2024 atau pelaksanaan Pemilu 2024. Fadel berharap, rakyat bijak memberikan hak pilihnya, sehingga muncul pemimpin yang mampu menyejahterakan rakyatnya secara keseluruhan.

“Saya sangat menginginkan agar tingkat kemiskinan di Gorontalo menurun, serta tingkat ekonominya sama dengan daerah lain. Untuk itu, pemimpin Gorontalo selanjutnya harus memerhatikan betul hal ini terutama bidang pertanian dan perikanan harus lebih ditingkatkan,” harap Fadel Muhammad.

Di tengah-tengah dialog, Fadel Muhammad memberikan informasi bahwa dirinya akan

maju sebagai anggota DPD RI dari Provinsi Gorontalo di Pemilu 2024 nanti. “Saya mohon doanya agar lancar. Saya lakukan demi rakyat Gorontalo,” tambahnya.

Di sesi akhir, secara simbolis Fadel Muhammad memberikan bantuan berupa kebutuhan pokok rumah tangga kepada warga sekitar.

Kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR ini merupakan rangkaian kegiatan kunjungan kerja Fadel Muhammad di beberapa desa di kabupaten dan kota di Gorontalo. Selain Sosialisasi, Fadel Muhammad juga melakukan pertemuan dan diskusi dengan KPU Provinsi Gorontalo, mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo, dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo. □

Ahmad Basarah

Jangan Gunakan Guru Intoleran Antikebhinnekaan

WAKIL Ketua MPR, Ahmad Basarah, meminta para pengelola dan pimpinan madrasah diniyah tidak menggunakan para guru yang cenderung intoleran dan antikebhinnekaan sebagai guru di sekolah-sekolah mereka. Dukungan finansial pemerintah yang menjadi bukti negara hadir di tengah mayoritas umat Islam hendaknya tidak disalahgunakan untuk melawan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Citra madrasah diniyah yang selama ini positif dalam mendidik dan menumbuhkan ketahanan moral generasi bangsa hendaknya tidak dicerai dengan menyebarkan paham yang melawan negara lewat guru-guru yang gemar menyebarkan intoleransi. Saya tidak asal tuduh. Sejumlah survei menunjukkan banyak guru antikebhinnekaan, intoleran, tidak moderat, dan ini berbahaya untuk perkembangan mental anak didik," kata Ahmad Basarah saat tampil dalam acara Bimbingan Teknis: Peningkatan Kompetensi Pengelola Madrasah Diniyah Se-Kabupaten Malang Tahun 2022 di Malang, Jawa Timur, Kamis (22/12/22).

Dalam acara yang dirangkaikan dengan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI Bersama DPC Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Se-Kab Malang itu, Ahmad Basarah membeberkan hasil survei yang dilakukan oleh PPIM UIN Jakarta pada 2018 di kalangan guru Muslim dari tingkat TK sampai SMA/Madrasah Aliyah. Lembaga pemikir UIN Jakarta itu menemukan fakta, banyak guru tidak bersikap moderat. Menurut survei itu, 21% guru misalnya tak setuju tetangga berbeda agama boleh mengadakan acara keagamaan, 56% guru tidak setuju non-Muslim mendirikan sekolah berbasis agama di sekitar mereka, 33% guru bersedia menganjurkan orang lain berperang mewujudkan negara Islam, dan 29% guru setuju berjihad di Filipina, Suriah, dan Irak.

"Jika semua pandangan itu tidak diluruskan, saya khawatir dukungan pemerintah pada ratusan ribu madrasah diniyah disalahgunakan untuk melawan negara. Siapa yang rugi? Pasti kita sebagai bangsa. Kita akan terpecah belah seperti



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

yang dialami sejumlah negara yang tak mampu merawat kebhinnekaan mereka," tegas Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu.

Untuk itu, Ahmad Basarah merasa perlu mengarahkan para pengelola madrasah diniyah untuk bersama-sama memahami tujuan nasional secara sistematis dan benar untuk apa negara ini didirikan. Salah satu caranya adalah dengan melakukan sosialisasi Empat Pilar MPR RI, seperti yang dia lakukan di hadapan para pengelola madrasah diniyah di Malang tersebut.

"Saya ingin mengutip amanat Bung Karno untuk para guru. Kata beliau, satu bangsa akan kehilangan rasa peri kemanusiaannya bila guru-guru hanya

tahu mengajar, menulis, dan menghitung. Hanya guru yang punya jiwa kebangunan sajalah yang dapat menurunkan kebangunan ke dalam jiwa anak," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu.

Ahmad Basarah menambahkan, besarnya jumlah madrasah diniyah di seluruh Indonesia sangat potensial untuk menumbuhkan ketahanan nasional dan ideologi bangsa. Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2021 menyebutkan, kini terdapat 26.129 madrasah diniyah formal dengan 334.533 guru di bawah koordinasi Kementerian Agama. Sedangkan data Kemenag 2021/2022 menyebutkan, kini terdapat 84.740 madrasah diniyah nonformal.





“Jika potensi yang besar ini tidak dirangkul oleh negara, saya tidak tahu apa masa depan Indonesia. Nasionalisme perlu digelorakan terus-menerus sebab sangat terasa ada pihak-pihak tertentu yang sengaja menyebarkan fitnah bahwa Pancasila adalah thagut, Pancasila paham sekuler yang bertentangan dengan ajaran Islam,” tegas

Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Wantimpus) GM FKPPi itu.

Sementara itu, Bupati Malang HM Sanusi dalam sambutannya berjanji pada 2023 semua guru madrasah diniyah akan menerima tunjangan Rp 500.000. Untuk itu, seperti yang juga disampaikan Ahmad Basarah, dia meminta para guru madrasah

itu lebih giat lagi mendidik anak didik dengan akhlaqul karimah, etika budi pekerti yang baik, serta cinta pada bangsa dan negara. Dia berjanji, jika APBD Malang naik, insentif untuk para guru madrasah diniyah juga dinaikkan, bahkan Pemkab Malang bisa meminjamkan dana untuk usaha tanpa bunga. □

Yandri Susanto

Semua Siswa Memiliki Hak Sama Dalam Hal Pendidikan

WAKIL Ketua MPR RI, H. Yandri Susanto, S.Pt., menegaskan kembali sikap dan keberpihakannya untuk mengawal suksesnya pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar di lembaga pendidikan swasta dan negeri, khususnya madrasah serta pondok pesantren. Karena, hingga kini keberadaan kedua lembaga pendidikan itu masih sering dianaktirikan dan mendapat perlakuan yang tidak adil.

Padahal, kata Yandri, jumlah dan kapasitas sekolah umum saja (sekolah negeri) tidak mampu menampung seluruh siswa yang ingin melanjutkan sekolah. Akan banyak siswa yang terlantar jika tidak ada sekolah swasta, khususnya madrasah dan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

pondok pesantren.

Karena itu, menurut Yandri, pemerintah

harus memberikan perhatian yang sama besarnya, baik kepada madrasah maupun



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

sekolah umum, khususnya menyangkut persoalan anggaran. Apalagi, baik sekolah umum maupun madrasah, keduanya mendidik anak-anak bangsa. Mereka memiliki hak yang sama dalam masalah pendidikan.

“Kalau bangunan madrasah roboh, itu benar-benar roboh karena memang sudah reot dan usang. Sementara kalau negeri, itu dirobohkan sesuai ketersediaan anggarannya. Sekolah negeri muridnya banyak bahkan mereka menolak, sementara madrasah muridnya sedikit. Inilah beberapa kenyataan yang terus mengiringi lembaga pendidikan negeri dan swasta,” ujar Yandri.

Penegasan sikap itu disampaikan mantan

Ketua Komisi VIII DPR RI itu ketika menerima delegasi Panitia Khusus (Pansus) Raperda Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, DPRD Kabupaten Cilegon, Provinsi Banten, Selasa (13/12/2022).

Pertemuan antara Wakil Ketua MPR RI, Yandri Susanto, dan delegasi Pansus Raperda Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Cilegon yang dipimpin ketuanya, H. Anugrah Chaerullah, SE., MM., itu berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan MPR, Gedung Nusantara III, Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta.

Pada kesempatan itu, Yandri menyambut

baik Raperda Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang sedang dibahas DPRD Kabupaten Cilegon. Politisi PAN ini menyebut, ada banyak perubahan yang sudah memungkinkan pihak Pemkab dan DPRD mengeksekusi pasal-pasal dalam Perda, meski dulu ketentuan itu tidak diperbolehkan. Antara lain, menyangkut perbedaan pintu keluar gaji guru honorer sekolah negeri dan swasta.

“Tidak ada persoalan gaji guru honorer sekolah negeri diberikan melalui Bupati, sedangkan gaji guru honorer swasta melalui pintu Kesra, yang penting jumlahnya seimbang. Selain itu, saat ini Pemkab sudah diizinkan mengeluarkan beasiswa bagi para mahasiswa, meskipun aturan ini dulu tidak diperbolehkan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Anggota Pansus yang ikut hadir pada pertemuan itu meminta beberapa saran dan masukan terkait Raperda Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Kabupaten Cilegon. Kepada Yandri, mereka meminta masukan, antara lain perihal pentingnya nilai-nilai kearifan lokal menjadi muatan Pendidikan Lokal. Khususnya menyangkut akhlak, budi pekerti, dan bahasa daerah. Juga rencana pemberian beasiswa dari Pemkab kepada para mahasiswa. Serta keadilan besaran gaji bagi guru honorer di sekolah negeri dan swasta. □

MBO



Syarief Hasan

Sosialisasi Empat Pilar Sangat Dibutuhkan Rakyat



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR Prof. Dr. Sjarifuddin Hasan, MM., MBA., atau Syarief Hasan mengungkapkan bahwa pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika atau Empat Pilar yang digelar MPR sepanjang tahun 2022 sudah berjalan baik.

Namun, memang amanah yang diemban MPR melalui UU itu belum sempurna. Masih ada yang harus diperbaiki dan disempurnakan di tahun 2023. "Pada intinya, sosialisasi sangat dibutuhkan rakyat Indonesia. Di tahun 2023 harus lebih disempurnakan dari sisi materi, metode, dan target sasaran," kata Syarief Hasan, usai nobar pertandingan Proliga Bola Voli 2023 antara skuad Tim Jakarta LavAni Allo Bank vs Tim Jakarta Pertamina Pertamina bersama Presiden RI Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di Volley Indoor GOR Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (6/1/2023).

Pimpinan MPR dari Partai Demokrat ini menekankan, untuk tahun ini apalagi mendekati pesta demokrasi Pemilu 2024, Sosialisasi Empat Pilar sebagai vaksin ideologi dan moral, sangat dibutuhkan untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta meminimalisir bahkan meng-

hilangkan potensi konflik antarkontestan dan pendukung.

"Jika rasa persaudaraan demikian kuat terjaga dengan baik dan konsisten maka perbedaan pilihan dalam Pemilu 2024 bukanlah menjadi alasan untuk saling berselisih," ujarnya.

Lebih lanjut, Syarief Hasan mengatakan, target sasaran pada pelaksanaan Sosialisasi tahun 2023 juga harus mendapat perhatian. Yang perlu ditingkatkan adalah dari kalangan generasi muda milenials, seperti para siswa TK, Paud, SD, SMP, SMA hingga Perguruan Tinggi.

Materi sosialisasi untuk kalangan itu harus juga disesuaikan. Seperti sosialisasi untuk siswa-siswi TK dan Paud, materi sosialisasi mesti disesuaikan dengan usia mereka. Antara lain, melalui berbagai permainan yang menarik. Angkat permainan daerah-daerah di Indonesia. Selanjutnya, bisa diperkenalkan juga seni budaya daerah seperti lagu, tarian, pakaian adat, serta bahasa daerah. Hal-hal tersebut sangat penting diperkenalkan kepada anak usia dini, sehingga mereka bisa mengetahui dan mencintai budaya daerah.

"Kenapa ini saya tekankan, sebab generasi muda adalah generasi penerus kepemimpinan bangsa. Selain dibekali dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, mereka juga harus dibekali dengan

pemahaman akan nilai-nilai luhur bangsanya. Perpaduan antara tingginya intelektualitas dan tebalnya karakter bangsa akan tampil generasi masa depan yang kuat menghadapi tantangan global," papar Syarief Hasan.

Satu lagi, ujar Syarief Hasan, melihat begitu pentingnya Sosialisasi Empat Pilar untuk bangsa Indonesia, Pimpinan MPR membuat kebijakan untuk tahun 2023, kegiatan sosialisasi akan lebih ditingkatkan lagi.

"Kami di MPR sangat merasa terhormat menjalankan amanah negara, melaksanakan sosialisasi. Kami menjalankannya dengan sepenuh hati dan semaksimal mungkin. Namun, melakukan upaya pemahaman nilai-nilai luhur bangsa adalah tanggung jawab bersama. Sinergitas, saling bergandeng tangan dalam melakukan sosialisasi ini akan semakin menyempurnakan hasil," terang Menteri Negara Koperasi dan UMKM RI pada era Kepemimpinan Presiden RI Ke-6 SBY ini.

Syarief Hasan berharap, dengan semakin meningkatnya kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR di tahun 2023 akan semakin mempertebal kecintaan setiap anak bangsa kepada tanah air dan mempertebal karakter dan jati diri. Sehingga bangsa ini akan mampu menghadapi berbagai masalah dan tantangan internal dan global yang semakin kompleks. □

Rapat Bersama Setjen MPR dan Kemenlu

RAPAT Bersama Sekretariat Jenderal MPR dan Sekretariat Jenderal Kementerian Luar Negeri digelar di Ruang Samithi, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, (28/12/2022).

Hadir sekaligus memimpin rapat dari Setjen MPR adalah PIt. Deputi Administrasi Setjen MPR Siti Fauziah, SE., MM.; pejabat dan Biro SDM, Organisasi dan Hukum, serta pejabat dan staf Setjen Kemenlu RI.

Rapat bersama membahas berbagai hal seputar kerjasama, sinergitas hubungan antara Setjen MPR dan Setjen Kemenlu RI. □

DER



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Biro Humas Terima Delegasi Pelajar

BIRO Humas Setjen MPR RI menerima kunjungan delegasi siswa dan guru SMP Negeri 248 Jakarta. Delegasi diterima oleh Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antarlembaga Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR, Indro Gutomo.

Kunjungan yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2022 tersebut dalam rangka kegiatan study tour ke Gedung MPR/DPR.

Kegiatan diisi dengan diskusi ringan berkualitas yang dipandu Indro Gutomo, setelah itu tour menjelajahi sudut-sudut Gedung Parlemen sekaligus berfoto bersama di spot-spot yang bagus dan instragramable. □

DER



Sesjen MPR Resmikan Aplikasi SRIKANDI



SEKRETARIS Jenderal MPR RI Prof. Dr. Ma'rif Cahyono SH., MH., secara resmi me-launching Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/11/2022).

Hadir dalam acara, Plt. Deputy Administrasi Setjen MPR Siti Fauziah, SE., MM., dan pejabat eselon II, III dan pegawai di lingkungan Setjen MPR.

Aplikasi tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi

Negara (BSSN), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo).

Aplikasi SRIKANDI memiliki beberapa fitur utama. Pertama, fitur penciptaan arsip yang meliputi pembuatan, pengiriman, dan penerimaan naskah dinas secara elektronik antarinstitusi pemerintah. Kedua, terdapat fitur pemeliharaan arsip untuk menjaganya agar tetap autentik, utuh, dan terpercaya. Di dalam aplikasi ini juga terdapat fitur penggunaan arsip oleh yang berhak, serta fitur penyusutan arsip yang meliputi pemindahan dan pemusnahan arsip. □

DER



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Dr. Habiburrokhman, SH, MH, Anggota MPR Fraksi Partai Gerindra

KUHP Ini Perlu Dipahami dengan Benar, Khususnya Bagi Para Penegak Hukum

DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dan pemerintah akhirnya mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi UU KUHP dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Sidang Paripurna Gedung Nusantara I, pada Selasa, 6 Desember 2022. UU KUHP ini menjadi beleid hukum pidana terbaru menggantikan KUHP warisan kolonialisme Hindia Belanda yang sudah digunakan selama lebih satu abad.

Sebelumnya Komisi III DPR RI telah menyetujui RKUHP dibawa ke Sidang Paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Keputusan itu diambil dalam rapat keputusan tingkat I yang digelar bersama pemerintah pada 24 November 2022. Presiden Joko Widodo pun telah menandatangani UU KUHP pada awal tahun 2003. UU KUHP ini terdiri dari 37 bab serta

624 pasal. UU KUHP ini akan melalui masa transisi selama tiga tahun sejak pengesahan sebelum nanti secara resmi berlaku penuh pada 2025.

Perjalanan proses pembahasan revisi hingga pengesahan UU ini menandai banyak protes dari sejumlah kalangan. Aliansi Nasional Reformasi KUHP, misalnya, menyebut sedikitnya 14 isu yang bermasalah dalam KUHP ini. Untuk mengetahui lebih jauh UU KUHP ini, berikut ini uraian anggota MPR dari Fraksi Partai Gerindra yang juga anggota Komisi III DPR, Dr. Habiburrokhman, SH., MH. Petikannya.

DPR dan pemerintah sudah mengesahkan RUU KUHP menjadi undang-undang. Ini merupakan KUHP yang menggantikan KUHP warisan Belanda. Apa pandangan Bapak?

Dalam sosialisasi RUU KUHP sudah sering disampaikan bahwa rancangan KUHP ini

sudah dimulai sejak tahun 1963. Pada saat itu sudah ada keinginan untuk mengganti KUHP buatan penjajah Belanda yang sudah berlaku sejak tahun 1800-an. Proses paling konkret dalam penyusunan RUU KUHP terjadi pada tahun 2015. Pembahasan RUU KUHP dimulai dan pada tahun 2019 telah disepakati pada tingkat pertama di DPR. Artinya, RUU KUHP itu sudah disepakati dan hanya tinggal dibawa ke Sidang Paripurna.

Namun, pada saat itu, ada unjukrasa terkait dua UU, yaitu RUU Pemasyarakatan dan RUU KUHP. Presiden Joko Widodo (pemerintah) akhirnya menunda RUU KUHP. Masuk pada periode 2019-2024, RUU KUHP kembali dibahas, namun disosialisasikan kepada publik sampai tahun 2020. RUU KUHP kembali lagi dibahas setelah tahun 2020 sampai akhirnya pada Juli 2022, ada dua RUU yang carry over dibawa ke DPR, salah satunya RUU Pemasyarakatan disahkan menjadi UU,

sedangkan RUU KUHP tidak langsung disahkan tetapi pemerintah meminta RUU KUHP ini kembali disosialisasikan.

Pemerintah bukan hanya menyosialisasikan RUU KUHP, tetapi juga menyerap aspirasi dan mengubah pasal-pasal berdasarkan serapan aspirasi di belasan kota di Indonesia. Cukup banyak pasal yang diubah dari hasil serapan aspirasi tersebut. Sampailah pada awal November 2022, RUU KUHP ini seharusnya sudah masuk dalam proses pengesahan, namun kembali diputar sekali lagi untuk menyerap aspirasi masyarakat.

Saya mencatat ada dua arus besar aspirasi pada waktu itu, yaitu aspirasi dari Dewan Pers dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP yang merupakan aliansi beberapa LSM yang cecern terhadap perubahan KUHP ini. Salah satu contoh aspirasi adalah pasal 100 tentang hukuman mati. Dialog untuk pasal ini cukup panjang, karena ada dua kekuatan ekstrem, yaitu pertama pihak yang ingin hukuman mati dipertahankan, dan kedua kelompok yang ingin menghapuskan sama sekali hukuman mati.

Akhirnya tercapai kompromi pada pasal 100 KUHP, yaitu menghilangkan kata “dapat” dalam pasal tentang hukuman mati. Penghilangan kata “dapat” berdasarkan masukan sejumlah elemen masyarakat. Jadilah, KUHP yang ada saat ini.

RUU KUHP telah disahkan menjadi UU. Namun, banyak kalangan yang menilai beberapa pasal dalam KUHP yang baru disahkan masih bermasalah dan mengundang kontroversi. Apa pendapat Bapak?

Kita perlu mengedukasi masyarakat. Ada beberapa hal yang sangat fundamental pada KUHP yang baru ini. Ada perubahan besar dalam KUHP ini, yaitu bagaimana cara kita ber hukum. Ini tertuang dalam Pasal 36 KUHP. Konsep hukum sebelumnya dalam KUHP warisan penjajah Belanda kita menganut pendekatan monistik. Artinya, pemenuhan unsur-unsur delik. Orang dipidana hanya karena pemenuhan redaksi pasal. Contoh konkretnya adalah kasus Ahmad Dhani. Saya sebagai lawyer-nya pada waktu itu

tahun 2018.

Ahmad Dhani dipenjara karena hanya mengatakan sekelompok orang adalah idiot. Menurut redaksi Pasal 28 ayat 2 jo 45 ayat 2 UU ITE, itu sudah memenuhi. Tapi, adakah mens rea-nya? Adakah niat Ahmad Dhani untuk mengadu domba? Tidak ada (niat) itu dan tidak bisa dibuktikan. Tapi kita tahu, sudah berapa puluh orang dipenjara dengan Pasal 28 ayat 2 jo Pasal 45 ayat 2 UU ITE.

Kemudian UU No. 1 Tahun 1946. Ini UU yang mengantarkan Habib Rizieq Shihab ke penjara karena dituduh menyebarkan berita bohong. Tapi tidak ada pembuktian *mens rea*-nya. Nah, dua UU itu (UU ITE dan UU No 1 Tahun 1946) yang paling berbahaya dan paling banyak memakan korban ini tidak berlaku dengan disahkannya UU KUHP.



Banyak pasal yang fundamental dalam KUHP ini. Tentu pengesahan UU KUHP ini lebih banyak manfaatnya daripada ditunda.

Pasal yang sering dibicarakan adalah soal penghinaan terhadap presiden dan lembaga negara. Pasal ini dinilai menghambat kebebasan berpendapat dan berekspresi. Bagaimana tanggapan Bapak?

Sebenarnya yang paling penting dipahami publik adalah UU KUHP tidak bisa dipahami hanya dengan membaca pasal demi pasal.

Tapi, pahamiilah semangat dari UU KUHP secara keseluruhan. Seperti pasal yang paling sering dibahas, yaitu pasal penghinaan terhadap harkat dan martabat presiden, dan pasal penghinaan terhadap lembaga negara. Terlepas dari perdebatan yang terjadi, pasal itu sudah disahkan.

Pasal itu sudah disahkan, tetapi tetap harus mengacu pada Pasal 36 KUHP, di mana untuk mempidanakan orang, penegak hukum harus membuktikan adanya mens rea, adanya niatan, pada orang yang melakukan tindak pidana. Ini tidak ada dalam KUHP yang lama, tidak pernah dibuktikan adanya mens rea. Padahal, tindak pidana terkait ujar memang relevan sekali membuktikan adanya mens rea itu.

Misalnya, saya mengatakan kalimat yang

sama di situasi tertentu. Bisa dibuktikan mens rea-nya seperti apa. Niat mengucapkan kalimat itu seperti apa. Penegak hukum harus membuktikan mens rea itu. Penegak hukum yang mempunyai kewajiban membuktikan bahwa orang itu benar-benar bermaksud menghina. Jadi tidak hanya membaca redaksi pasal. Sudah banyak pagarnya, mulai dari redaksi pasalnya sampai dengan harus adanya mens rea-nya.

Seberapa buruk pasal tentang penghinaan terhadap harkat dan martabat



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

presiden, dan pasal tentang penghinaan terhadap lembaga negara dalam KUHP yang baru ini, tapi lebih buruk pasal di KUHP yang ada sebelumnya dan sekarang sudah tidak berlaku dengan disahkannya KUHP yang baru.

Pasal lain yang mengundang perdebatan adalah tentang perzinaan, kumpul kebo, dan LGBT. Bahkan banyak pihak yang mengaitkan dengan kunjungan wisatawan asing. Bisa dijelaskan?

Itu yang terjadi dalam pembahasan di DPR. Kita (di DPR) menyatukan pendapat yang kadang-kadang berbeda secara ekstrem satu sama lain. Contohnya, pasal perluasan zina, pasal soal kumpul kebo,

pasal soal pengaturan pencabulan LGBT. Kelompok-kelompok liberal mengatakan, pengaturan itu mengintervensi wilayah private. Wilayah akhlak sebaiknya tidak boleh diatur dalam UU. Tapi, sebaliknya, kelompok-kelompok religius mengatakan hal itu perlu diatur. Walaupun soal akhlak tapi perlu diatur dalam UU. Bahkan aturan itu dipertegas dalam UU.

Ini adalah soal pertarungan, perdebatan, yang sangat sengit antara dua kelompok yang ideologinya berbeda. Ini menjadi perdebatan ekstrem. Ada kelompok-kelompok yang mengatakan pengaturan itu masuk ke wilayah private. Tapi ada kelompok-kelompok yang mengatakan pengaturannya dalam pasal-pasal harus

lebih tegas lagi. Ini urusannya sudah ideologi. Di belakangnya ada ideologi.

Akhirnya, berdasarkan pandangan yang berbasiskan ideologi masing-masing, orang-orang itu menyatakan sikap. Kita menguatkan dengan memasukkan dalam KUHP perluasan soal zina, pengaturan larangan kumpul kebo, pengaturan pidana bagi pencabulan LGBT, yang dalam KUHP sebelumnya tidak diatur secara jelas.

Ketika dilihat pasalnya, pasalnya adalah jalan tengah semua. Tidak ekstrem seperti dibayangkan banyak orang. Misalnya, soal larangan menjual minuman keras kepada orang yang mabuk. Banyak yang mengatakan pasal ini menakut-nakuti wisatawan. Padahal pasal ini sudah ada di KUHP yang lama. Bahkan pengaturannya di KUHP yang lama sama persis. Dan, tidak ada masalah di KUHP yang lama.

Begitu juga pasal-pasal soal zina. Orang yang mengadakan soal zina hanya terbatas. Tadinya, teman-teman kelompok religius, komunitas keagamaan, menginginkan kasus zina bisa dilaporkan oleh kepala kampung atau Ketua RT. Tapi, akhirnya, pihak yang melaporkan soal zina hanya suami, istri, atau orangtua. Nah, kelompok liberal mencaci-maki kami karena soal zina diperluas bukan dihilangkan dalam KUHP. Ini dianggap mengintervensi wilayah private. Sebaliknya, kelompok religius juga memarahi kami. Katanya, pengaturannya kurang tegas, karena kepala kampung atau ketua RT tidak bisa melaporkan kasus zina.

Begitu juga pasal-pasal soal LGBT. Ada teman-teman yang tidak realistis memaksakan keinginannya untuk diakomodir bulat-bulat di KUHP ini.

UU KUHP ini sudah ditandatangani presiden dan akan berlaku tiga tahun lagi, atau pada tahun 2025. Apa harapan Bapak?

KUHP ini adalah revolusi hukum. Ada revolusi dalam berhukum pada KUHP ini. Karena itu, KHUP ini perlu tiga tahun baru diterapkan. Kita harus memaksimalkan sosialisasi. Sebab, kita perlu agar KUHP ini dipahami dengan benar, terutama para penegak hukum kita. □





MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT



Ikon Prestasi Pancasila 2022



Mischka dan Devon

MISCHKA Aoki dan Devon Kei Enzo, dua anak muda Indonesia mendapat anugerah Ikon Prestasi Pancasila Tahun 2022 dari BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila). Keduanya termasuk tokoh termuda dari seluruh tokoh yang penerima anugerah Ikon Prestasi Pancasila ini.

Para penerima anugerah yang diberikan setiap tahun ini terbagi dalam lima kategori, yakni: Sains dan Inovasi, Olahraga, Seni dan Budaya, Kewirausahaan Sosial, serta Tokoh dan Penggerak Lintas Iman. Mischka terpilih sebagai penerima Ikon Prestasi Pancasila untuk kategori Olahraga, sedangkan Devon untuk kategori Sains Internasional.

"Kami bersyukur dan berterima kasih kepada BPIP yang telah memilih kami berdua, semoga kami bisa terus menjadi penggerak Pancasila di lingkungan negara serta dunia," ujar Mischka. □

DER

Raih Empat Besar *Juara Aerobic* Gymnastics Dunia

PRESTASI luar biasa berhasil diraih atlet Aerobic Gymnastics muda Indonesia **Edelina Daxilia** (13 tahun). Edelina berhasil menjadi juara 4 dunia pada kejuaraan Aerobic Gymnastics Suzuki World Cup 2022 yang dilaksanakan di Tokyo, Jepang, pada 12-14 Desember 2022 dengan kategori Age Group 12-14 tahun yang diikuti oleh 12 negara.

“Saya bangga dan ini bukan hanya untuk saya tapi untuk Indonesia,” katanya. Dexie termasuk atlet yang giat latihan sehingga bisa berprestasi. Tak hanya sekolah dan latihan aerobic, atlet muda berparas cantik ini juga menjadi seorang influencer di sosial media.

“Berolahraga adalah kebutuhan tubuh kita. Kebiasaan berolahraga dapat dipupuk sejak usia dini, entah dimulai dari lingkungan keluarga ataupun sekolah,” katanya. Selain kerja keras, menurut Dexie, tak kalah pentingnya dukungan orang tua. □

DER



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Adelina Daxilia



Astadz Abdul Somad (UAS)

Ingatkan Keteladanan Seorang Pemimpin

ACARA Tabligh Akbar Tirtayasa Bershalawat, sekaligus Maulid Nabi Muhammad SAW dan Haul Tuan Syeh Abdul Qadir Al-Jailani, yang berlangsung Senin (5/12/2022), menghadirkan **Ustadz Abdul Somad (UAS)** sebagai penceramah. Dan, dihadiri Wakil Ketua MPR Yandri Susanto.

Dalam ceramahnya, UAS menguraikan tentang sejarah kepahlawanan Sultan Ageng Tirtayasa yang menjadi teladan umat. “Seorang pemimpin akan sangat beruntung di dunia dan di hari pembalasan jika dia adil dan melindungi seluruh rakyatnya tanpa kecuali,” ujar UAS.

Namun, sebaliknya, jika pemimpin tak adil dan menyusahkan rakyat maka dia termasuk pemimpin yang tidak beruntung di hari pembalasan kelak. “Ini harus disadari para calon pemimpin nanti. Kalian harus berbuat adil dalam segala bidang. Ingat Allah SWT Maha Melihat dan Maha Mengetahui segala niat dan perbuatan kalian,” tegasnya. □

DER



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Menikmati Eksotisme Kota Lama Semarang

SEPERTI rumput yang tumbuh subur di musim penghujan, saat ini banyak tempat wisata bermunculan, baik di kota maupun di desa-desa. Mulai dari tempat wisata buatan, hingga wisata alam. Bahkan, saat ini juga muncul fenomena yang terjadi hampir serentak, yaitu memanfaatkan potensi alam, untuk disulap menjadi destinasi pariwisata. Baik berupa sungai, pantai, laut, gunung, panorama alam, serta alam pedesaan dan persawahan. Akibatnya, tujuan wisata baru pun terus bermunculan dan menjamur, dan ada di mana-mana.

Meski kawasan wisata baru terus bermunculan tak berarti selera masyarakat terhadap wisata sejarah, terutama gedung-gedung tua peninggalan masa lalu terpinggirkan. Sebaliknya, kehadiran tempat-tempat wisata baru itu tidak mampu menggeser wisata sejarah yang sudah terlebih dulu ada dan bisa ditemukan di hampir seluruh kota di Indonesia. Sebut saja salah satunya adalah Kota Lama Semarang.

Dari dulu hingga sekarang, Kota Lama di Semarang masih menjadi salah satu

destinasi wisata favorit. Setiap hari, dari pagi, sore, hingga malam, ada saja turis yang berkunjung di Kota Lama Semarang. Apalagi setelah pemerintah Kota Semarang melakukan revitalisasi terhadap arsitektur, jalan dan pencahayaannya. Sejak itu, makin banyak saja pengunjung yang datang.

Kawasan Kota Lama terletak di tengah

pusat kota Semarang, dengan luas mencapai 31 Ha. Kawasan tersebut dahulu dikenal sebagai Little Netherland. Kota Lama merupakan peninggalan warisan kolonial Belanda, berusia lebih dari dua abad dan sangat mensejarah. Pada zamannya, Kota Lama Semarang berfungsi sebagai pusat perdagangan pada abad ke-19 dan 20. Ini





bisa dibuktikan dengan adanya sekitar 50 kantor berbagai perusahaan dagang Belanda di sana.

Saat ini ada beberapa gedung peninggalan kolonialis Belanda yang menjadi ikon di Kota Lama Semarang. Dua di antaranya bahkan menjadi legenda. Yaitu Gereja Blenduk dan Jembatan Berok. Gereja Blenduk berada di Jl. Letjen Suprpto, atau jalan utama di kawasan Kota Lama. Gereja Protestan Indonesia Barat (GPIB) “Immanuel” ini dibangun tahun 1753 berbentuk Oktagonal. Gedung bersisi delapan menjulang tinggi beratap kubah besar warna merah, sehingga gereja itu dijuluki sebagai Gereja Blenduk. Nama Blenduk diberikan pada Gereja Protestan ini merunut pada bentuk kubahnya yang dalam bahasa Jawa disebut Blenduk (menggembung).

Sedangkan Berok merupakan jembatan yang melintang di atas Sungai Semarang. Jembatan itu dahulu disebut Gouvernementsbrug. Namun, warga setempat kesulitan menyebut lafal Brug maka disebutlah Jembatan Berok, dan lazim dieja dengan nama Jembatan Mberok.

Jembatan Berok merupakan satu-satunya akses jalan ke kawasan Kota Lama Semarang, yang dikenal sebagai Oudestat. Jembatan itu dibangun tahun 1705, berupa jembatan gantung. Lantai jembatan Berok

tergantung pada 4 pilar, dan bisa diangkat supaya kapal-kapal dapat lewat di Kali Semarang. Tetapi sekarang jembatan itu sudah menjadi jembatan permanen, bahkan sudah di perlebar dengan jalur kedua.

Kulineran

Kota Lama Semarang memiliki eksotisme yang berbeda, saat pagi terutama pada hari libur, senja menjelang malam, dan pada malam hari. Pagi hari ketika lalu lintas masih sepi, Kota Lama Semarang tampak lengang, membuat para wisatawan seolah berjalan di Little Netherland yang seutuhnya. Ditingkahi matahari pagi yang menghangatkan, sinarnya menghadirkan pemandangan yang tidak gampang ditemukan di tempat-tempat lain di Indonesia dan dunia.

Saat senja menjelang malam, kawasan Kota memberikan suasana yang lain. Ditemani angin sore yang bertiup sepoi dan dilingkari bangunan berarsitektur lawas, mengingatkan para turis akan kenangan lama, Kota Lama Semarang sebagai kota perdagangan. Suasana itu mampu melambungkan asa turis yang datang untuk membayangkan kesibukan aktivitas bisnis, yang dulu akrab terjadi di sana.

Sedangkan saat malam hari, suasananya berbeda lagi. Kerlap kerlip dan terangnya lampu mampu menyajikan ketenangan.

Terlebih saat malam, tiupan angin laut terasa lebih kencang dibanding siang hari. Suasana tersebut sayang untuk dilewatkan. Dan, akan lebih bermakna jika dinikmati dengan secangkir kopi ataupun minuman lainnya.

Apalagi, pada malam hari berbagai menu kuliner ada di sana. Mulai dari menu tradisional maupun modern, baik menu Indonesia maupun mancanegara. Suasana malam di Kota Lama Semarang juga pantas dinikmati meski sekedar berjalan-jalan menyusuri pedestrian yang sudah semakin lebar usai direvitalisasi. Pedestrian yang dilengkapi jalur khusus untuk tuna netra, dan traffic cones berlapiskan batu alam.

Rasanya tidaklah cukup berjalan kaki mengitari seluruh kawasan Kota Tua yang memiliki sekitar 50 bangunan peninggalan kolonial hanya dalam satu malam saja. Karena selain Jembatan Berok dan Gereja Blenduk, Kota lama Semarang menyimpan berbagai peninggalan yang sangat rugi jika tidak dinikmati. Seperti Galeri Industri Kecil Menengah (IKM) atau Galeri Industri Kreatif. Menempati bekas bangunan gudang milik PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI), tempat ini juga digunakan untuk menampung PKL pedagang barang antik, yang tergabung dalam Paguyuban Padangrani. □

MBO

Hendrik Izaac Lewerissa, S.H., LL.M.

Penerus Para Cerdik Cendikia

Bumi Pattimura



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

ORANG bijak kerap berpesan, jadilah seperti Ikan di laut. Meski air dan lingkungan di sekelilingnya asin, tetapi dagingnya tetap terasa tawar. Begitulah gambaran sekilas sosok seorang Hendrik Izaac Lewerissa, S.H., LL.M., Anggota Badan Pengkajian MPR RI.

Meski sudah berinteraksi dengan berbagai suku, bangsa, bahkan masyarakat berbagai negara, Hendrik tetap menjadi dirinya sendiri. Yaitu, orang yang berasal dan bertumpah darah Maluku. Tidak meninggalkan kebiasaan dan tata krama sebagai orang Maluku. Juga selalu ingat akan jasa-jasa keluarga, sanak family, handai taulan, serta masyarakat yang mejadikan dirinya sesukses sekarang.

Buktinya, Bapak tiga anak kelahiran Ambon, Maluku 2 Maret 1968, ini tetap ramah, murah senyum, dan rendah hati, laiknya keramahan-tamahan orang Maluku. Dia juga menyertakan pemuda-pemuda Maluku di setiap tugas-tugasnya selama di Jakarta. Satu-satunya yang tidak dimiliki oleh Hendrik sebagai orang Maluku adalah kemampuan bernyanyi dengan merdu sebagaimana lazimnya masyarakat negeri Pattimura.

Meski tidak bisa bernyanyi seindah orang Maluku pada umumnya, suami dari Maya Baby Rampen ini tidak menyesal. Padahal,

ketidakbisaannya membuat Anggota Fraksi Partai Gerindra MPR RI itu kerap harus bersembunyi ke toilet agar tidak diminta bernyanyi di acara-acara besar. Tetapi, Hendrik merasa, itulah keadilan yang harus diterimanya, karena Tuhan memberikan talenta sesuai yang sudah direncanakan. Meski kebanyakan orang Maluku, sudah bisa bernyanyi dengan merdu, sejak di perut ibunya.

Sebagai umat Kristiani, pada momen memperingati Natal 2022, Hendrik berkirim pesan damai bagi seluruh Rakyat Indonesia. Ia juga mengajak seluruh warga bangsa hidup penuh damai sebagaimana kerukunan yang ada di daerahnya. Karena seluruh umat beragama di Maluku dikenal guyub rukun, saling menghormati, dan menjunjung tinggi toleransi.

“Kami di Maluku memiliki nilai-nilai kearifan yang disebut Pela Gandong, sebuah kesepakatan damai yang berlaku buat semua. Karena itu, sejak dulu orang mengatakan kalau mau belajar tentang Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, kemajemukan dan toleransi maka belajarlah di Maluku,” kata Hendrik kepada Majalah Majelis yang menyambangi ruang kerjanya beberapa waktu lalu.

Menurut Hendrik, sejak dulu kehidupan sosial di Maluku berlangsung secara harmonis. Termasuk hubungan kekerabatan



antaragama dan umat beragama, keduanya berlangsung guyub dan rukun. Tempat ibadah selalu dibangun secara bersama. Peringatan hari raya juga dirayakan secara bersama. “Kalau umat muslim bangun masjid, umat kristiani ikut bergotong-royong, bahkan membantu menyediakan bahan bangunannya, demikian sebaliknya,” cerita Hendrik.

Bahkan, pada bulan Ramadan, Hendrik yang beragama Nasrani ikut merasakan keberkahan. Ia bisa turut berbuka puasa bersama di rumah umat muslim. Dan, saat sedang begadang, Hendrik juga kerap ikut bersantap sahur bersama umat muslim yang menjalankan ibadah puasa Ramadan.

“Saya adalah bukti bahwa kami masyarakat beragama dan bersuku-suku di Maluku hidup damai. Saya Nasrani, tetapi pada Pemilu 2019 mendapat dukungan dari kalangan muslim yang sangat signifikan. Itu artinya, persatuan sudah terbentuk, tidak melihat latar belakang agama,” ungkap Hendrik.

Laut Arafura

Sebagai putra Maluku, Hendrik merasa prihatin karena daerahnya masih tergolong daerah miskin. Saat ini, Maluku tercatat sebagai satu dari empat provinsi termiskin di Indonesia. Realita ini adalah sebuah paradok karena Maluku merupakan daerah yang memiliki potensi alam melimpah ruah.

Maluku adalah lumbung bagi perikanan nasional. Potensi perikanan Maluku mencapai 37%, padahal ikan-ikan di Laut Banda, Seram, dan Arafura, belum dioptimalkan. Belum lagi pariwisata alam, terumbu karang, pantai berpasir putih, hutan bakau serta mangruf yang bisa dijadikan sebagai destinasi wisata. Dan, berpeluang turut mengangkat ekonomian masyarakat.

Banyak faktor, menurut peraih gelar master dari Temple University USA, membuat Maluku yang kaya itu menjadi salah satu provinsi termiskin di Indonesia. Pertama, menyangkut politik anggaran pemerintah pusat. Maluku adalah provinsi kepulauan dan masalah



konektivitas adalah persoalan yang penting. Apalagi jumlah daratan di Maluku hanya sebesar 6,3%, sangat kecil dibanding luas lautannya mencapai 93.7%. Dengan kondisi geografis seperti itu distribusi barang dan manusia itu tidaklah gampang.

“Kalau politik anggaran pemerintah pusat, baik Dana Alokasi Khusus maupun Dana Alokasi Umum, menggunakan metodologi pembangunan seperti sekarang akan sulit bagi Maluku untuk membangun. Terbukti, 5 tahun terakhir APBD Maluku hanya Rp 2,8 - Rp 3 triliun. Dari jumlah itu, 65% di antaranya habis untuk belanja rutin, maka sisanya sebesar 35% sulit untuk dipakai membangun,” kata Hendrik lagi.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menurut Hendrik, Maluku membutuhkan pemimpin daerah yang mampu mengolah sumber daya alam. Supaya potensi alam yang ada bermanfaat bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Minimal meningkatkan pendapatan asli daerah dan masyarakat. Juga mengurangi pengangguran.

“Pemerintah daerah harus memiliki rencana yang kongkret atau roadmap jalan yang jelas. Karena memiliki potensi alam yang besar itu adalah satu hal. Tetapi memanfaatkan potensi itu untuk kesejahteraan adalah hal yang lain. Kalau ini terpenuhi, Maluku akan segera berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan daerah lain di Indonesia,” ungkapnya.

Sebagai anggota Legislatif, Hendrik melakukan berbagai usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan Maluku. Antara lain, meminta pemerintah pusat agar menjadikan Ambon sebagai salah satu prioritas pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Apalagi selama ini program tersebut berlangsung baik dan diterima masyarakat secara antusias. Meskipun, program Kotaku adalah proyek PUPR bekerjasama dengan Komisi V DPR RI. Sedangkan Hendrik sendiri bertugas di Komisi VI.

Ia juga membantu pembangunan Maluku melalui mitra kerja Komisi

VI, di mana Hendrik bertugas. Beberapa kali ia berhasil mencari dana CSR untuk membantu melaksanakan berbagai pembangunan. Juga melakukan pendidikan dan pelatihan, serta menyalurkan bantuan bagi para pelaku UMKM.

Beras Jatah

Ranah politik yang digeluti Hengky, panggilan Hendrik dari orangtuanya, di dapat melalui kerja keras, ketekunan, dan pantang menyerah. Karena, untuk sampai pada kedudukannya saat ini, anak ketujuh dari 10 bersaudara pasangan Gerson Leorisa dan Agustina Matimena, harus berjuang tak kurang dari 15 tahun. Tak hanya itu, dalam perjuangannya, ia sempat berpindah partai dan mencoba peruntungan menjadi calon wakil gubernur.

Hendrik mulai bergelut dengan dunia politik pada 2004, sebagai Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat dan Korwil Provinsi Maluku. Bersama partai berlambang Mercy itu, Hendrik sempat menjadi caleg DPR RI pada Pemilu 2009, tetapi gagal. Pada 2010 ia menyeberang ke Partai Gerindra, menjadi Ketua DPD Provinsi Maluku. Kemudian, pada 2013-2014 Hendrik mencoba melamar menjadi Wakil Gubernur, tetapi masih belum berhasil. Baru pada 2019 ia sukses melangkah ke Senayan, sebagai anggota Fraksi Partai Gerindra.

“Dalam berpolitik kita tak boleh menyerah. Kegagalan dan jatuh dalam berpolitik adalah sesuatu yang biasa. Yang tidak biasa itu jatuh dan tak bangun lagi. Itu harus dipercayai semua orang, jika mau mengadikan jiwa dan raganya untuk masyarakat. Karena Politik adalah cara yang elegan dan elok untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dan daerah,” kata Hendrik lagi.

Seperti karier di politik yang pasang surut, perjuangan hidup Hendrik juga tidak mudah. Ayahnya adalah guru negeri, yang harus memberi nafkah kepada 10 anaknya. Mereka kerap berpindah tempat, sesuai tugas yang diembankan kepada orang tuanya.

Potret keluarga seperti itu membuat Hendrik tumbuh menjadi anak yang tangguh. Ia tumbuh menjadi anak yang mandiri, bertanggung jawab, dan tidak cengeng. Meski, saat ingin makan nasi, beras yang menjadi jatah dari negara untuk ayahnya, terkadang sampai di rumah sudah berketu dan banyak batu hitamnya. Tetapi, beruntung masyarakat Maluku, seperti Hendrik, tidak bergantung pada beras. Di sana ada makanan pokok yang lebih disukai masyarakat, yaitu sagu.





“Saya beruntung punya orangtua guru, yang menekankan bahwa tidak ada cara lain mengubah keadaan kecuali pendidikan. Dan, itu mendorong kami untuk terus bersekolah,” tandasnya.

Tiga Periode

Sebagai Anggota Badan Pengkajian MPR, Hendrik Lewerissa, menegaskan, hingga akhir 2022, MPR tidak pernah membahas wacana penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden. Karena dalam rapat-rapat resmi, Badan Pengkajian lebih sering membahas berbagai agenda, selain perpanjangan masa jabatan presiden. Antara lain, Sidang Tahunan MPR, pelantikan presiden dan wakil Presiden, revitalisasi fungsi dan peran DPD, serta hubungan pusat dan daerah.

Untuk saat ini, menurut Hendrik, agenda Sidang Tahunan MPR, pelantikan presiden dan wakil presiden, revitalisasi fungsi dan peran DPD, serta hubungan pusat dan daerah, lebih penting untuk menjadi bahan kajian dibanding masalah perpanjangan masa jabatan presiden.

“Ambil contoh soal pelantikan presiden dan wakilnya oleh MPR, sesuai Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945. Pertanyaan, pernahkan MPR melantik presiden, jawabnya ternyata tidak. Yang ada dalam praktik ketatanegaraan kita saat ini adalah presiden dan wakil presiden terpilih ditetapkan oleh KPU, lalu diambil sumpah dan janjinya di hadapan MPR atau DPR,” kata Hendrik.

Ini adalah salah satu isu ketatanegaraan paska reformasi yang patut dituntaskan. Jangan membiarkan peristiwa itu terjadi begitu saja, sehingga tugas konstitusional MPR itu tidak pernah diimplementasikan.

“Soal perpanjang masa jabatan presiden tidak pernah terdengar lagi, dulu sempat muncul saat pandemi Covid 19. Wacana yang di bangun adalah kondisi tidak menentu, sehingga dipandang perlu meninjau ulang masa jabatan presiden atau pemilu di undur. Tetapi,

itu harus melakukan perubahan UUD. Tetapi, wacana itu kini tak terdengar lagi sudah tidak menjadi pembicaraan lagi, tidak ada wacana lagi dalam forum rapat Badan Pengkajian,” pungkasnya. □

MBO

Biodata

Hendrik Izaac Lewerissa, S.H., LL.M.

Tempat/Tgl Lahir : Ambon, Maluku 2 Maret 1968
 Nama Istri : Maya Baby Rampen (Dengan Tiga Anak)

Riwayat Pendidikan

- SD Itawaka, Maluku Tengah (1974–1980)
- SMP Negeri 7 Ambon (1980–1983)
- SMA Negeri Saparua, Maluku Tengah (1983–1986)
- S-1 Fakultas Hukum, Universitas Pattimura (1986–1992)
- S-2 Master of Laws, Temple University (1993–1995)

Riwayat Organisasi

- Ketua OSIS SMA Negeri Saparua, Maluku Tengah (1985–1986)
- Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pattimura (1990–1992)
- Wakil Sekretaris DPP Partai Demokrat (2004–2009)
- Ketua DPD Partai Gerindra Maluku (2010–sekarang)

Karier

- Staf Administrasi PT Tugu Pratama Indonesia (1995–2000)
- Associate Lawyer Makarim & Taira Law Firm (2000–2001)
- Corporate Lawyer Golden Spike Energy (2001–2002)
- Legal Advisor PT Nusantara Energy (2002–2019)
- Anggota DPR-RI (2019–sekarang)

Bencana Alam dan Solidaritas Bangsa

SERANGKAIAN bencana alam yang melanda Indonesia secara berturut-turut harus menjadi momentum membangun solidaritas berbangsa. Jika dahulu musuh bersama adalah penjajahan asing, maka bencana alam yang merenggut jiwa dan harta benda sebagian anak bangsa harus dibantu seluruh komponen masyarakat.

Hal ini selalu ditunjukkan oleh Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, di mana pesan Beliau: "Teruslah menjadi partai yang bisa meringankan beban rakyat." Pesan ini disampaikan kepada kader-kader saat memberikan bantuan kepada korban gempa Cianjur, Jawa Barat, belum lama ini.

Tentu saja, apa yang dilakukan oleh Partai Gerindra tidak lain tidak bukan adalah bagian dari contoh yang kami mulai dari diri kami sendiri sebelum kami mengajak kepada segenap komponen bangsa yang lain. Hal ini perlu dilakukan, mengingat serangkaian bencana itu seakan datang silih berganti. Setelah gempa bumi di Cianjur, berlanjut gempa bumi di Garut Jawa Barat dan Jember Jawa Timur, serta Karangasem Bali. Gunung Semeru, gunung tertinggi di Jawa Timur yang terletak di Kabupaten Lumajang, juga mengalami erupsi yang menyebabkan ribuan penduduk di Kabupaten Lumajang mengungsi.

Sebelumnya, gempa bumi, tanah longsor, banjir, juga melanda berbagai daerah di Indonesia. Kita menyadari bahwa di antara keelokan dan kesuburan sebagian besar daerah di Indonesia menyimpan ancaman bencana yang besar. Ini karena kita berada di zona cincin api atau ring of fire Pasifik.

Dalam kasus gempa bumi di Cianjur, juga kejadian bencana di daerah-daerah lain, warga masyarakat selalu menunjukkan solidaritas yang tinggi. Mereka berbondong-bondong datang ke

lokasi bencana, baik secara kelompok maupun sendiri-sendiri, ingin merasakan duka yang sama dengan memberi berbagai bantuan yang diperlukan bagi warga terdampak.

Semangat gotong-royong yang merupakan inti sari Pancasila telah menjadi falsafah hidup orang Indonesia. Hal ini berbeda dengan negara lain, bahkan negara maju seperti Amerika. Individualisme di Barat kerap menjadikan masyarakatnya menjadi rapuh dalam menghadapi bencana alam dalam skala besar. Kita tidak pernah



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

mendengar adanya warga terdampak bencana alam di Indonesia kemudian melakukan bunuh diri karena putus asa menghadapi dasyatnya alam yang merenggut kehidupan mereka. Tetapi di Amerika, ketika Badai Caterina menghantam Pantai Timur Amerika, dilaporkan angka bunuh diri warga terdampak bencana di negara itu meningkat.

Karena itulah falsafah hidup orang Indonesia, untuk selalu

Oleh:
H. Ahmad Muzani
Wakil Ketua MPR RI



bergotong royong meringankan beban warga yang terkena bencana harus selalu ditumbuh suburkan. Karena tolong-menolong dan gotong-royong juga bagian dari amal ibadah di semua ajaran agama.

Di sisi lain Pemerintah sebagai garda terdepan penanganan bencana lewat berbagai lembaga, seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan lembaga-lembaga terkait lainnya, perlu mengajak serta komponen masyarakat khususnya di periode awal tanggap darurat bencana.

Caranya adalah dengan selalu melakukan mitigasi bencana dan memetakan daerah-daerah rawan bencana. Dari pemetaan itu maka diperlukan penambahan kemampuan, baik itu organisasi masyarakat, karang taruna, komunitas pemuda dan lainnya, di bawah komando BPBD setempat untuk meningkatkan kapasitas bidang SAR, pertolongan pertama, teknik evakuasi dan penyelamatan ke tempat aman.

Belajar dari kasus gempa di Cianjur, kemampuan ini selama ini hanya dimiliki TNI Polri. Ke depan elemen masyarakat sipil juga harus memiliki kemampuan yang sama. Tujuannya adalah jika ada bencana di satu lokasi maka daerah-daerah terdekat yang sudah memiliki kemampuan teknis pertolongan dan evakuasi serta memiliki sumber daya dan peralatan memadai untuk terjun terlebih dahulu.

Mereka adalah tim advance dari daerah terdampak. Misalnya, Gempa Cianjur akan disokong oleh BPBD terdekat, yaitu Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Bekasi, dan sekitarnya. Mereka juga dimungkinkan memiliki rumah sakit lapangan yang bisa dioperasikan secara mobile dan cepat segera tanpa menunggu dukungan pemerintah pusat. Cianjur lebih beruntung karena letaknya tak jauh dari Ibu Kota Jakarta maupun Ibu Kota Provinsi Jawa Barat di Bandung, karena bisa dijangkau hanya dalam maksimal tiga jam. Tetapi, dengan skenario

yang sama di daerah-daerah yang jauh dari pusat kota dengan modeling seperti ini akan sangat membantu daerah terdampak.

Masih melihat dari pengalaman turun langsung ke lokasi bencana di Cianjur, selalu dalam kejadian gempa ada zona-zona penduduk terdampak yang sulit dijangkau. Hal ini karena biasanya gempa terjadi di kawasan yang luas, akses jalan terputus karena rusaknya jalan dan jembatan karena longsor. Beberapa *blank area* di Cianjur hanya bisa ditembus dengan armada motor, dan nampak bahwa komunitas motor dan juga pasukan TNI Polri mampu menjangkau spot-spot yang sebelumnya tak terjangkau oleh bantuan.

Khususnya bencana gempa bumi, daerah terdampak biasanya akan mengalami stagnasi, baik tim penolong maupun unsur pemerintah. Karena mereka akan lebih fokus pada pertolongan keluarga masing-masing, sehingga bantuan dari luar daerah terdampak sangat diperlukan karena ada tambahan energi baru dan kekuatan pendukung yang secara psikis tidak terbebani oleh dampak bencana yang telah melemahkan moral para korban dan keluarganya.

Di luar penyelesaian secara teknokratis atas berbagai problem kebencanaan, sebagai masyarakat yang beragama kita tetap mendoakan agar negeri nusantara ini terhindar dari segala bencana. Terlebih lagi patut kita syukuri bahwa falsafah bangsa Pancasila, ternyata tidak hanya kumpulan sila-sila yang hanya dihapalkan saja. Dalam beragam bencana di tanah air, nampak benar bahwa gotong-royong sesama anak bangsa menjadi kekuatan bangsa Indonesia. Kekuatan inilah yang nantinya tidak hanya ada dalam situasi duka karena ada bencana, tetapi menjadi kekuatan untuk memajukan bangsa Indonesia. □

Agar Pancasila Tak Berada di Lorong Sepi

Pengalaman sebagai anggota MPR yang melakukan sosialisasi Pancasila ke berbagai pelosok negeri, bahkan luar negeri membuat Jafar Hafsa mengerti dan memahami ideologi negara itu. Agar Pancasila tak berada di jalan sunyi, pikirannya yang mengupas tentang Pancasila itupun dirangkum menjadi sebuah buku.

PANCASILA merupakan mata air yang tak pernah kering dan surut untuk dibahas, dibincangkan, didiskusikan, hingga dibukukan. Salah satu orang yang mendulang di mata air itu adalah Prof. Dr. Ir. Mohammad Jafar Hafsa, IPM. Setelah malang melintang sebagai anggota MPR sekaligus DPR menyosialisasikan Pancasila, pria asal Sulawesi Selatan itu kini mengemas Pancasila dalam sebuah buku yang berjudul: *Pancasila Ideologi Berbangsa dan Bernegara*.

Buku yang memiliki ketebalan hingga 360 halaman ini terbagi VIII Bab. Sesuai judulnya, setiap bab membahas tentang Pancasila. Di Bab V mengupas tentang sesuatu yang pernah dikembangkan Orde Baru terkait Pancasila, yakni Butir-Butir Pancasila. Namun, kalau kita telisik lebih dalam di bab ini, butir-butir yang ada berbeda dengan tafsir pada masa lalu. Pada masa Orde Baru ada 36 butir, tetapi dalam buku ini Jafar Hafsa menggali butir-butir yang bersumber dari UUD NRI Tahun 1945 sehingga butir-butir yang disajikan sangat fundamental.

Dari bab inilah membuat buku yang diterbitkan oleh MPR dan Universitas Pancasila itu memiliki bobot yang berbeda dengan buku-buku lain yang membahas masalah yang sama.

Buku karya pria alumni Universitas Hasanuddin itu semakin bertambah bobotnya dengan keikutsertaan Wakil Ketua MPR Sjarifuddin Hasan memberikan kata sambutan. Dalam sambutannya, politisi Partai Demokrat itu menyebut, buku ini terdiri dari tiga golongan yang saling melengkapi dan mencerahkan, yakni golongan normatif pada lima bab pertama, golongan implementatif kekinian pada bab keenam, dan ditutup dengan solusi berjudul Strategi Pelembagaan Pancasila pada bagian akhir.

Bangsa ini, kata Syarif Hasan – begitu Sjarifuddin Hasan biasa disapa — memiliki banyak masalah, seperti ketidakadilan dan perilaku koruptif. Nah, menurut Syarif Hasan, hadirnya buku ini merupakan

penawar solusi dari berbagai masalah yang ada.

Bagi Jafar sendiri, Pancasila harus senantiasa dikaji, dimasyarakatkan, disosialisasikan, diimplementasikan, hingga akhirnya bermuara pada hati sanubari, menjadi obsesi masyarakat, menjadikan acuan dalam kehidupan, menjadikan sumber inspirasi, sebagai motivasi, sebagai pemicu menjalani kehidupan religius, Berketuhanan Yang Maha Esa, saling rukun dalam perbedaan kepercayaan, dan sikap-sikap yang lain.

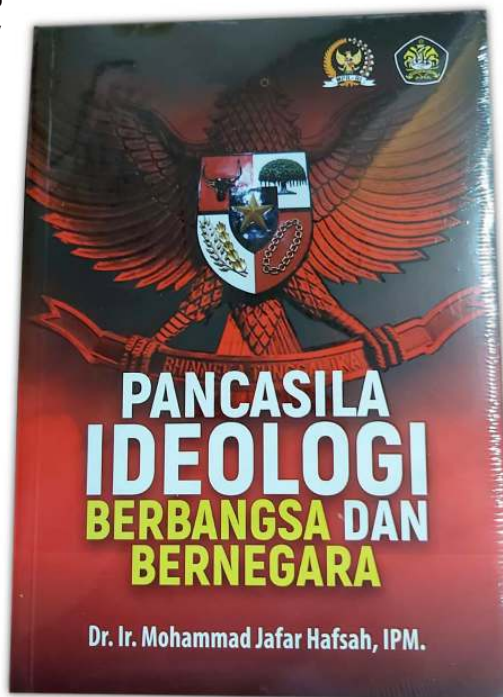
Pria yang aktif di berbagai organisasi, seperti ICMI dan HKT1, itu

menegaskan, Pancasila sebagai roh bangsa yang senantiasa memberi energi, semangat, dan dorongan. Pancasila menyinari kehidupan dan penghidupan bangsa ini. Pancasila nilai luhur bangsa, filosofi, peradaban, perekat bangsa, sehingga merupakan keniscayaan. Oleh karena itu, Pancasila jangan dibiarkan merana dalam rona kehidupan, jangan dia sepi sendiri di lorong sunyi tak bertepi.

Hadirnya buku ini, menurut Rektor Universitas Pancasila, Prof. Dr. Edie Toet Hendratno, SH., MSi., FCBarb., sebagai usaha menempuh nalar berfikir ilmiah, sehingga buku ini dipastikan akan menjadi khazanah yang penting dalam menggali Pancasila dalam perspektif ideologi. Kekuatan ilmiah yang ada, menurut Edie, tampak pada cara penyajian, analisa dan data, serta kekuatan argumentasi kesimpulan yang dihasilkan.

Terkait dari semua omongan tentang Pancasila, Jafar menyebut, perlunya satu lembaga khusus menaungi Pancasila. Lembaga yang diinginkan bisa bernama Pusat Kajian Dasar Negara yang dibentuk oleh pemerintah melalui surat keputusan presiden, atau nama lain yang mampu mengimplementasikan Pancasila baik secara ilmiah maupun kegiatan-kegiatan bersifat praktis. Apa yang dikatakan itu disebut langkah untuk mengimplementasikan Pancasila. □

AWG





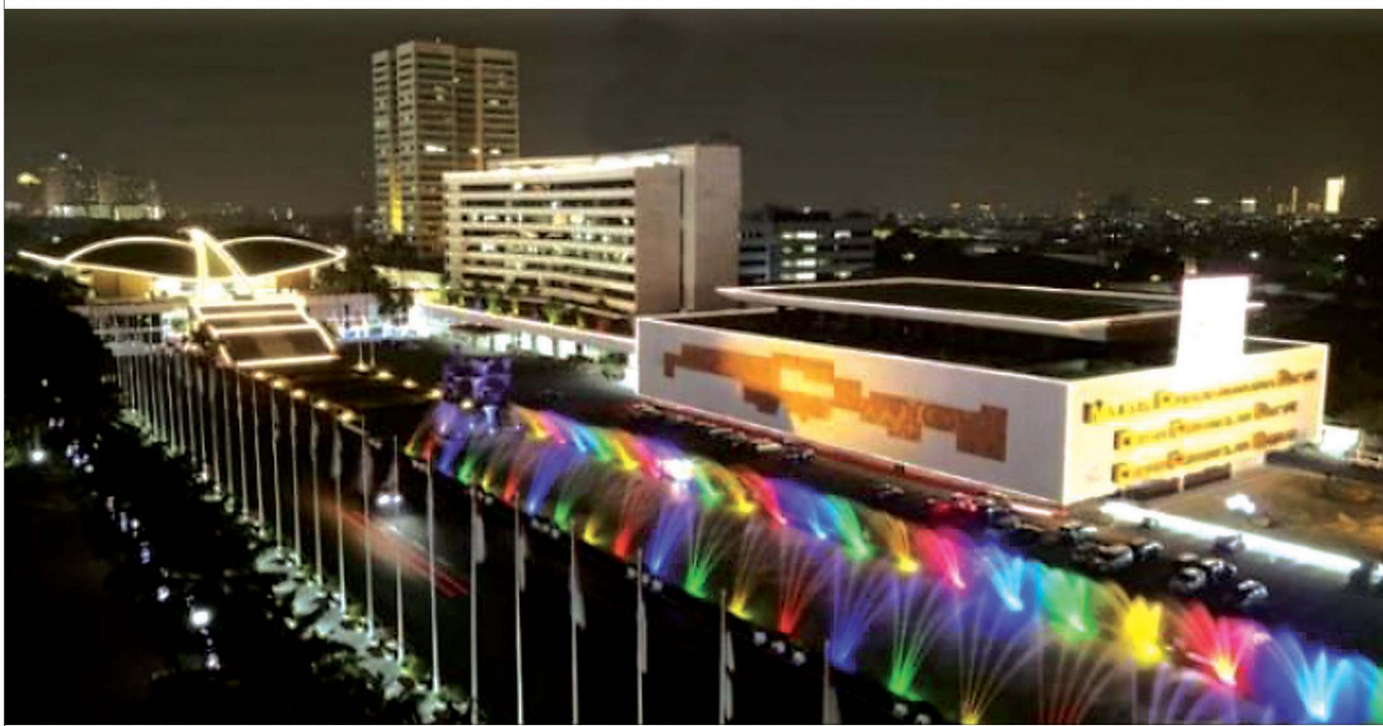
MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT



Buku Digital MPR RI
SETJEN MPR RI



MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT



Buku Digital MPR RI
SETJEN MPR RI